



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2017 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
 - b. bahwa terdapat kondisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 tidak sesuai dengan keadaan dalam tahun berjalan, sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan antara lain perkembangan tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 020) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan daerah yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah daerah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan serta sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6 (enam) Bab dengan rincian sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN.
 - b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018.
 - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.

- d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBNGUNAN DAERAH TAHUN 2018.
 - e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018.
 - f. BAB VI PENUTUP.
- (3) Rincian lebih lanjut dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2018

^ Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ^


^ ROBERT SIMBOLON

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
^ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ^


^ BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 20 Agustus 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.3.1. Maksud	5
1.3.2. Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 SAMPAI	
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018.....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017	6
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Keadaan Triwulan II	
Tahun 2018	23
BAB III KERANGAK EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	26
3.1 Penyesuaian Terhadap Kerangka Ekonomi Makro Daerah	26
3.1.1 Perubahan Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Provinsi Nusa	
Tenggara Timur.....	26
3.3.2. Lain-Lain Asumsi	34
3.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	42
3.2.1 Perubahan Belanja Daerah.....	45
3.2.2 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	45
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018	
.....	46
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	46
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional.....	46
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2018.....	47
4.2. Sasaran Pembangunan.....	48
4.3. Prioritas Pembangunan.....	53
4.4. Inovasi Pembangunan Provinsi NTT	63

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018.....	66
BAB VI PENUTUP	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana tahunan pemerintah daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun 2017.

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada pasal 343 ayat (1): RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan tahun berjalan; (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan; atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Perubahan RKPD Tahun 2018 dan Perubahan Renja PD Tahun 2018 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD;
5. Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan;
6. Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
7. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
8. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2018;
9. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2018.

Memperhatikan dinamika pembangunan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017, terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang perlu untuk melakukan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2018 juga memperhatikan beberapa hal terkait Gubernur dan Wakil Gubernur. Secara *de facto* Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018

- 2023 telah terpilih (*de jure* masih menunggu Keputusan KPU). Secara politis, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah telah menjadi tanggungjawab dari pemerintahan baru setelah dilantik pada Bulan September 2018. Dari segi perencanaan pembangunan daerah, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2018-2023 harus diagendakan dalam perencanaan penganggaran pembangunan untuk mewujudkan janji politik selama 2018-2023. Integrasi usulan prioritas kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih mempertimbangkan kelayakan implementasi dari aspek program, waktu, pembiayaan, hukum dan politik, dan dijabarkan dari visi: "NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam bingkai NKRI" serta misi :

1. Kesejahteraan Rakyat;
2. Pembangunan Pariwisata;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Sumberdaya Manusia;
5. Reformasi Birokrasi.

Setelah Perubahan RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dengan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2018 serta mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan Perubahan RKPD bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKPD yang diakomodir didalam APBD Tahun Anggaran 2018 yang juga mengharmoniskan dan menyinergikannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan kabupaten/kota.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 dengan perubahannya Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018;

20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA PPAS-P) Tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
- BAB III KERANGAK EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERH
- BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017

Mengingat pelaksanaan RPJMD 2013-2018 dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2018 telah berakhir, maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, apakah target yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan dengan target yang telah ditetapkan, kemudian bila ada permasalahan dapat diantisipasi dan diambil tindakan sedini mungkin.

Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2017 yang merupakan Tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018, terdapat berbagai Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan 8 Misi Pembangunan Daerah, yaitu:

I. Misi 1: Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dalam Rangka Terwujudnya Mutu Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing.

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 3 perangkat daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Badan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT. Sedangkan Program Prioritas yang dijalankan adalah:

A. Program Urusan Pendidikan

- 1) Program Peningkatan Pendidikan Non Formal
- 2) Program Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa
- 3) Program Peningkatan Mutu Pendidikan
- 4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- 5) Program Hibah Pendidikan
- 6) Program Bantuan Sosial Kependidikan

B. Program Urusan Kebudayaan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

C. Program Urusan Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

D. Program Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
- 3) Program Hibah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

II. Misi 2: Meningkatkan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan yang dapat Dijangkau Seluruh Masyarakat.

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 2 perangkat daerah yaitu Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan RSUD Prof. DR. W.Z. Johanes Kupang, dengan Program Prioritas yang dijalankan adalah:

- 1) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
- 3) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- 4) Program Peningkatan Gizi
- 5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
- 6) Program Manajemen Informasi dan Regulasi Pembangunan Kesehatan
- 7) Program Upaya Kesehatan Perorangan
- 8) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- 9) Program Hibah Kemasyarakatan Bidang Kesehatan
- 10) Program Bantuan Sosial Bidang Kesehatan

III. Misi 3: Memberdayakan Ekonomi Rakyat dan Mengembangkan Ekonomi Kepariwisata dengan Mendorong Pelaku Ekonomi Untuk Mampu Memanfaatkan Keunggulan Potensi Lokal.

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 11 perangkat daerah, yaitu:

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT
- Kantor P2TSP Provinsi NTT
- Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT
- Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT
- Dinas Peternakan Provinsi NTT
- Dinas Kehutanan Provinsi NTT

Program Prioritas yang dijalankan adalah:

A. Program Urusan Ketenagakerjaan

- 1) Program Pembinaan dan Peningkatan Ketenagakerjaan
- 2) Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
- 3) Program Pengembangan dan Pembinaan Wilayah Transmigrasi

B. Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi
- 2) Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah
- 3) Program Hibah Koperasi

- C. Program Urusan Penanaman Modal
 - 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - 2) Program Peningkatan Investasi Daerah
 - 3) Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi
 - 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
 - 5) Program Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - 6) Program Fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Pembinaan Badan Usaha
 - 7) Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Perekonomian
- D. Program Urusan Pariwisata
 - 1) Program Pengembangan Kemitraan Kebudayaan, Destinasi dan Promosi Pariwisata
 - 2) Program Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif
 - 3) Program Hibah Pariwisata
- E. Program Urusan Ketahanan Pangan
 - 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan
 - 2) Program Peningkatan Penyuluhan Usaha Tani
- F. Program Urusan Pertanian
 - 1) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan
 - 2) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 3) Program Pengembangan Benih dan Pembibitan
 - 4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - 6) Program Dukungan dan Manajemen Pembangunan Peternakan
- G. Program Urusan Kehutanan
 - 1) Program Pengembangan Pemanfaatan dan Penertiban Sumber Daya Hutan
- H. Program Urusan Perindustrian dan Perdagangan
 - 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - 3) Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri
 - 4) Program Hibah Bidang Perekonomian
- IV. Misi 4: Pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 23 perangkat daerah, yaitu:

 - 1) Bappeda Provinsi NTT
 - 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT

- 3) Satpol Pamong Praja Provinsi NTT
- 4) Biro Umum Setda Provinsi NTT
- 5) Biro Keuangan Setda Provinsi NTT
- 6) Biro Hukum Setda Provinsi NTT
- 7) Biro Organisasi Setda Provinsi NTT
- 8) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
- 9) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT
- 10) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT
- 11) Biro Hubungan Masyarakat Setda Provinsi NTT
- 12) Sekretariat Dewan Provinsi NTT
- 13) Inspektorat Provinsi NTT
- 14) Kantor Penghubung Provinsi NTT
- 15) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT
- 16) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi NTT
- 17) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
- 18) Sekretariat Dewan KORPRI Provinsi NTT
- 19) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi NTT
- 20) Badan Arsip Daerah Provinsi NTT
- 21) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

Program Prioritas yang dijalankan adalah:

A. Program Urusan Perencanaan

- 1) Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 2) Program Dukungan Manajemen Kerjasama Pembangunan Daerah Dengan Lembaga Internasional

B. Program Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- 1) Program Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi dan Fasilitas Kewaspadaan Nasional
- 2) Program Fasilitas Politik, Pemilu, Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- 3) Program Pemeliharaan Keamanan, Kenyamanan Lingkungan dan Perlindungan Masyarakat
- 4) Program Peningkatan Penegakan Produk Hukum Daerah
- 5) Program Hibah Pengamanan dan Ketertiban

C. Program Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 3) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
- 4) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
- 6) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- 7) Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik
- 8) Program Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah
- 9) Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
- 10) Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama
- 11) Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Keagamaan dan Kependidikan
- 12) Program Bantuan Sosial Bidang Pendidikan.
- 13) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- 14) Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kependudukan Dan Otonomi Daerah
- 15) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
- 16) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 17) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
- 18) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- 19) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat
- 20) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penataan Aset
- 21) Program Pendidikan Kedinasan
- 22) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 23) Program Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan KORPRI
- 24) Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi
- 25) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
- 26) Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup, Politik dan Pemerintahan
- 27) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Penyerbarluasan Data dan Informasi Penelitian

D. Program Urusan Kearsipan

- 1) Program Peningkatan Sistem Informasi Administrasi dan Kearsipan

- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- E. Program Urusan Komunikasi Dan Informasi
 - 1) Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Daerah
 - 2) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
 - 3) Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah
 - 4) Program Hibah Organisasi Bidang Komunikasi dan Informasi
 - 5) Program Pengembangan Data dan Informasi
- F. Program Urusan Umum
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Capaian Kinerja
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- V. Misi 5: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 8 perangkat daerah, yaitu:

 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT
 - 2) Dinas Kesehatan Provinsi NTT
 - 3) Dinas Perhubungan Provinsi NTT
 - 4) Bappeda Provinsi NTT
 - 5) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT
 - 6) Dinas Kehutanan Provinsi NTT
 - 7) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT

Program Prioritas yang dilaksanakan adalah:

 - A. Program Urusan Pekerjaan Umum
 - 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - 2) Program Pengolahan Sumber Daya Air
 - 3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
 - 4) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan
 - 5) Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
 - 6) Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum
 - B. Program Urusan Kesehatan
 - 1) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 - C. Program Urusan Perhubungan
 - 1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan
 - 2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

D. Program Urusan Perencanaan

- 1) Program Pengembangan Data Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang

E. Program Urusan Lingkungan Hidup

- 1) Program Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 2) Program Perlindungan Pemulihan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 3) Program Rehabilitasi Hutan dan Hutan

F. Program Urusan Kehutanan

- 1) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

G. Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1) Program Pembinaan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan, Migas dan Panas Bumi
- 2) Program Pengembangan Pertambangan
- 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan

VI. Misi 6: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, sedangkan Program Prioritas yang dijalankan adalah:

- 1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan
- 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 3) Program Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

VII. Misi 7: Mempercepat Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT, sedangkan Program Prioritas yang dijalankan adalah:

- 1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya
- 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 3) Program Pengembangan Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- 4) Program Bantuan Sosial Kelautan Perikanan

VIII. Misi 8: Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, Bencana dan Pengembangan Kawasan Perbatasan

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah yaitu:

- 1) Bappeda Provinsi NTT

- 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTT
- 3) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT
- 4) Dinas Sosial Provinsi NTT
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT

Program Prioritas yang dijalankan adalah:

- A. Program Urusan Perencanaan
 - 1) Program Desa Mandiri Anggur Merah
 - 2) Program Hibah Ekonomi Produktif
- B. Program Urusan Pemberdayaan MasyarakatDesa
 - 1) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Pedesaan
 - 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Ekonomi dan Aparatur Desa
 - 3) Program Pengembangan Kemitraan dan Teknologi Pedesaan
 - 4) Program Hibah Perumahan (P2LDT)
- C. Program Urusan Perbatasan
 - 1) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- D. Program Urusan Sosial
 - 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya
 - 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - 3) Program Penyandang Penyakit Sosial
 - 4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - 5) Program Bantuan Sosial Kepada Individu dan Keluarga
- E. Program Urusan Penanggulangan Bencana Daerah
- F. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2016, maka Bappeda Provinsi NTT telah melakukan sosialisasi Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD, Renja dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, baik melalui pelatihan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya maupun dengan penjelasan cara pengisian Format Evaluasi menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, pada Surat yang dikirimkan oleh Bappeda kepada seluruh perangkat daerah.

Laporan pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja perangkat daerah ini dikompilasi kedalam laporan hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017 untuk keadaan triwulan IV.

Tabel 2.1
Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran
Menurut 8 Misi Pembangunan Daerah dalam RKPD Provinsi NTT Tahun 2017
Keadaan Triwulan IV

NO	URAIAN	ANGGARAN RP.	KONDISI S/D TRIWULAN IV					PREDIKAT KINERJA		
			KINERJA KEUANGAN			KINERJA FISIK				
			TARGET	REALISASI		TARGET	REAL			
			(%)	Rp.	(%)	(%)	(%)			
KEU										FISIK
MISI 1 : Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang berdaya saing										
1	DINAS PENDIDIKAN	425.485.879.000	82,68	337.288.660.567	79,27	90,79	90,82	T	T	
2	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20.948.115.000	99,97	14.832.963.860	70,81	99,97	70,81	S	S	
3	DINAS KEBUDAYAAN	8.581.021.000	100,00	8.338.117.571	97,17	100,00	97,17	ST	ST	
4	DINAS PERPUSTAKAAN	3.228.014.000	100,00	3.107.083.974	96,25	100,00	100,00	ST	ST	
JUMLAH MISI 1		458.243.029.000	95,66	363.566.825.972	79,34	97,69	89,70	T	T	
MISI 2 : Meningkatkan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan yang dapat Dijangkau Seluruh Masyarakat										
1	DINAS KESEHATAN	50.391.120.000	100,00	38.160.650.934	75,73	100,00	75,73	S	S	
2	RSUD PROF. DR. WZ. JOHANNES	188.041.317.000	100,00	115.847.703.135	61,61	100,00	61,61	R	R	
JUMLAH MISI 2		238.432.437.000	100,00	154.008.354.069	64,59	100,00	68,67	R	S	
MISI 3 : Memberdayakan Ekonomi Rakyat dan Mengembangkan Ekonomi Kepariwisata dengan Mendorong Pelaku Ekonomi Untuk Mampu Memanfaatkan Keunggulan Potensi Lokal										
1	DINAS PERTANIAN	36.222.116.000	99,96	33.698.393.762	93,03	99,96	95,74	ST	ST	
2	DINAS PARIWISATA	23.848.816.500	100,00	20.711.645.484	86,85	100,00	86,85	T	T	
P3	DINAS PETERNAKAN	23.821.246.000	100,00	22.833.999.770	95,86	100,00	95,86	ST	ST	
4	DINAS KEHUTANAN	13.015.269.440	100,00	11.722.907.529	90,07	100,00	90,07	T	T	

NO	URAIAN	ANGGARAN RP.	KONDISI S/D TRIWULAN IV					PREDIKAT KINERJA	
			TARGET (%)	KINERJA KEUANGAN		KINERJA FISIK			
				REALISASI		TARGET	REAL		
				Rp.	(%)	(%)	(%)		
5	DINAS PERDAGANGAN	5.545.758.000	100,00	5.223.761.723	94,19	100,00	94,19	ST	ST
6	DINAS PERINDUSTRIAN	7.121.308.000	100,00	6.610.003.020	92,82	100,00	92,82	ST	ST
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.830.021.000	100,00	8.263.893.173	93,59	100,00	93,59	ST	ST
8	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	8.651.210.000	90,00	8.028.149.186	92,80	90,00	92,80	ST	ST
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.908.920.000	100,00	4.603.617.328	93,78	100,00	100,00	ST	ST
10	BIRO PEREKONOMIAN	3.162.978.000	100,00	3.106.432.150	98,21	100,00	98,21	ST	ST
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	4.578.323.000	100,00	4.499.879.126	98,29	100,00	98,29	ST	ST
	JUMLAH MISI 3	139.705.965.940	99,09	129.302.682.251	92,55	99,09	94,40	ST	ST
MISI 4 : Pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah									
1	BIRO UMUM	56.755.500.000	100,00	56.060.072.831	98,77	100,00	98,77	ST	ST
2	BIRO HUKUM	2.614.506.000	100,00	2.355.775.000	90,10	100,00	90,10	T	T
3	BIRO ORGANISASI	2.282.557.000	100,00	2.216.676.275	97,11	100,00	97,11	ST	ST
4	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.235.369.000	98,12	5.144.815.950	98,27	98,12	98,27	ST	ST
5	BIRO PEMERINTAHAN	2.321.227.000	99,53	2.265.210.731	97,59	99,53	97,59	ST	ST
6	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT	5.275.441.000	99,73	4.850.711.593	91,95	99,73	99,45	ST	ST
7	BIRO PENG. BARANG & JASA	3.463.093.000	100,00	3.416.588.935	98,66	100,00	98,66	ST	ST
8	BIRO KERJASAMA	1.478.027.000	76,92	1.172.538.500	79,33	76,92	79,33	T	T

NO	URAIAN	ANGGARAN RP.	KONDISI S/D TRIWULAN IV					PREDIKAT KINERJA	
			KINERJA KEUANGAN			KINERJA FISIK			
			TARGET (%)	REALISASI		TARGET (%)	REAL (%)		
				Rp.	(%)				
9	SEKRETARIAT DPRD	68.836.758.000	100,00	64.981.093.952	94,40	100,00	94,40	ST	ST
10	INSPEKTORAT	8.564.398.000	100,00	8.144.073.120	95,09	100,00	92,87	ST	ST
11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.242.889.520	100,00	9.246.892.490	90,28	100,00	90,28	T	T
12	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	99.632.841.718	100,00	75.940.995.871	76,22	100,00	64,76	T	R
13	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	12.201.055.000	96,38	11.515.773.604	94,38	96,38	94,38	ST	ST
14	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	30.474.591.000	100,00	27.697.127.975	90,89	100,00	90,89	T	T
15	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.304.676.000	100,00	3.109.974.200	94,11	100,00	94,11	ST	ST
16	BADAN PENGHUBUNG PROV.NTT di JAKARTA	3.428.471.000	100,00	3.397.100.275	99,08	100,00	99,08	ST	ST
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.905.955.000	99,96	5.373.893.566	90,99	99,96	90,99	T	T
18	DINAS KEARSIPAN	3.506.193.000	100,00	3.356.326.338	95,73	100,00	95,73	ST	ST
19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.082.893.000	100,00	2.864.752.930	92,92	100,00	92,92	ST	ST
20	SEKRETARIAT DP KORPRI	2.436.620.000	95,47	2.326.155.010	95,47	95,47	95,47	ST	ST
21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.313.907.000	100,00	4.916.077.440	92,51	100,00	92,51	ST	ST
	JUMLAH MISI 4	336.356.968.238	98,39	300.352.626.586	89,30	98,39	92,75	T	ST
MISI 5 : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup									
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	347.110.103.000	100,00	336.490.024.095	96,94	100,00	97,64	ST	ST

NO	URAIAN	ANGGARAN RP.	KONDISI S/D TRIWULAN IV					PREDIKAT KINERJA	
			KINERJA KEUANGAN			KINERJA FISIK			
			TARGET (%)	REALISASI		TARGET (%)	REAL (%)		
				Rp.	(%)				
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	26.694.864.000	100,00	23.181.020.669	86,84	100,00	83,41	T	T
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	962.725.500	100,00	652.387.640	67,76	100,00	67,76	S	S
4	DINAS PERHUBUNGAN	17.072.516.000	100,00	16.521.839.525	96,77	100,00	100,00	ST	ST
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	4.164.576.000	99,95	3.991.138.727	95,84	99,95	100,00	ST	ST
6	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	48.154.630.000	100,00	37.911.920.872	78,73	100,00	75,15	T	T
7	DINAS KEHUTANAN	15.316.652.560	100,00	12.170.591.246	79,46	100,00	79,46	T	T
	JUMLAH MISI 5	459.476.067.060	99,99	430.918.922.774	93,78	99,99	86,20	ST	T
MISI 6 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan dan Kesejahteraan Anak									
1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.544.262.000	100,00	2.333.506.350	91,22	100,00	91,72	ST	ST
	JUMLAH MISI 6	2.544.262.000	100,00	2.333.506.350	91,72	100,00	91,72	ST	ST
MISI 7 : Mempercepat Pembangunan Kelautan Dan Perikanan									
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	69.592.123.550	100,00	68.081.446.069	97,83	100,00	97,83	ST	ST
	JUMLAH MISI 7	69.592.123.550	100,00	68.081.446.069	97,83	100,00	97,83	ST	ST
MISI 8 : Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, Bencana dan Pengembangan Kawasan Perbatasan									
1	DINAS SOSIAL	22.697.013.000	100,00	22.361.539.368	98,52	100,00	100,00	ST	ST
2	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.230.100.000	95,91	6.872.860.297	95,06	95,91	99,91	ST	ST

6

NO	URAIAN	ANGGARAN RP.	KONDISI S/D TRIWULAN IV					PREDIKAT KINERJA	
			KINERJA KEUANGAN			KINERJA FISIK			
			TARGET (%)	REALISASI		TARGET (%)	REAL (%)		
				Rp.	(%)				
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.304.417.000	99,85	4.551.212.906	85,80	99,85	85,80	T	T
4	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	2.647.204.000	100,00	2.575.248.438	97,28	100,00	97,28	ST	ST
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	29.035.710.980	100,00	27.927.443.324	96,18	100,00	96,18	ST	ST
	JUMLAH MISI 8	66.914.444.980	99,15	64.288.304.333	96,08	99,15	95,83	ST	ST
	JUMLAH TOTAL (MISI 1+2+3+4+5+6+7+8)	1.771.265.297.768	100,00	1.512.852.668.404	85,41	100,00	89,64	T	T

Sumber: Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Provinsi NTT

1

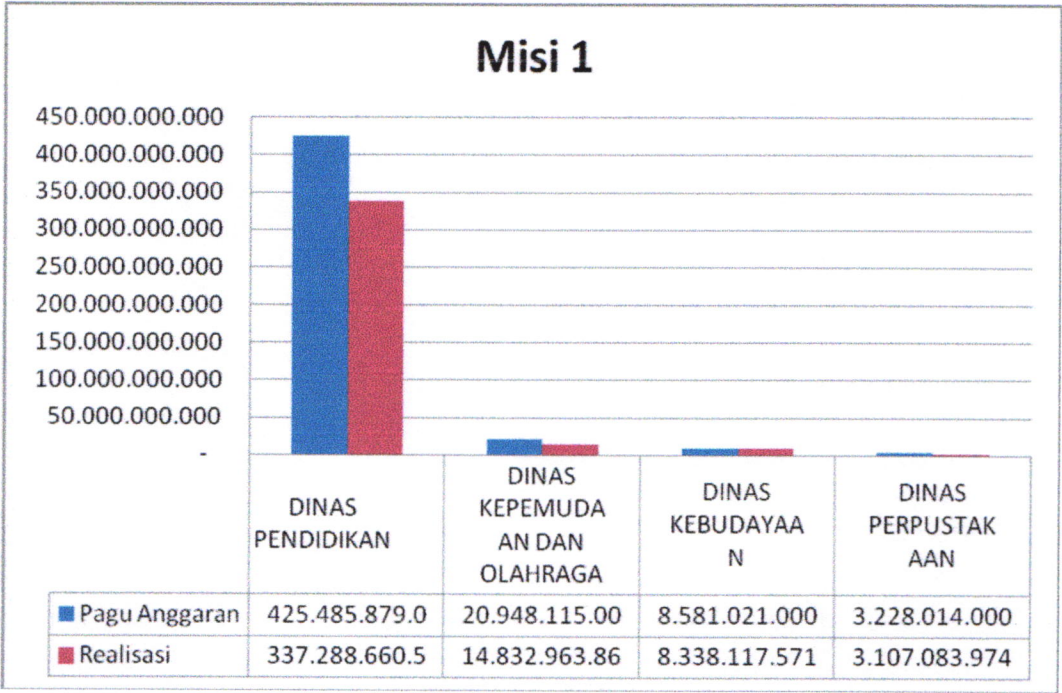
Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa data realisasi capaian anggaran pelaksanaan APBD menurut Urusan Pemerintah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan sampai dengan Triwulan IV tersebut memiliki predikat sebagian besar berpredikat Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T). Untuk Urusan Pemerintahan yang berpredikat Sangat Tinggi (ST) dan Urusan Pemerintahan yang berpredikat Tinggi (Tinggi) dapat dilihat pada tabel diatas.

Tabel 2.2
Interval Penilaian Predikat Kinerja

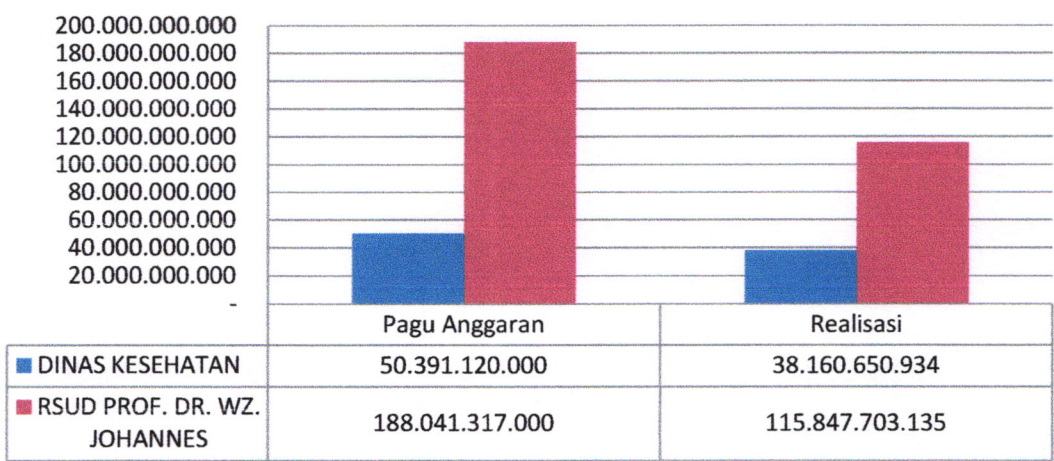
INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN
91% ≤ 100%	SANGAT TINGGI (ST)
76% ≤ 90%	TINGGI (T)
66% ≤ 75%	SEDANG (S)
51% ≤ 65%	RENDAH (R)
≤ 50%	SANGAT RENDAH (SR)

Pagu dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Capaian Realisasi Anggaran untuk Belanja Langsung dari 49 perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, sebagaimana terlihat pada Gambar berikut ini:

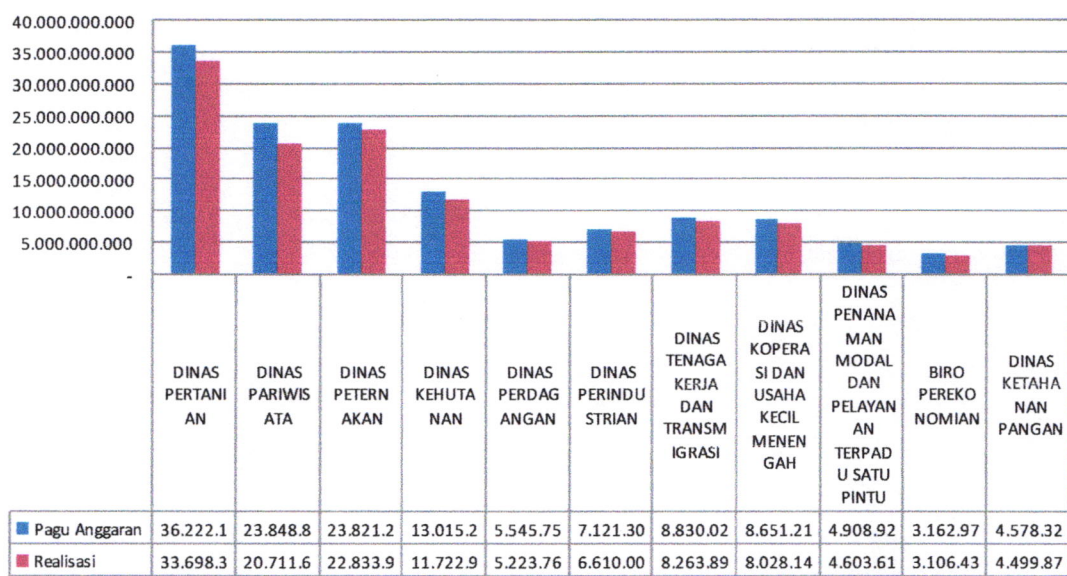
Gambar 2.3
Pagudan Realisasi AnggaranPerangkat Daerah Menurut 8 Misi Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017

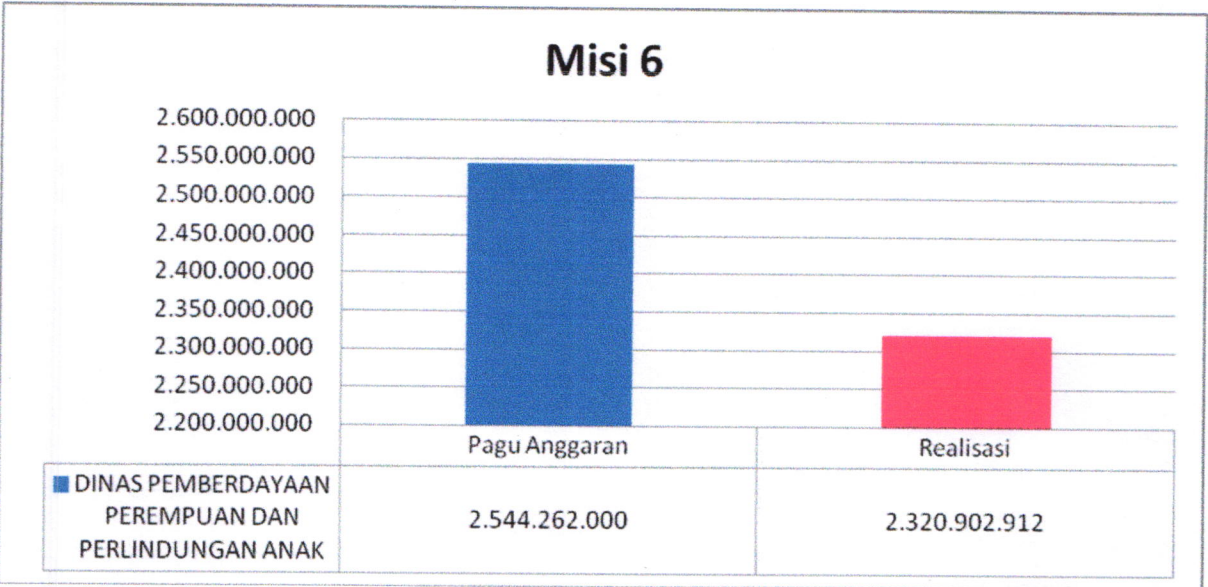
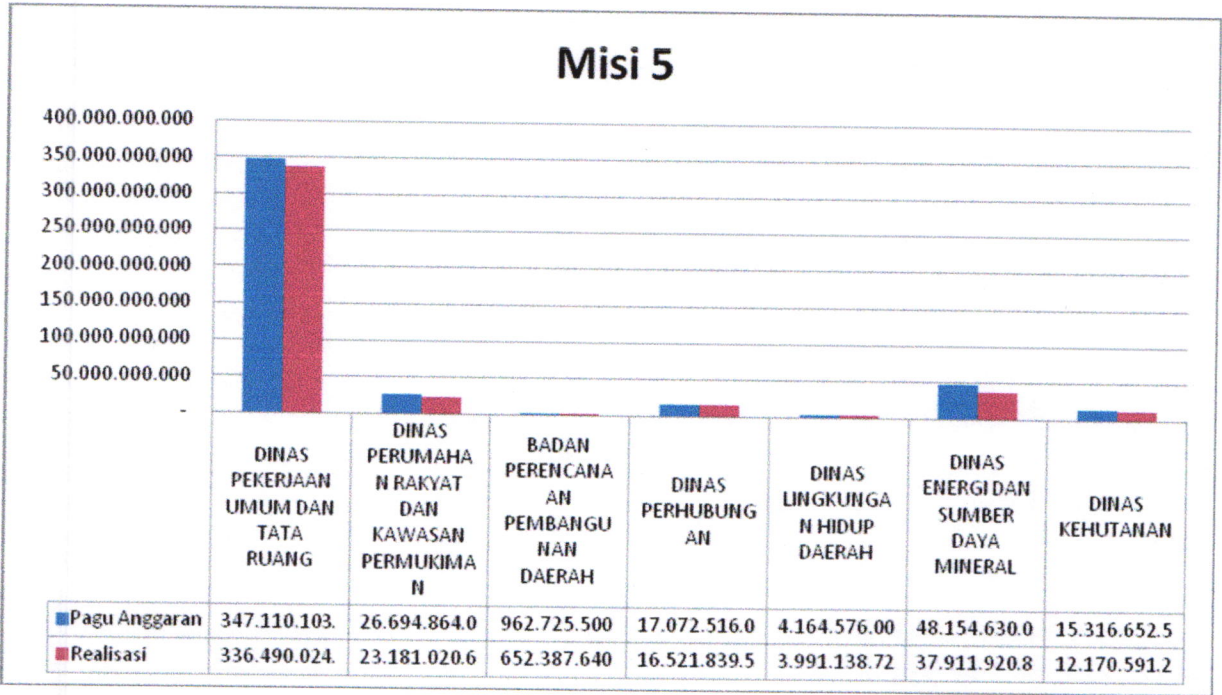
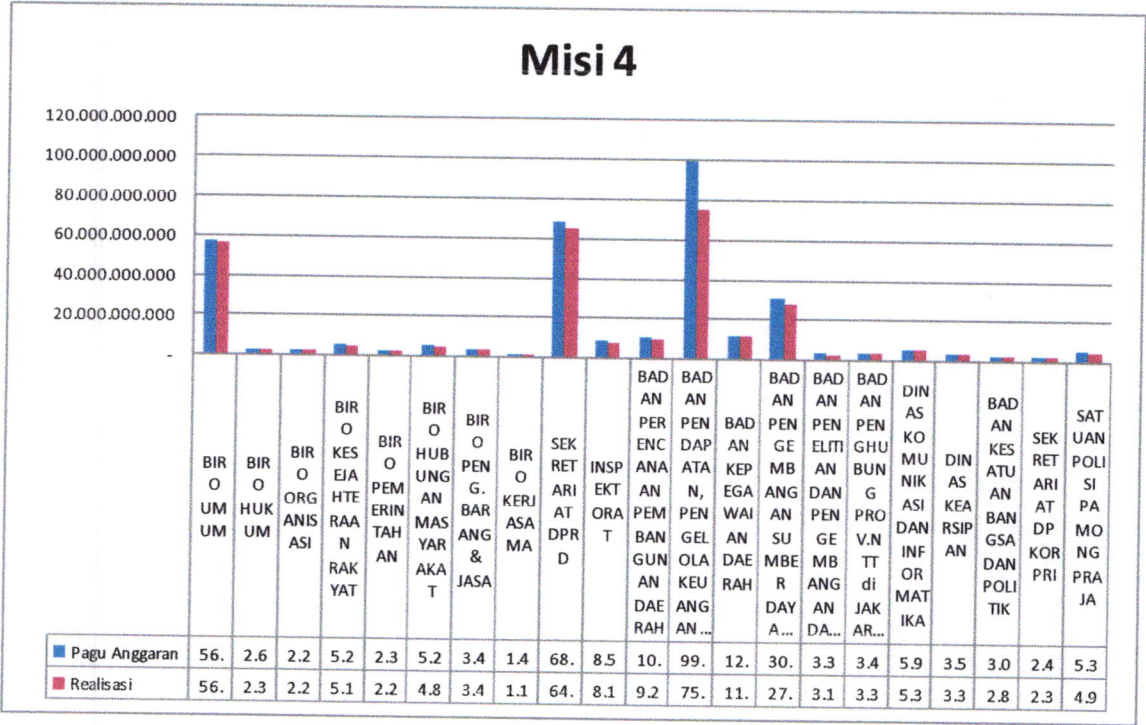


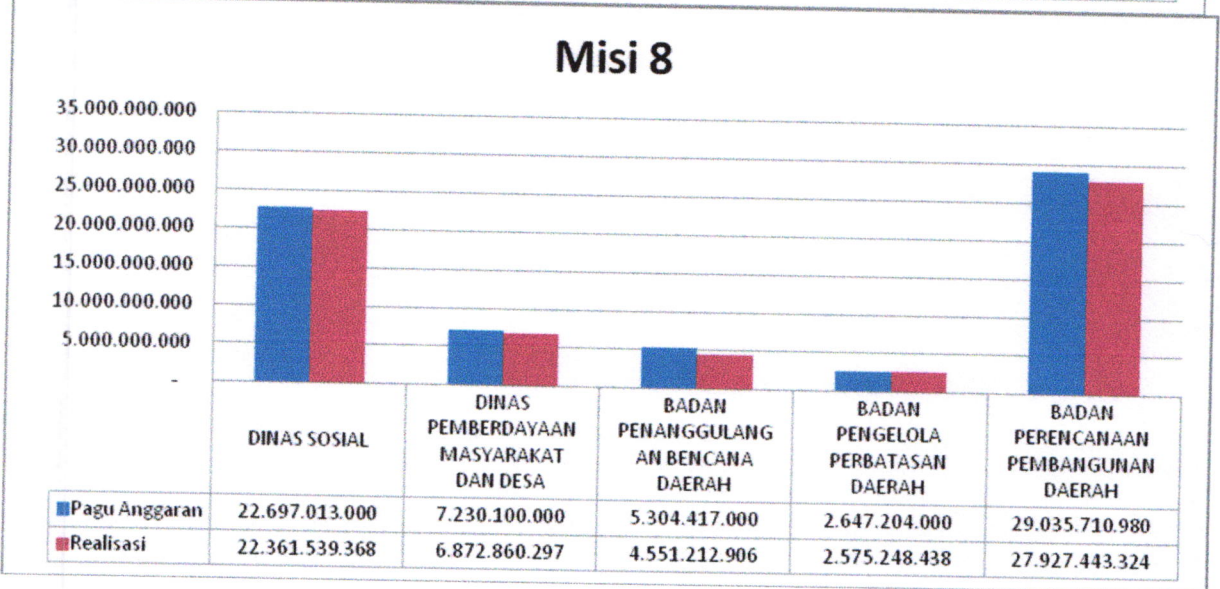
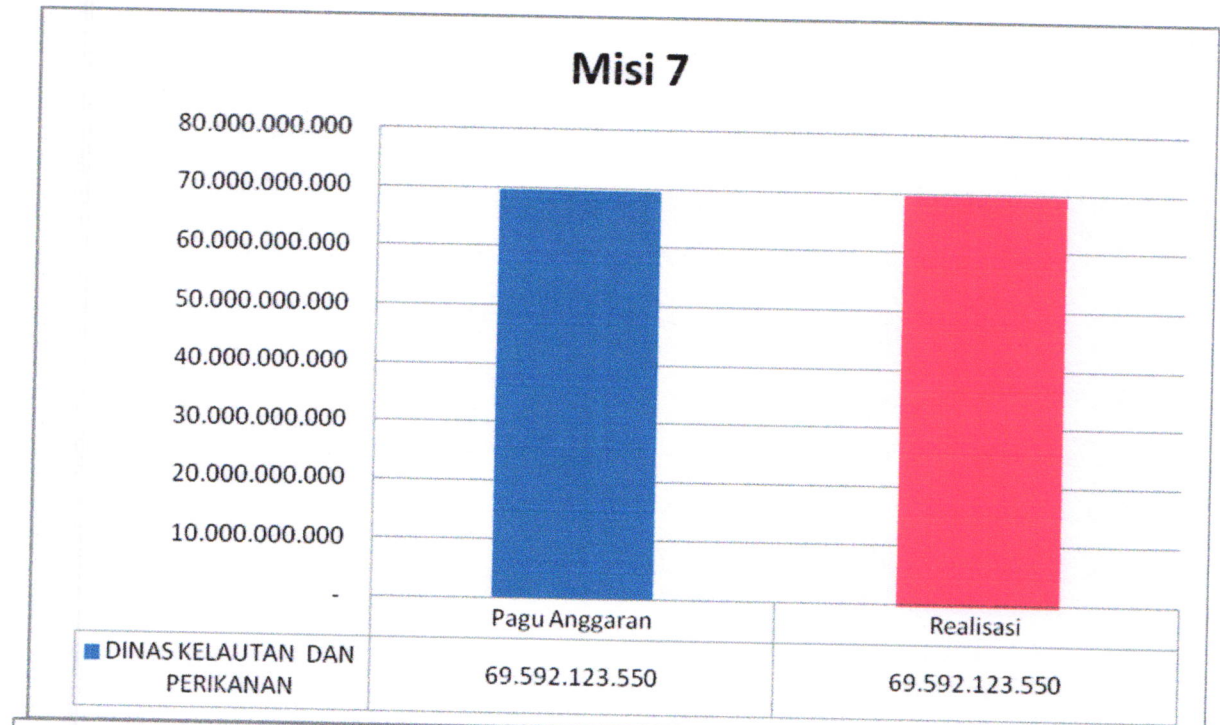
Misi 2



Misi 3







2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Keadaan Triwulan II Tahun 2018

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2017, maka Bappeda Provinsi NTT telah melakukan sosialisasi Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD, Renja dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, baik melalui pelatihan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya maupun dengan penjelasan cara pengisian Format Evaluasi menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, pada Surat yang dikirimkan oleh Bappeda kepada seluruh perangkat daerah.

Laporan pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja perangkat daerah ini dikompilasi kedalam laporan hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017 untuk keadaan triwulan II yang dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Capaian Realisasi Belanja Langsung APBD
berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2013-2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
MISI 1 : Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang berdaya saing				
1	Dinas Pendidikan	454,199,659,000	72,008,578,742	15.85
2	Dinas Kepemudaan & Olahraga	16,698,844,000	3,002,482,203	17.98
3	Dinas Kebudayaan	7,520,636,000	3,073,019,290	40.86
4	Dinas Perpustakaan	2,219,060,000	892,137,065	40.20
	JUMLAH MISI 1	480,638,199,000	78,976,217,300	16.43
MISI 2 : Meningkatkan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan yang dapat Dijangkau Seluruh Masyarakat				
1	Dinas Kesehatan	50,481,168,000	5,347,405,879	10.59
2	RSUD Prof. Dr. WZ. Johannes Kupang	157,560,240,000	33,197,835,993	21.07
	JUMLAH MISI 2	208,041,408,000	38,545,241,872	18.53
MISI 3 : Memberdayakan Ekonomi Rakyat dan Mengembangkan Ekonomi Kepariwisata dengan Mendorong Pelaku Ekonomi Untuk Mampu Memanfaatkan Keunggulan Potensi Lokal				
1	Dinas Pertanian	24,607,548,000	6,446,879,842	26.20
2	Dinas Pariwisata	15,238,440,000	4,359,078,328	28.61
3	Dinas Peternakan	18,994,935,000	4,669,748,300	24.58
4	Dinas Kehutanan	18,602,467,500	2,801,780,063	15.06
5	Dinas Perdagangan	3,392,322,200	1,855,034,823	54.68
6	Dinas Perindustrian	8,500,375,000	1,972,283,750	23.20
7	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7,105,405,200	2,557,957,551	36.00
8	Dinas Koperasi dan UKM	19,386,494,000	3,969,755,699	20.48
9	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,110,557,000	1,970,328,783	47.93
10	Biro Perekonomian	2,452,859,100	1,417,246,500	57.78
11	Dinas Ketahanan Pangan	7,122,970,000	2,106,555,509	29.57
	JUMLAH MISI 3	129,514,373,000	34,126,649,148	26.35
MISI 4 : Pembenanahan Sistem Hukum & Reformasi Birokrasi Daerah				

No	Uraian	Anggaran Rp.	Realisasi	
			Rp.	%
1	Biro Umum	67,513,821,000	23,703,219,295	35.11
2	Biro Hukum	1,978,877,000	976,672,000	49.35
3	Biro Organisasi	2,774,898,000	1,318,414,225	47.51
4	Biro Kesejahteraan Rakyat	3,793,489,000	1,169,436,000	30.83
5	Biro Pemerintahan	3,289,191,000	421,047,162	12.80
6	Biro Hubungan Masyarakat	3,682,722,000	1,189,553,879	32.30
7	Biro peng. Barang & Jasa	3,031,904,000	1,342,299,900	44.27
8	Biro Kerjasama	1,427,283,000	776,137,957	54.38
9	Sekretariat DPRD	64,672,155,000	23,630,963,100	36.54
10	Inspektorat	8,765,699,000	3,911,843,856	44.63
11	BAPPPEDA	12,209,834,000	2,895,773,942	23.72
12	BPPKAD	74,211,614,000	27,310,849,524	36.80
13	Badan Kepegawaian Daerah	10,811,367,000	5,611,314,107	51.90
14	Badan Pengembangan SDM Daerah	24,540,053,000	7,122,122,989	29.02
15	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2,416,640,000	1,270,773,700	52.58
16	Badan Penghubung Prov.NTT di Jakarta	3,192,777,000	1,431,873,490	44.85
17	Dinas Komunikasi & Informatika	3,317,191,000	998,185,091	30.09
18	Dinas Kearsipan	1,824,729,000	1,491,856,352	81.76
19	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	3,393,242,000	1,889,611,526	55.69
20	Sekretariat DP KORPRI	1,723,543,000	593,279,693	34.42
21	Satuan Polisi Pamong Praja	3,777,793,000	1,445,271,484	38.26
JUMLAH MISI 4		302,348,822,000	110,500,499,272	36.55
MISI 5 : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup				
1	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	264,202,667,000	90,961,622,969	34.43
2	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	116,572,080,000	16,315,507,514	14.00
3	BAPPPEDA	1,078,475,000	281,340,620	26.09
4	Dinas Perhubungan	12,185,507,000	4,306,591,882	35.34
5	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	3,318,749,000	1,181,673,867	35.61
6	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	58,401,918,000	3,392,528,250	5.81
7	Dinas Kehutanan	13,637,492,000	831,841,320	6.10
JUMLAH MISI 5		469,396,888,000	117,271,106,422	24.98
MISI 6 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan dan Kesejahteraan Anak				
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1,702,847,000	619,394,235	36.37
JUMLAH MISI 6		1,702,847,000	619,394,235	36.37
MISI 7 : Mempercepat Pembangunan Kelautan Dan Perikanan				
1	Dinas Kelautan Dan Perikanan	38,271,562,000	18,650,101,784	48.73
JUMLAH MISI 7		38,271,562,000	18,650,101,784	48.73
MISI 8 : Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, Bencana dan Pengembangan Kawasan Perbatasan				
1	Dinas Sosial	18,975,111,000	8,662,614,924	45.65
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	5,518,458,000	2,334,445,998	42.30
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,938,045,000	1,953,547,642	39.56

No	Uraian	Anggaran Rp.	Realisasi	
			Rp.	%
4	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2,049,829,000	1,339,187,700	65.33
	JUMLAH MISI 8	31,481,443,000	14,289,796,264	45.39
	JUMLAH TOTAL (MISI 1+2+3+4+5+6+7+8)	1,661,395,542,000	412,979,006,297	24.86

Sumber : Laporan RFK Perangkat Daerah Bulan Juni 2018

4

BAB III

KERANGAK EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Penyesuaian Terhadap Kerangka Ekonomi Makro Daerah

3.1.1 Perubahan Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu Negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah factor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang menggambarkan keadaan perekonomian penduduk suatu wilayah/daerah. Ukuran yang dihasilkan dari penghitungan PDRB antara lain adalah rata-rata pendapatan perkapita, struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Dari Lapangan Usaha yang ada. Berdasarkan harga berlaku, PDRB NTT mengalami kecenderungan naik dari tahun 2015, Rp. 76.190 milyar menjadi Rp. 84.172 milyar pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 yakni Rp 91.160 milyarMelihat dinamika pembangunan yang berkembang, dimana sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi disemua lapangan usaha utama di Nusa Tenggara Timur. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur atas dasar harga berlaku Triwulan I Tahun 2017 mencapai Rp.21.013 Milyar dan pada Triwulan I Tahun 2018 naik menjadi Rp. 23.073 Milyar. Rincian PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut lapangan usaha selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. dibawah ini:

Tabel 3.1.
PDRB Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha, (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry	2015	2016	2017	Triw I 2017	Triw I 2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22.765	24.315	26.184	6.230	6.661
Pertambangan dan Penggalian	1.073	1.166	1.186	281	288
Industri Pengolahan	940	1.034	1.147	262	299
Pengadaan Listrik dan Gas	43	59	66	15	17
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	47	48	50	12	13
Konstruksi	7.908	9.095	9.787	2.182	2.412
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.272	9.321	10.072	2.333	2.577
Transportasi dan Pergudangan	3.986	4.528	4.943	1.122	1.240
Penyediaan Akom odasi dan Makan Minum	487	586	676	146	177

Lapangan Usaha/Industry	2015	2016	2017	Triw I 2017	Triw I 2018
Inform asi dan Komunikasi	5.477	5.878	6.195	1.491	1.549
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.995	3.362	3.726	877	980
Real Estat	2.054	2.209	2.348	551	596
Jasa Perusahaan	235	257	279	65	70
Administrasi Pem erintahan, Pertahanan dan Jam inan Sosial Wajib	9.374	10.664	11.697	2.491	2.971
Jasa Pendidikan	7.303	8.103	8.917	2.051	2.209
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.585	1.767	1.941	449	507
Jasa lainnya	1.639	1.771	1.945	455	506
Produk Domestik Regional Bruto	76 190	84 172	91.160	21.013	23.073

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018*

Selanjutnya, Berdasarkan Atas dasar harga Konstan, PDRB NTT mengalami kecenderungan naik dari tahun 2015, Rp. 56.831 M menjadi Rp. 59.775 M pada tahun 2016 dan Kenaikan pada tahun 2017 yakni Rp. 62.788 M . Sedangkan untuk Triwulan I Tahun 2017 Nusa Tenggara Timur mencatatkan angka PDRB atas dasar harga konstan senilai Rp.14.741 dan pada Triwulan I Tahun 2018 mencapai Rp.15.505 Milyar atau naik Rp.764 Milyar. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.2. dibawah ini:

Tabel 3.2.
PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha, (Milyar Rupiah)

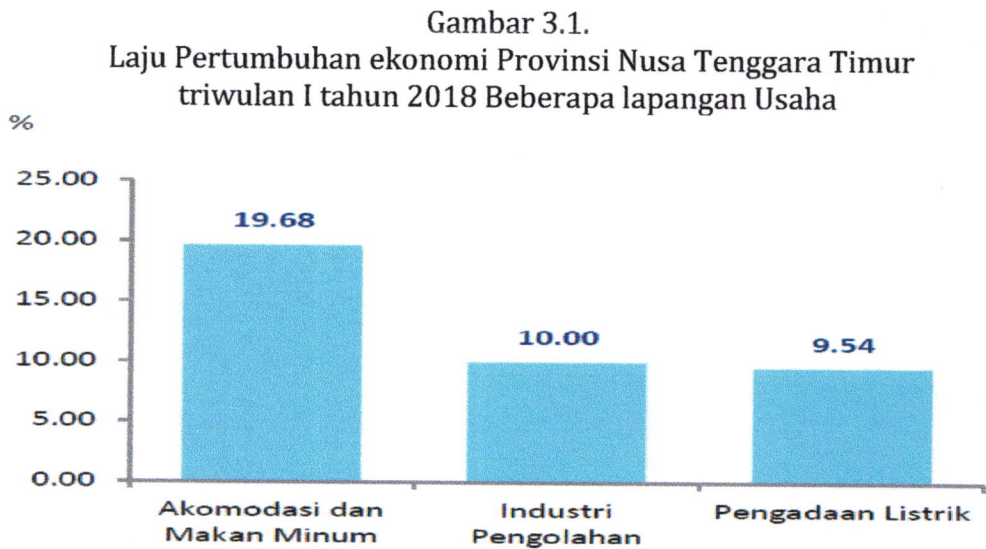
Lapangan Usaha/Industry	2015	2016	2017	Triw I 2017	Triw I 2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.144	16. 504	17.311	4.153	4.254
Pertambangan dan Penggalian	832	880	898	212	217
Industri Pengolahan	709	745	800	185	204
Pengadaan Listrik dan Gas	40	46	47	11	12
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	39	40	41	10	10
Konstruksi	6. 032	6 .543	6.867	1.549	1.660
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6. 493	6. 933	7.241	1.692	1.822
Transportasi dan Pergudangan	2. 844	3. 036	3.269	752	819
Penyediaan Akom odasi dan Makan Minum	337	386	439	95	114
Inform asi dan Komunikasi	4. 923	5. 256	5.524	1.319	1.381
Jasa Keuangan dan Asuransi	2. 176	2. 361	2.498	600	638
Real Estat	1. 456	1. 506	1.581	374	396
Jasa Perusahaan	164	169	172	41	41
Administrasi Pem erintahan, Pertahanan dan Jam inan	7. 248	7. 656	7.883	1.806	1.932

Lapangan Usaha/Industry	2015	2016	2017	Triw I 2017	Triw I 2018
Sosial Wajib					
Jasa Pendidikan	4.956	5.163	5.486	1.301	1.309
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.212	1.287	1.382	324	352
Jasa lainnya	1.215	1.258	1.347	316	346
Produk Domestik Regional Bruto	56.831	59.775	62.788	14.741	15.505

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018*

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi NTT triwulan I-2018 dibandingkan dengan triwulan I-2017 tumbuh sebesar 5,19 persen. Pertumbuhan ekonomi positif terjadi pada seluruh kategori lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 19,68 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 10,00 persen dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,54 persen. Rincian perbandingan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur triwulan I Tahun 2018 dan dapat dilihat pada Gambar 3.1. dibawah ini:



Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi NTT*

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 berkisar antara 5%-5,18%. Pada Tahun 2013 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,42% yang menjadi 5,04% pada tahun 2014 dan menjadi 5,02% pada Tahun 2015 lalu menjadi 5,18 % pada tahun 2016 5,18 % dan mengalami penurunan pada tahun 2017 yakni 5,16 %. Rincian pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tahun 2012 hingga tahun 2016 selengkapnya, dapat dilihat pada tabel 3.3. dibawah ini.

4

Tabel 3.3.
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen),
Tahun 2012–Triwulan I 2017

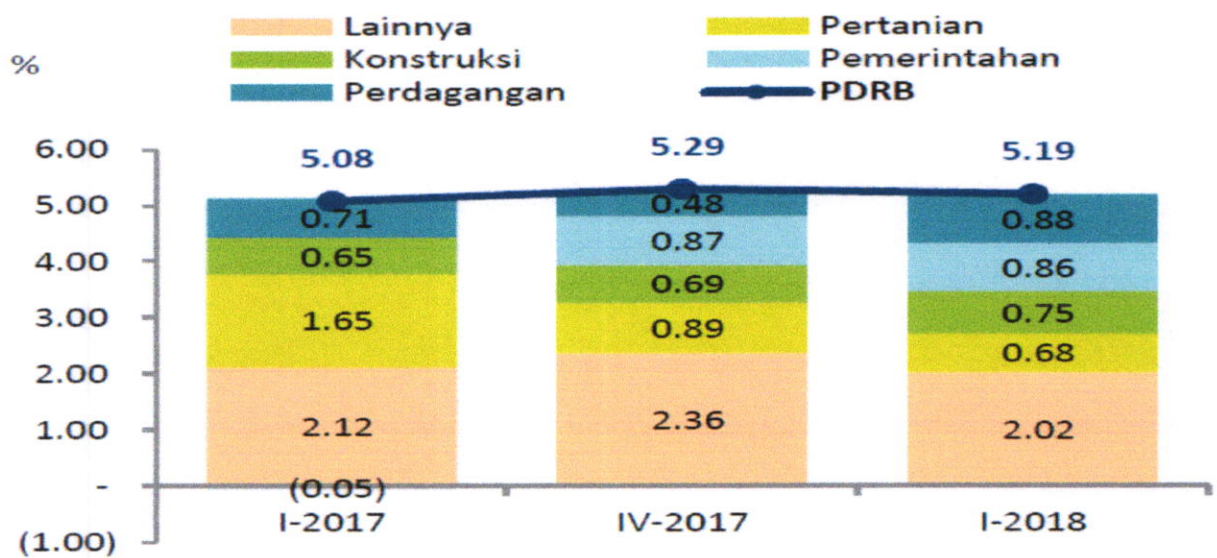
Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	Triw I-2018 terhadap Triw I- 2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,72	3,59	2,93	2,23	4,88	2,42
Pertambangan dan Penggalian	5,03	5,40	6,42	5,66	2,07	2,57
Industri Pengolahan	4,86	3,37	5,23	4,98	7,36	10,00
Pengadaan Listrik dan Gas	7,59	14,29	10,19	14,61	0,70	9,54
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,66	4,82	2,07	0,38	1,43	8,71
Konstruksi	5,24	5,20	5,22	8,46	6,12	7,14
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,46	5,08	6,09	6,77	4,45	7,69
Transportasi dan Pergudangan	5,55	6,55	5,49	6,73	7,66	8,89
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,34	6,25	6,17	14,46	13,59	19,68
Informasi dan Komunikasi	6,11	7,65	7,14	6,76	5,10	4,64
Jasa Keuangan dan Asuransi	12,11	6,44	5,76	8,47	5,81	6,20
Real Estat	5,47	1,43	3,85	3,41	4,96	5,76
Jasa Perusahaan	5,12	4,90	4,61	2,83	1,43	1,63
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,33	5,93	7,09	5,63	2,96	6,99
Jasa Pendidikan	6,49	6,23	4,85	4,18	6,24	0,56
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,99	3,67	5,52	6,19	7,36	8,73
Jasa Lainnya	3,84	4,38	3,27	3,55	6,99	9,31
PDRB	5,42	5,04	5,02	5,18	5,16	5,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih mendominasi perekonomian NTT pada triwulan I-2018 dengan kontribusi sebesar 28,87 persen. Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 12,88 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 11,17 persen.

Bila dilihat dari penciptaan pertumbuhan ekonomi NTT triwulan I-2018, maka lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu sebesar 0,88 persen. Kemudian disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan lapangan usaha Konstruksi masing-masing sebesar 0,86 persen dan 0,75 persen. sebagaimana terlihat pada Gambar 3.2. dibawah ini:

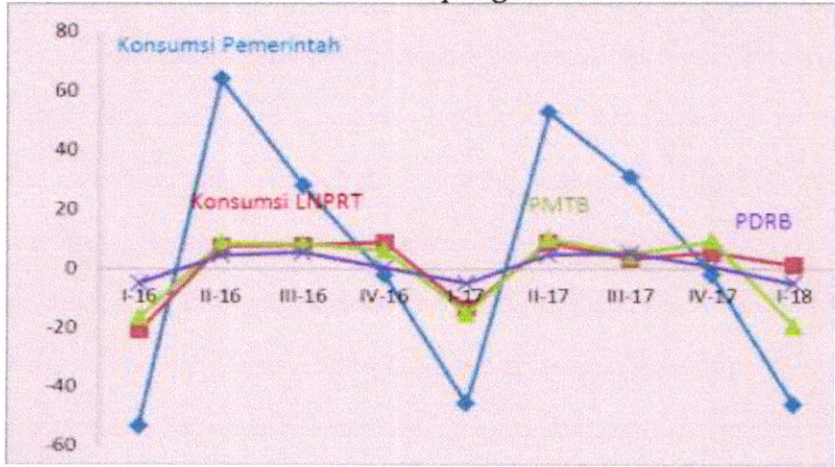
Gambar 3.2.
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan I Tahun 2018



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018

Ekonomi NTT triwulan I 2018 terhadap triwulan IV 2017 (*q-to-q*) bertumbuh sebesar -5,11 persen. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan negatif yang terjadi di hampir seluruh komponen pengeluaran, kecuali Pengeluaran Konsumsi LNPRT. Komponen yang mengalami pertumbuhan terkecil adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan dan Pembentukan Modal Tetap Bruto masing-masing sebesar -46,38 persen dan - 34,85 persen, sebagaimana terlihat pada Gambar 3.3 dibawah ini:

Gambar 3.3.
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan I Tahun 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur

C. PDRB Perkapita

Untuk mengetahui gambaran kasar tingkat kemakmuran di masing-masing Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur, maka Berdasarkan angka-angka PDRB perkapita di setiap Kabupaten/Kota di NusaTenggara Timur seperti yang disajikan pada Tabel 6. tampak bahwa tingkat kemakmuran di wilayah ini masih cukup bervariasi. Pada kurun 2014-2016 ada wilayah yang memiliki PDRB perkapita lebih dari 16 juta rupiah tetapi masih ada Kabupaten lain yang PDRB perkapitanya berada di bawah 10 juta rupiah.

PDRB perkapita di Kota Kupang merupakan yang tertinggi pada tahun 2016, yaitu sekitar 46,96 juta rupiah. Angka PDRB perkapita yang dicapai Kota Kupang ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun yang sama dengan pencapaian sebesar 16,18 juta rupiah. Selain Kota Kupang masih terdapat tujuh Kabupaten lain yang PDRB perkapitanya melampaui PDRB perkapita Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016, secara berturut-turut yaitu Kabupaten Sumba Timur (19,95 juta rupiah), Kabupaten Ende (18,40 juta rupiah), Kabupaten Ngada (18,02 juta rupiah), Kabupaten Flores Timur (16,86 juta rupiah), Kabupaten Kupang (16,76 juta rupiah), Kabupaten Belu (16,43 juta rupiah). Sementara itu PDRB perkapita di Kabupaten Manggarai Timur merupakan yang paling rendah pada tahun 2016, yaitu sebesar 9,01 juta rupiah. Kabupaten lain yang PDRB perkapitanya dibawah 10 juta rupiah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya (9,19 juta rupiah).

Tabel 3.4
 Produk domestik regional bruto perkapita atas dasar harga berlaku
 Menurut kabupaten/kota di nusa tenggara timur tahun 2012-2016
 (Rupiah)

KABUPATEN	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Sumba Barat	10 063 659,81	11 153 462,77	12 244 080,28	13 473 850,94	14 761 399,46
02. Sumba Timur	13 605 691,51	15 122 894,92	16 657 798,98	18 307 246,22	19 953 498,91
03. Kupang	12 313 731,41	13 399 122,22	14 511 301,37	15 685 345,25	16 761 607,12
04. Timor Tengah Selatan	8 883 721,26	9 864 642,78	10 914 692,10	12 097 514,61	13 416 063,78
05. Timor Tengah Utara	9 493 334,45	10 260 547,04	11 163 349,28	12 154 866,89	13 380 781,86
06. Belu	11 334 567,55	12 416 677,01	13 633 555,24	14 917 511,59	16 433 093,41
07. Alor	8 287 027,55	9 103 255,84	10 036 064,08	11 013 487,07	12 025 936,07
08. Lembata	7 846 536,37	8 526 708,65	9 309 592,54	10 103 286,65	10 930 709,46
09. Flores Timur	12 025 913,41	13 190 887,76	14 258 471,38	15 431 953,51	16 864 702,24
10. Sikka	8 844 076,78	9 654 755,69	10 580 245,58	11 501 203,28	12 535 985,34
11. Ende	12 486 630,41	13 883 622,32	15 324 186,51	16 781 537,97	18 398 962,12
12. Ngada	12 347 631,76	13 634 977,83	14 970 619,91	16 366 648,24	18 012 680,83
13. Manggarai	7 863 707,44	8 675 631,75	9 481 167,63	10 327 448,21	11 308 070,41
14. Rote Ndao	11 519 832,10	12 287 387,44	13 302 039,35	14 357 713,72	15 467 283,87
15. Manggarai Barat	7 659 731,48	8 226 339,34	8 941 052,33	9 605 812,50	10 292 185,46
16. Sumba Tengah	9 385 324,42	10 244 932,12	11 133 712,41	12 098 714,38	13 173 936,30
17. Sumba Barat Daya	6 430 118,93	7 096 118,89	7 737 758,92	8 436 562,10	9 190 347,20
18. Nagekeo	8 648 561,48	9 671 912,35	10 622 040,50	11 645 195,14	12 552 390,83
19. Manggarai Timur	6 300 066,18	6 921 673,81	7 593 960,47	8 272 676,68	9 012 349,84
20. Sabu Raijua	8 848 424,06	9 642 438,15	10 420 266,80	11 267 112,04	12 273 876,56
21. Malaka	8 405 613,53	9 190 584,64	10 085 648,89	10 929 099,97	11 871 271,11
22. Kota Kupang	32 396 578,89	35 466 108,17	38 979 344,79	42 790 316,00	46 962 778,26
NUSA TENGGARA TIMUR	11 268 853,92	12 379 019,72	13 599 728,93	14 880 848,97	16 176 114,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Tabel 3.5
PDRB Per kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2012-2016

	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,39	3,69	4,06	4,45	4,67
B	Pertambangan dan Penggalian	0,16	0,18	0,20	0,21	0,22
C	Industri Pengolahan	0,14	0,15	0,17	0,18	0,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,005	0,005	0,007	0,009	0,011
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	1,17	1,28	1,41	1,54	1,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,22	1,33	1,45	1,62	1,79
H	Transportasi dan Pergudangan	0,57	0,65	0,71	0,78	0,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11
J	Informasi dan Komunikasi	0,91	0,94	1,02	1,07	1,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,41	0,48	0,54	0,59	0,65
L	Real Estate	0,31	0,34	0,37	0,40	0,42
M,N	Jasa Perusahaan	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05
O	Administrasi/Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,38	1,53	1,67	1,83	2,05
P	Jasa Pendidikan	1,01	1,15	1,30	1,43	1,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,24	0,26	0,28	0,31	0,34
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,25	0,27	0,30	0,32	0,34
Produk Domestik Regional Bruto		11,27	12,38	12,60	14,88	16,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

D. Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

Nusa Tenggara Timur pada Juni 2018 mengalami inflasi sebesar 0,73 persen setelah bulan sebelumnya, Mei 2018, mengalami Inflasi sebesar 0,68 persen. Dengan kata lain terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 131,96 pada Bulan Mei 2018 menjadi 132,93 pada Bulan Juni 2018. Inflasi ini terjadi disebabkan oleh naiknya indeks harga pada seluruh kelompok pengeluaran selain kelompok bahan makanan yang mengalami penurunan indeks harga.

Laju inflasi Tahun kalender pada posisi bulan Juni ini sebesar 1,72 persen, sedangkan laju inflasi year on year (Juni 2018 terhadap Juni 2017) Nusa Tenggara Timur sebesar 2,89 persen.

Tabel 3.6.
Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Provinsi NTT
Juni 2017, Tahun Kalender 2017 dan *Year on Year*
Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)

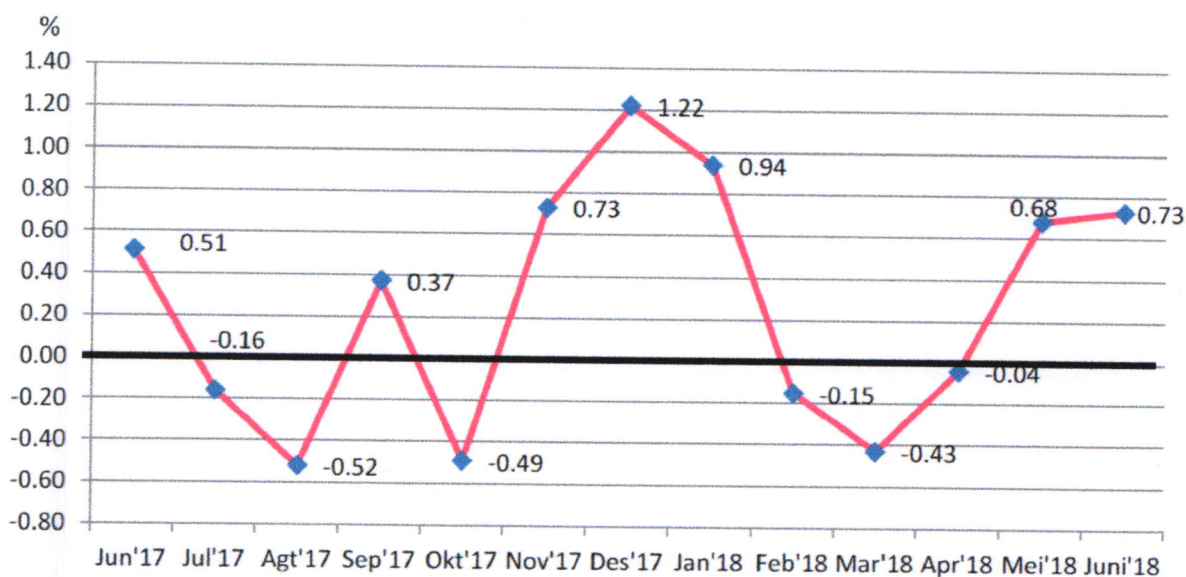
Kelompok Pengeluaran	IHK			Inflasi Juni 2018*	Laju Inflasi Tahun Kalender**)	Laju Inflasi YOY***)
	Des 2017	Mei 2018	Juni 2018			
Umum	130.68	131.96	132.93	0.73	1.72	2.89
Bahan Makanan	123.63	129.18	128.95	-0.18	4.30	6.70
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	148.87	151.99	152.31	0.21	2.31	3.82
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	128.50	128.87	128.92	0.04	0.33	1.86
Sandang	129.66	130.11	130.24	0.10	0.44	2.17
Kesehatan	117.70	118.52	118.61	0.07	0.77	1.93
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	132.66	133.04	133.07	0.02	0.31	4.51
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	134.68	130.56	136.06	4.22	1.02	-1.55

*) Persentase Perubahan IHK bulan Juni 2018 terhadap IHK bulan sebelumnya
 **) Persentase perubahan IHK bulan Juni 2018 terhadap IHK bulan Desember 2017
 ***) Persentase perubahan IHK bulan Juni 2018 terhadap IHK bulan Juni 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur

Inflasi yang terjadi pada Juni 2018 ini searah dengan yang terjadi di Juni 2017 yang lalu yang juga mengalami inflasi, jika di Juni 2017 terjadi inflasi sebesar 0,51 persen, maka Juni 2018 terjadi inflasi sebesar 0,73 persen, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.4. dibawah ini.

Gambar 3.4.
Perkembangan Inflasi Nusa Tenggara Timur
Juni 2017 – Juni 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 2018

Menurut kelompok pengeluaran, pemberi andil terbesar dalam pembentukan inflasi di Nusa Tenggara Timur bulan Juni 2018 adalah kelompok transpor dengan andil sebesar 0,72 persen diikuti oleh kelompok makanan jadi sebesar 0,03 persen, dan kelompok perumahan

sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok bahan makanan memberikan andil negatif terhadap inflasi sebesar 0.04 persen, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini

Tabel 3.7
Indeks Harga Konsumen, Inflasi dan Andil Inflasi NTT Juni 2018

Kelompok Pengeluaran	Juni 2018	
	Perubahan (%)	andil (%)
(1)	(2)	(3)
Umum	0.73	0.73
Bahan Makanan	-0.18	(0.04)
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0.21	0.03
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0.04	0.01
Sandang	0.10	0.00
Kesehatan	0.07	0.00
Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	0.02	0.00
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	4.22	0.72

Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 2018

3.3.2. Lain-Lain Asumsi

3.3.2.1. Ketenagakerjaan

A. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran

Informasi ketenagakerjaan menunjukkan berapa besar jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah penganggur atau pencari kerja. Keterlibatan penduduk dalam angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2018 meningkat 0,18 poin yaitu dari 72,82 persen pada Februari 2017 menjadi 73,00 persen pada Februari 2018. Secara nasional TPAK Indonesia pada Februari 2018 mencapai 69,20 persen, lebih rendah dibanding TPAK NTT. TPAK laki-laki sebesar 82,46 persen lebih tinggi dibanding perempuan 63,94 persen. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah sedangkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Penduduk yang bekerja di NTT pada Februari 2018 mencapai 2,48 juta orang, bertambah 60,1 ribu orang dibanding keadaan pada Februari 2017 sebesar 2,42 juta orang.

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT Februari 2018 sebesar 2,98 persen dari total angkatan kerja. Angka ini lebih rendah 0,23 poin dibanding Februari 2017 sebesar 3,21 persen. Secara nasional TPT Indonesia pada Februari 2018 mencapai 5,13 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT NTT.

Tabel 3.8

Penduduk Nusa Tenggara Timur Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Agustus 2016-Februari 2018

Jenis Kegiatan Utama	2016	2017		2018
	Agustus	Februari	Agustus	Februari
1. Angkatan Kerja	2.353.648	2.503.057	2.398.609	2.559.204
Bekerja	2.277.068	2.422.809	2.320.061	2.482.878
Penganggur	76.580	80.248	78.548	76.326
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,18	72,82	69,09	73,00
Laki-laki	79,68	82,47	80,00	82,46
Perempuan	59,15	63,60	58,65	63,94
3. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,25	3,21	3,27	2,98
Perkotaan	5,56	4,61	8,66	5,42
Perdesaan	2,62	2,83	1,93	2,30

Sumber: badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 2018

B. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama menjadi salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Distribusi penduduk yang bekerja berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) 2015 pada Februari 2018 relatif sama dengan Februari 2017 dimana sebagian besar penduduk menekuni kategori A Pertanian sebesar 1,46 juta orang (58,63 persen), diikuti kategori E Perdagangansebesar 0,24 juta orang (9,54 persen), kategori C Industri sebesar 0,16 juta orang (6,46 persen), kategori O Administrasi Pemerintahan sebesar 0,14 juta orang (5,52 persen) dan kategori P Jasa Pendidikan sebesar 0,14 juta (5,45 persen). Sebaliknya kategori yang paling sedikit menampung pekerja adalah gabungan kategori Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estat; dan Jasa Perusahaan (J,K,L,M,N) sebesar 35,0 ribu orang (1,41 persen) dan gabungan kategori Pertambangan dan Pengadaan Listrik, Gas, dan Air (B,D,E) sebesar 36,3 ribu orang (1,46 persen).

Sektor yang paling banyak mengalami peningkatan adalah Kategori O Administrasi Pemerintahan sebesar 0,44 persen dari 123,1 ribu orang pada Februari 2017 menjadi 137,0 ribu orang pada Februari 2018. Kategori lainnya yang mengalami peningkatan jumlah orang bekerja terbesar antara lain kategori C Industri, kategori R,S,T,U Jasa Lainnya dan kategori Q Jasa Kesehatan. Sedangkan kategori yang mengalami penurunan terbesar adalah kategori A Pertanian sebesar 0,93 persen, dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah:

Tabel 3.9
Penduduk NTT Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Februari 2017-Agustus 2018 (Jiwa)

Kategori	2017		2018
	Februar	Agustus	Februari
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.443.116	1.271.534	1.455.828
B,D,E Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik, Gas, Dan Air	32.837	33.559	36.311
C Industri Pengolahan	149.953	208.484	160.353
F Konstruksi	80.207	97.965	82.637
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	227.555	227.357	236.782
H,I Transportasi dan Akomodasi	125.793	117.414	119.721
J,K,L,M,N Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan;	42.167	39.791	35.039
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	123.064	116.034	136.998
P Jasa Pendidikan	128.925	131.401	135.209
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36.593	32.189	43.785
R,S,T,U Jasa Lainnya	32.599	44.333	40.215

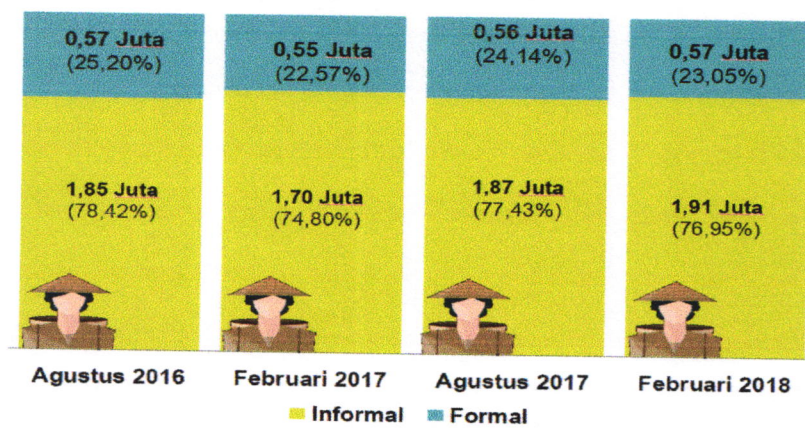
Sumber: badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 2018

C. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Bila dilihat menurut status pekerja, penduduk bekerja dapat dikelompokkan menjadi penduduk bekerja di sektor formal dan penduduk bekerja di sektor informal. Dari data terlihat indikasi belum adanya perubahan signifikan pada status pekerja dibandingkan dengan periode sebelumnya Februari 2017 dimana status formal di NTT hanya sebesar 23,05 persen, dan pekerja informal NTT sebesar 76,95 persen.

Pekerja informal disebabkan tingginya pekerja dengan status Pekerja Keluarga/Tak Dibayar yang menempati proporsi terbesar yaitu sebesar 30,78 persen, diikuti Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar sebesar 28,83 persen. Rendahnya pekerja formal disebabkan Pekerja dengan status Berusaha Dibantu Buruh Tetap yang merupakan porsi terendah yaitu 1,60 persen dan Buruh/Karyawan/Pegawai yang sebesar 21,45 persen. Secara keseluruhan sektor informal masih menjadi andalan bagi mayoritas pekerja di NTT. Masih besarnya persentase penduduk yang bekerja di sektor informal menunjukkan bahwa penduduk NTT yang bekerja belum memiliki jaminan sosial yang baik. Umumnya jenis pekerjaan di sektor informal tidak membutuhkan persyaratan pendidikan dan keterampilan yang khusus, karenanya hampir semua orang bisa masuk ke dalam sektor ini jika ada kemauan dan sedikit modal. Hal ini berbeda dengan sektor formal yang membutuhkan pendidikan dan keterampilan khusus, sehingga hanya mereka yang memiliki pendidikan dan keterampilan tertentu yang bisa masuk ke sektor formal, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.5 :

Gambar 3.5
Pekerja Sektor Formal dan Informal NTT
pada Agustus 2016 – Februari 2018



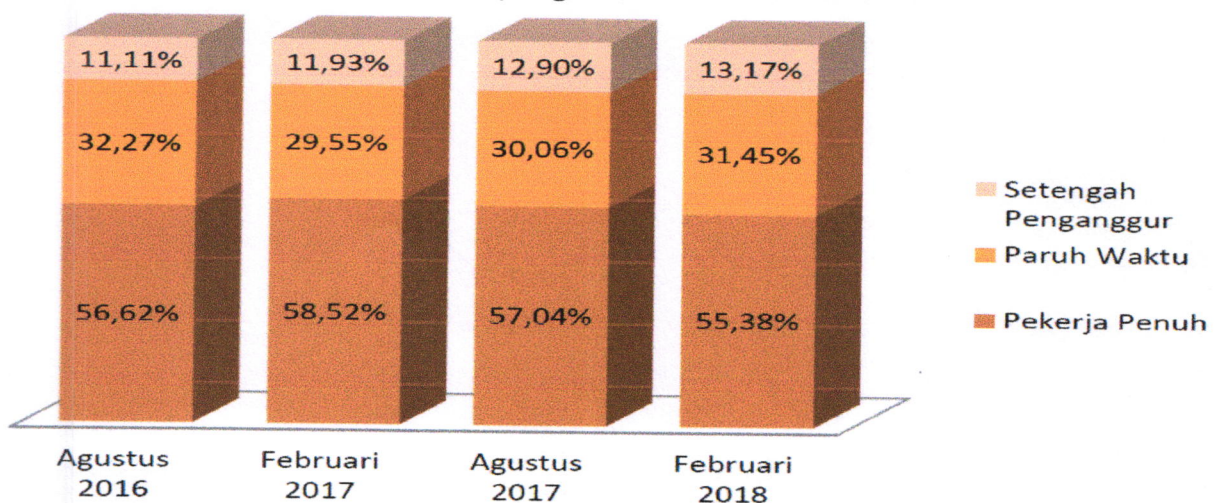
Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 2018

D. Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja

Dua penyebab utama dari rendahnya pemanfaatan tenaga kerja yaitu tingkat pengangguran terbuka dan tingkat pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Semakin tinggi tingkat pekerja tidak penuh maka semakin rendah tingkat utilisasi pekerja dan produktivitasnya. Pekerja tidak penuh terbagi atas pekerja paruh waktu (*freelance*) dan setengah penganggur. Tingginya setengah penganggur merupakan permasalahan ketenagakerjaan tersendiri karena bekerja dibawah kapasitas optimalnya.

Dari 2,48 juta orang yang bekerja pada Februari 2018 terdapat 44,62 persen pekerja tidak penuh, naik 3,14 persen dibanding Februari 2017 yang sebesar 41,48 persen. Pekerja tidak penuh NTT terdiri dari 327,1 ribu orang (29,53 persen) setengah penganggur dan 780,7 ribu orang (70,47 persen) pekerja paruh waktu.

Gambar3.6
Penduduk NTT Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut
Jumlah Jam Kerja Agustus 2016-Februari 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 2018

E. Penduduk yang Bekerja dan Menganggur Menurut Pendidikan

Secara umum, tingkat pendidikan tenaga kerja dapat mencerminkan kualitas tenaga kerja. Pengetahuan tentang karakteristik dan kualitas tenaga kerja berguna sebagai dasar pengembangan kebijakan ketenagakerjaan, terutama pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas SDM yang akan dapat meminimalkan jumlah pengangguran.

Dari 2,48 juta orang yang bekerja pada Februari 2018, sebagian besar bekerja dengan pendidikan kurang dari atau sama dengan SD yaitu sebesar 55,98 persen. Selain itu komposisi pendidikan dari penduduk bekerja yaitu SMP (13,07 persen), SMA Umum (14,60 persen), SMA Kejuruan (5,46 persen), Diploma I/II/III (2,87 persen) dan Universitas (8,01 persen). Dilihat menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, TPT terendah adalah yang berpendidikan SMP sebesar 0,91 persen dan kurang dari atau sama dengan SD sebesar 1,05 persen. Sedangkan TPT tertinggi dengan pendidikan Diploma I/II/III sebesar 9,74 persen selanjutnya Universitas sebesar 7,58 persen.

Tabel 3.10
Penduduk NTT Usia 15 Tahun ke Atas yang
Bekerja dan Menganggur Menurut Pendidikan Tertinggi Yang ditamatkan
Februari 2015-Agustus 2016 (jiwa)

No	Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Jenis Kegiatan	Agustus 2016	Februai 2017	Agustus 2017	Februari 2018	TPT
1	<=SD	Bekerja	1.280.117	1.384.564	1.343.766	1.389.886	
		Pengangguran	13.401	24.355	14.985	14.774	1,05
		Angkatan Kerja	1.293.518	1.408.919	1.358.751	1.404.660	
2	SMP	Bekerja	293.554	311.585	308.646	324.521	
		Penggurangan	8.873	8.698	7.116	2.993	0,91
		Angkatan Kerja	302.427	320.283	315.762	327.514	
3	SMA Umum	Bekerja	319.907	362.138	319.502	362.607	
		Penggurangan	17.021	18.663	24.513	27.421	7,03
		Angkatan Kerja	336.928	380.801	344.015	390.028	
4	SMK Kejuruan	Bekerja	128.217	129.757	115.950	135.668	
		Penggurangan	14.134	5.874	10.611	7.122	4,99
		Angkatan Kerja	142.351	135.631	126.561	142.790	
5	Diploma I/II/III	Bekerja	62.632	61.141	52.125	71.309	
		Penggurangan	2.648	4.184	4.246	7.694	9,74
		Angkatan Kerja	65.280	65.325	56.371	79.003	
6	Universitas	Bekerja	192.641	173.624	180.072	198.887	
		Penggurangan	20.503	18.474	17.077	16.322	7,58
		Angkatan Kerja	213.144	192.098	197.149	215.209	

Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 2018

3.3.2.2. Kemiskinan

A. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2017-September 2018

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada bulan Maret 2018 sebesar 1.142,17 ribu orang (21,35 persen) naik sekitar 7.430 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2017 yang berjumlah 1.134,74 ribu orang (21,38 persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode September 2017 – Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan naik sebanyak 4.510 orang (dari 1.015,70 ribu orang menjadi 1.020,21 ribu orang) dan untuk perkotaan juga mengalami kenaikan sebanyak 2.910 orang (dari 119,04 ribu orang menjadi 121.95 ribu orang)

Tabel 3.11
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,
Maret 2017-Maret 2018

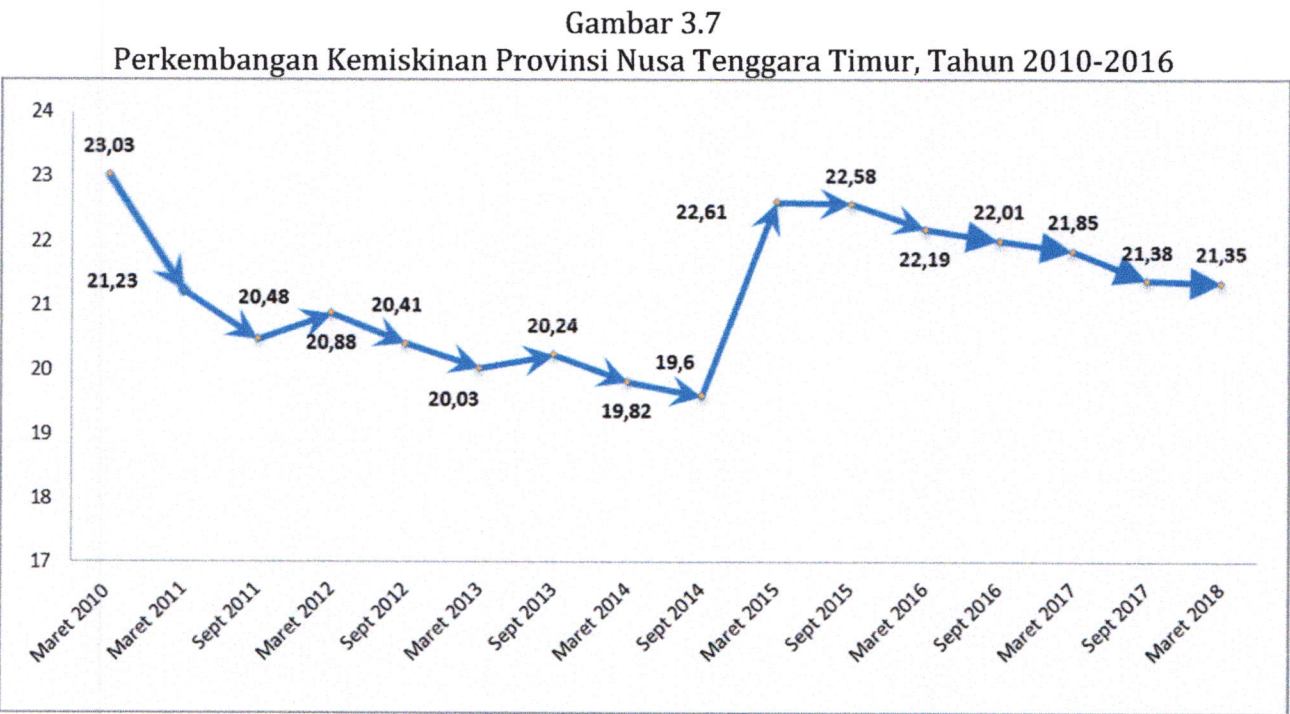
Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribuan)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2017	117,40	10,32
September 2017	119,04	10,11
Maret 2018	121,95	9,94
Perdesaan		
Maret 2017	1.033,39	25,03
September 2017	1.015,70	24,59
Maret 2018	1.020,21	24,74
Kota+Desa		
Maret 2017	1.150,79	21,85
September 2017	1.134,74	21,38
Maret 2018	1.142,17	21,35

Beberapa faktor terkait penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode September 201 7 – Maret 2018:

- a. Selama periode September 201 7 – Maret 2018 **inflasi umum sebesar 1,81 persen.**
- b. Tingkat **kesejahteraan petani cenderung meningkat** pada Bulan Maret 2018. Hal ini tercermin dari NTP Nusa Tenggara Timur bulan Maret 2018 sebesar 104,48 meningkat 1,48 poin jika dibandingkan periode September 2017, yang sebesar 103,00.
- c. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** di NTT pada Bulan Februari 2018 sebesar **2,98 persen.** Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, yakni sebesar 1,46 juta (58,63 persen).
- d. **Gini Ratio** Provinsi NTT pada Maret 2018 sebesar 0,351 , turun 0,008 poin dari periode September 2017 yang sebesar 0,359
- e. Pada periode November 2017 - Februari 2018, persentase rumah tangga penerima **raskin/rastra atau BPNT** sebesar 43,09 persen.

B. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2010-September 2017

Perkembangan tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur selama Tahun 2010 – Maret 2018 cenderung mengalami penurunan walaupun sempat naik pada periode Maret 2015 akan tetapi mulai bergerak turun secara perlahan sebagaimana terlihat pada Gambar 2.8. dibawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 2018

C. Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2017-Maret 2018

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Rincian perubahan Garis Kemiskinan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.16 dibawah ini:

Tabel 3.12
Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah,
Maret 2017-Maret 2018

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2017	290.711	116.262	406.973
September 2017	292.048	117.333	409.382
Maret 2018	299.104	119.421	418.525
Perubahan Sept'17-Mart'18 (%)	2,42	1,78	2,23
Perdesaan			
Maret 2017	268.004	58.316	326.320
September 2017	268.253	60.883	329.136
Maret 2018	273.466	63.119	336.584
Perubahan Sept'17-Mart'18 (%)	1,94	3,67	2,26
Kota+Desa			
Maret 2017	272.537	70.859	343.396
September 2017	273.325	73.412	346.737
Maret 2018	278.911	75.987	354.898
Perubahan Sept'17-Mart'18 (%)	2,04	3,51	2,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 2018

Periode September 2017– Maret 2018, Garis Kemiskinan (GK) naik sebesar 2,35 persen, yaitu dari Rp 346.737,- per kapita per bulan pada September 2017 menjadi Rp 354.898,- per kapita per bulan pada Maret 2018. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2017 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 78.83 persen, dan pada Maret 2018 sebesar 78.59 persen.

Pada Maret 2018, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama, seperti beras, rokok dan gula pasir. Sedangkan komoditi bukan makanan yang memberikan

sumbangan besar adalah perumahan, pendidikan, kayu bakar, perlengkapan mandi, bensin, listrik dan angkutan. Komoditi beras memberikan kontribusi terbesar baik di perkotaan maupun perdesaan dan disusul rokok kretek filter yang memiliki kontribusi terbesar kedua.

Tabel 3.13
Daftar Komoditi yang memberikan Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%) September 2017

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan			
Beras	31,24	Beras	41,29
Rokok kretek filter	8,77	Rokok kretek filter	5,33
Daging Babi	2,49	Gula pasir	3,48
Telur Ayam Ras	2,11	Daging Babi	3,38
Tongkol/tuna/cakalang	2,09	Jagung pipilan/beras jagung	3,02
Gula Pasir	2,08	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,80
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,99	Ketela pohon/singkong	1,97
Roti	1,69	Daun ketela pohon	1,73
Daging Ayam Ras	1,44	Daging ayam kampung	1,62
Bukan Makanan			
Perumahan	10,38	Perumahan	7,14
Perlengkapan mandi	2,56	Kayu Bakar	1,75
Pendidikan	2,12	Bensin	1,28
Angkutan	2,05	Pendidikan	1,28
Bensin	1,33	Perlengkapan Mandi	0,92
Kayu bakar	1,32	Listrik	0,80
Listrik	1,30	Angkutan	0,70
Minyak tanah	1,25	Sabun cuci	0,55
Air	0,90	Pakaian jadi anak-anak	0,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 2018

3.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan kebijakan pendapatan daerah bergantung dari kontribusi masing-masing komponen pendapatan terhadap total perubahan pendapatan daerah sehingga bisa menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan. Secara terperinci komponen-komponen pendapatan daerah yang mempengaruhi total perubahan pendapatan daerah dengan total pendapatan masing-masing. Proyeksi Perubahan Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut ini .

Tabel 3.15
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

URAIAN	APBD 2018	RP- APBD 2018	BERTAMBAH / (BERKURANG) dari APBD 2018	% dari APBD PERUBAHAN
PENDAPATAN	4.882.077.980.000	4.890.389.564.273	8.311.584.273	0,17
Pendapatan Asli Daerah	1.061.828.395.000	1.070.550.515.273	8.722.120.273	0,82
Pajak Daerah	822.886.747.000	827.886.747.000	5.000.000.000	0,61
Retribusi Daerah	24.488.354.000	27.495.019.000	3.006.665.000	12,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	72.250.000.000	72.965.455.273	715.455.273	0,99
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	142.203.294.000	142.203.294.000	-	-
Dana Perimbangan	3.799.586.456.000	3.799.175.920.000	(410.536.000)	(0,01)
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	86.834.315.000	86.423.779.000	(410.536.000)	(0,47)
Dana Alokasi Umum	1.827.412.640.000	1.827.412.640.000	-	-
Dana Alokasi Khusus	1.885.339.501.000	1.885.339.501.000	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	20.663.129.000	20.663.129.000	-	-
Hibah	20.663.129.000	20.663.129.000	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan	4.882.077.980.000	4.890.389.564.273	8.311.584.273	0,17

Sumber :Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diolah

Rencana perubahan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2018 sebesar Rp.1.070.550.515.273,- atau bertambah sebesar Rp.8.722.120.273,- dari Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 yaitu senilai Rp.1.061.828.395.000,-. Proyeksi dana perimbangan pada Perubahan Pendapatan Daerah sebesar Rp.3.799.175.920.000,- atau bertambah sebesar Rp.410.536.000,- dari Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 sebesar Rp.3.799.586.456.000,- , sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2017 senilai Rp.20.663.129.000,- dan tidak terdapat perubahan.

Rincian belanja langsung per program/kegiatan per PD sesuai struktur belanja termuat dalam lampiran . Di sisi lain, RKPD Perubahan ini juga sudah memuat rincian belanja langsung per program/kegiatan per PD yaitu program/kegiatan yang akan dilaksanakan jika ada kenaikan pendapatan, baik dari PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang termuat dalam lampiranI. Program/kegiatan dan anggaran yang terdapat dalam lampiran II tersebut pengalokasiannya tentu saja akan memperhatikan aturan yang berlaku, kewenangan, kewajaran, dan kepatutan dan standar harga barang dan jasa untuk tahun 2018.

Tabel 3.16

Target Perubahan Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018

URAIAN	APBD 2018	RP- APBD 2018	BERTAMBAH / (BERKURANG) dari APBD 2018	% dari APBD PERU BAHA N
BELANJA	4.968.984.219.000	5.199.329.301.977,0	202.112.896.658	4,07
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.307.588.677.000	3.416.942.681.625,0	110.829.429.892	3,35
Belanja Pegawai	1.317.581.828.000	1.317.837.523.817,0	255.695.817	0,02
Belanja Hibah	1.576.490.160.500	1.587.361.520.500,0	10.871.360.000	0,69
Belanja Bantuan Sosial	20.151.000.000	20.151.000.000,0	-	-
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	386.942.443.500	485.669.392.308,0	98.726.948.808	25,51
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.423.245.000	1.923.245.000,0	500.000.000	35,13
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	4.000.000.000,0	(1.000.000.000)	(20,00)
BELANJA LANGSUNG	1.661.395.542.000	1.782.386.620.352,0	120.991.078.352	5,49
Belanja Pegawai/Personalia	144.139.983.138	168.338.198.808,4	24.198.215.670	16,79
Belanja Barang dan Jasa	962.783.760.684	1.023.279.299.860,0	60.495.539.176	6,28
Belanja Modal	554.471.798.178	590.769.121.683,6	36.297.323.506	6,55
Jumlah Belanja	4.968.984.219.000	5.199.329.301.977,0	230.345.082.977	4,64
Surplus/Defisit	(86.906.239.000)	(308.939.737.704,0)	(222.033.498.704)	255,49
PEMBIAYAAN	86.906.239.000	280.333.064.165	193.426.825.165	222,57
Penerimaan Pembiayaan Daerah	80.150.000.000	273.576.825.165	193.426.825.165	241,33
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	-	-	-	-
Pencairan Dana Cadangan	6.756.239.000	6.756.239.000	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah /Investasi Daerah Non Permanen	86.906.239.000	280.333.064.165	193.426.825.165	222,57
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
Pinjaman Daerah	-	-	-	-

URAIAN	APBD 2018	RP- APBD 2018	BERTAMBAH / (BERKURANG) dari APBD 2018	% dari APBD PERU BAHA N
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	86.906.239.000	280.246.064.161	193.339.825.161	222,47
Pembiayaan Netto	-	-	-	-
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	86.906.239.000	280.333.064.165	193.426.825.165	222,57

Sumber :Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diolah

3.2.1 Perubahan Belanja Daerah

Berdasarkan tabel 3.16 dapat dilihat Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan belanja tak terduga) pada tahun 2018 sebesar Rp.3.307.588.677.000,- bertambah sebesar Rp.110.829.429.892,- atau naik 3,35% pada Proyeksi perubahan Belanja Tahun Anggaran 2018 atau senilai Rp.3.418.418.106.892,- Perubahan Belanja Langsung tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.1.752.679.008766,- mengalami kenaikan sebesar Rp.91.283.466.766-, atau 5,49 % dari Belanja Langsung Tahun 2017 yaitu sebesar 1.661.395.542.000,- Total Perubahan Belanja tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.5.171.097.115.658-, mengalami kenaikan sebesar Rp.202.112.896.658-, atau 4,07% dari jumlah belanja tahun 2018 sebesar Rp.4.968.984.219.000-, Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp.284.019.135.658-.,

3.2.2 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan tabel 3.16 dapat dilihat bahwa Perubahan rencana pembiayaan daerah tahun anggaran 2018 terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SiLPA). Perubahan Penerimaan pembiayaan tahun 2018 direncanakan sebesar Rp. 280.333.064.165,- bertambah sebesar Rp193.426.825.165,- atau 222,57% jika dibandingkan dengan pembiayaan tahun 2018 yaitu senilai Rp.86.906.239.000,-. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan padaPerubahan tahun 2018 senilai Rp. 87.000.004,- dimana sebelumnya tidak ada.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

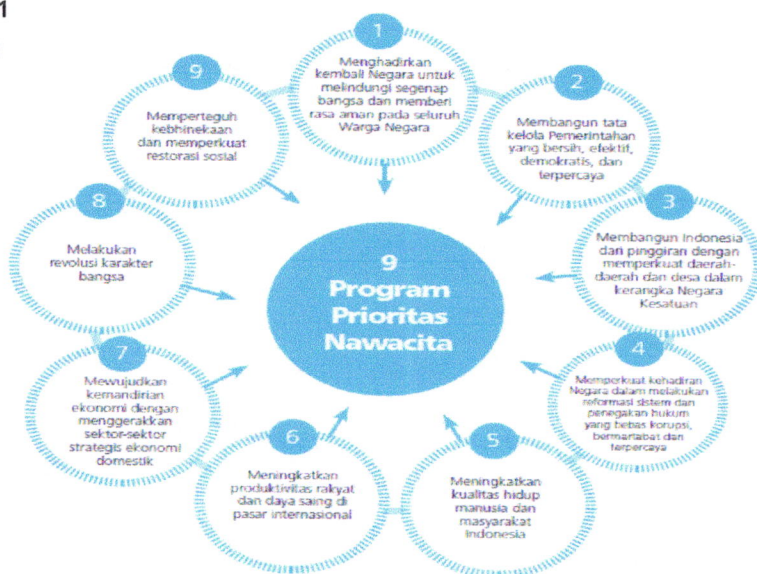
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Visi pembangunan nasional 2015 – 2019 sebagaimana termuat dalam RPJMN adalah **Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan melalui 7 (tujuh) misi, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan misi tersebut selanjutnya dikristalkan dalam 9 agenda pembangunan nasional (Nawacita), sebagaimana terlihat berikut :

Gambar 4.1
9 Program
Prioritas
Nawacita



Sembilan Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita) dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu

dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Tema Pembangunan Tahunan

Pembangunan tahunan yang dilakukan direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMN dan mengambil tema : **“Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”** . RKP 2018 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi 2017 dan mendorong pertumbuhan ekonomi 2018 dengan memperbaiki Kualitas Belanja, peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan daya saing dan nilai tambah industri, dan peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur sehingga sasaran dan prioritas nasional dapat tercapai.

Pembangunan tahun 2018 tetap dilakukan dengan dengan kebijakan *Money Follow Program* yang terus ditingkatkan kualitasnya, dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial. Sasaran makro yang harus dicapai pada tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Sasaran Makro RKP 2018

INDIKATOR MAKRO	SKENARIO 2018
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7
Inflasi (%): average	3,5 ± 1
Nilai Tukar (USD/IDR): average	13.600
ICP (USD/Barrel)	55
Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	730
Lifting Gas (BOE/hari)	1.150
Tingkat Kemiskinan	9 - 10
Pengangguran Terbuka	5,3 - 5,5
Indeks Gini	0,38

Sumber : Rancangan Akhir RKP 2018

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2018

RKPD Tahun 2018 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013 – 2018 merupakan penjabaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2013-2018 yaitu **Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia**, yang dicapai visi melalui 8 (delapan) misi pembangunan, yaitu :

- 1) Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing;



- 2) Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat;
- 3) Memberdayakan ekonomi rakyat dan ekonomi kepariwisataan dengan mendorong pelaku ekonomi mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal;
- 4) Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah;
- 5) Mempercepat pembangunan infrastruktur berbasis TR dan LH;
- 6) Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
- 7) Mempercepat pembangunan Kelautan dan Perikanan;
- 8) Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan.

Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Tujuan, sasaran dan Strategi sebagaimana terlihat pada tabel 4.2 berikut.

4.2. Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan tahun 2017 mengacu pada target tahunan RPJMD 2013-2018 yang disinergikan dengan program nasional dan program lainnya melalui pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Sasaran Pembangunan sesuai agenda pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.2
 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi NTT

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi-1: Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing;		
Meningkatkan mutu dan akses Pendidikan pada semua jenjang	1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah	1. Penyiapan pendidikan murah 2. Perluasan akses pendidikan bagi masyarakat; 3. Kebijakan GONG BELAJAR
	2. Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	1. Pelaksanaan PLS Kejar (Paket B, C) 2. Meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan
	3. Meningkatnya kualitas dan prosentase kelulusan semua jenjang pendidikan	1. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar 2. Meningkatkan rasio guru murid
	4. Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan persebaran guru	1. Peningkatan kompetensi guru (sertifikasi) 2. Peningkatan jumlah guru berijasah S1 3. Penyebaran guru berdasarkan kebutuhan 4. Penguatan Kualitas Pengelolaan pendidikan 5. Peningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan Perpustakaan
Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah Raga	1. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan pemuda	1. Memperluas kesempatan pemuda berorganisasi 2. Meningkatkan Kepekaan sosial dan kompetensi pemuda
	2. Meningkatkan prestasi olah raga tingkat regional, nasional dan internasional	1. Memperluas cakupan olah raga usia dini di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi 2. Peningkatan pembinaan olahragwan berbakat dan pemberian reward insan olahraga yang berdesikasi dan berprestasi
	3. Meningkatnya jangkauan pelayanan sarana dan prasarana olah raga	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga
Misi-2: Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat jangkau seluruh masyarakat		
1. Meningkatkan umur harapan Hidup	1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dan Posyandu	Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan yang berkelanjutan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	2. Penurunan kematian ibu baru melahirkan dan dan anak baru lahir	Revolusi KIA
	3. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular	1. Meningkatkan mutu pelayanan RSUD W.Z. Johannes sebagai rumah sakit rujukan daerah dan rumah sakit pendidikan 2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen kesehatan 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan 4. Meningkatkan upaya pemenuhan Jumlah, Mutu dan distribusi secara berkeadilan SDM kesehatan 5. Meningkatkan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang bermutu masyarakat
2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan keluarga	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan KB	Kerjasama terpadu Lintas pelaku peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan KB
3. Optimalnya perlindungan kesehatan masyarakat	Meningkatnya Askes pembiayaan kesehatan masyarakat	Sinergi pembiayaan kesehatan masyarakat dengan JKN dan mitra potensial
Misi -3 : Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi keparawisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal;		
	1. Meningkatnya ketahanan pangan Daerah	Meningkatkan Diversifikasi pangan
	1. Meningkatnya hasil hutan	Meningkatkan pengelolaan potensi hasil hutan kayu dan non kayu
1. Mewujudkan NTT sebagai Provinsi jagung, ternak , cendana, Destinasi Utama pariwisata Dunia dan NTT sebagai provinsi Koperasi	1. Terwujudnya komoditas jagung sebagai pendukung ketahanan pangan nasional	Peningkatan produksi dan Produktivitas Komoditas jagung
	2. Meningkatnya pendapatan peternak	Meningkatkan jenis dan Populasi ternak
	1. Meningkatnya perbaikan lingkungan dan potensi ekonomi masyarakat berbasis cendana	Pengembangan cendana berbasis masyarakat
	2. Meningkatnya kunjungan wisata dan rata-rata lama tinggal wisatawan	1. Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan akses seluruh destinasi wisata 2. Peningkatan kualitas pelayanan wisata
	3. Meningkatnya Jumlah, jenis dan sebaran Koperasi	1. Meningkatnya daya tarik masyarakat 2. Meningkatkan daya dukung koperasi dalam pembangunan ekonomi daerah
2. Peningkatan nilai tambah dan jangkauan pasar produk unggulan	1. Meningkatnya Pertumbuhan jumlah Industri	Peningkatan partisipasi masyarakat dan investasi swasta pengembangan industri
	2. Meningkatkan Perdagangan Dalam Negeri dan ekspor	Meningkatkan kecintaan masyarakat menggunakan produksi dalam daerah
3. Meningkatkan pembangunan pusat ekonomi baru ekonomi kerakyatan	1. Meningkatnya jumlah dan volume kegiatan investasi	Penciptaan iklim investasi yang kondusif
	2. Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Pelatihan ketrampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi di perdesaan melalui pelatihan institusional dan institusional
	3. Meningkatnya perlindungan Tenaga kerja	1. Peningkatan kapasitas pengetahuan atas hak dan kewajiban tenaga kerja 2. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial
	4. Meningkatnya jumlah peserta transmigrasi dalam wilayah NTT dan keluar wilayah NTT	Pembangunan kawasan transmigrasi baru yang potensial secara ekonomi serta penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui pemberian jaminan hidup, pelatihan, sarana produksi dan sarana ekonomi lainnya menuju kemandirian
Misi-4. Pembinaan 49 social 49ocia dan reformasi birokrasi daerah		
1. Mewujudkan kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat	Terbentuknya sistem hukum daerah yang terarah untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial di NTT	Peningkatan kapasitas aparatur
2. Mewujudkan ketertiban, keteraturan dan keamanan dalam masyarakat	Terciptanya sinkronisasi hukum dan HAM yang berpihak pada kepentingan rakyat	Peningkatan penyuluhan hukum
3. Mewujudkan P-5	Terwujudnya P5-HAM	Peningkatan pelaksanaan RAHHAM di daerah
4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Terwujudnya komitmen dan koordinasi aparat penegak hukum dalam pemberantasan KKN dan Pelanggaran HAM	Peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum.	Peningkatan partisipasi masyarakat
5. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan sesuai prinsip-prinsip <i>good governance</i>	Menata pengembangan aparatur Pemprov menuju aparatur yang profesional	Penerapan Assement Centre
	Sistem, Proses dan Prosedur kerja yang Jelas, Efektif, Efisien, Terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip	1. Penerapan Sistem Manajemen Pemerintah Daerah yang berbasis E Planning, E Organazing, E Actuating, dan E. Controlling (E. POAC) 2. Penerapan E. Tata Naskah Dinas
	Meningkatnya pembentukan dan sinkronnya produk-produk hukum, dan meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat	Pengendalian dan pembinaan produk hukum daerah
6. Peningkatan kondisi pembangunan yang kondusif	Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan kenyamanan lingkungan,	Penguatan koordinasi dan kerjasama pemeliharaan keamanan dan pemberdayaan masyarakat
	Meningkatnya Pemahaman wawasan kebangsaan dan kesadaran msyarakat dalam berdemokrasi	Peningkatan partisipasi politik dan demokrasi melalui penguatan dan pemberdayaan masyarakat, institusi, kelompok (perempuan) dan Partai Politik
7. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	1) Memastikan tersedianya indikator kinerja utama yang cukup solid untuk mengukur kinerja SKPD; 2) Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundangan; 3) Memberikan perhatian serius terhadap aspek pengendalian, evaluasi dan pelaporan
	Meningkatkan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap sistem pengawasan internal	1) Menerapkan Sistem pengawasan internal pada setiap SKPD; 2) Meningkatkan profesionalisme aparat / SDM pengawas; 3) Komitmen untuk menindaklanjuti LHP dengan menyelesaikan temuan-temuan yang ada
	Meningkatkan pelayanan publik melalui sarana dan prasarana aparatur/perkantoran yang memadai	Peningkatan dan percepatan penyediaan sarana prasarana aparatur/perkantoran
8. Peningkatan kapasitas pembiayaan pembangun daerah,	Meningkatkan pendapatan daerah	Intensifikasi dan extensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah.
	Menigkatkan pengelolaan 50ocia daerah	1) Optimalisasi pendayagunaan 50ocia bagi peningkatan PAD 2) Peningkatan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi aparatur.
9. Memperkokoh Kesatuan dan persatuan serta politik di daerah yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui sistem pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan ekonomi serta terfasilitasinya kewaspadaan nasional. 	Peningkatan koordinasi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penghayatan, pengamalan, pelestarian dan pengamanan ideologi Pancasila serta meningkatkan rasa kebangsaan, cinta tanah air dan patriotisme untuk kejayaan bangsa dan negara serta meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi dalam berdemokrasi. 	Peningkatan integrasi nasional (Persatuan dan Kesatuan Bangsa) dan peningkatan partisipasi politik serta demokrasi melalui penguatan dan pemberdayaan masyarakat, institusi, kelompok (perempuan) dan Partai Politik
1. Meningkatkan peran dalam penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Menurunnya Kasus pelanggaran Perda oleh masyarakat maupun badan hukum	Melakukan operasi Penegakan PERDA
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga situasi ketenteraman dan ketertiban umum	Terwujudnya situasi trantibum melalui kegiatan patroli dan pembinaan pada masyarakat	Melakukan Operasi penertiban gangguan trantibum dan operasi penegakan perda serta mendukung upaya perlindungan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas SDM Satpol PP	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan maupun fungsional bagi para satpol PP	Melakukan Bimbingan Teknis/ pelatihan-pelatihan fungsional bagi aparat sat. Pol PP Kabupaten/Kota

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
4. Meningkatkan partisipasi dan perlindungan masyarakat	Terwujudnya kesiapsiagaan anggota LINMAS dalam penanggulangan bencana dan kegiatan sosial masyarakat lainnya.	Mendukung upaya-upaya dalam perlindungan masyarakat (kegiatan penanggulangan bencana dan kegiatan kemasyarakatan lainnya)
Misi-5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup		
1. Peningkatan kualitas dan persebaran aksesibilitas wilayah berbasis tata ruang	Mewujudnya penataan ruang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Pemberian bantuan teknis bagi upaya penyusunan rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh kabupaten/kota
	Mewujudnya kesinambungan pergerakan barang dan jasa antar desa dan antar pusat koleksi dan distribusi	Mengembangkan sistem jaringan prasarana perhubungan terpadu antar moda (darat, laut dan udara) yang menjangkau pusat-pusat produksi di perdesaan dengan pusat koleksi-distribusi di perkotaan
	Mewujudnya Transportasi Publik yang Memadai	Menjaga iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha jasa transportasi serta mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif berkaitan dengan sertifikat layak jalan bagi kendaraan angkutan public
	Mewujudnya pengelolaan irigasi teknis yang optimal	Meningkatkan kinerja pengelolaan sistem jaringan irigasi teknis demi meningkatkan produktifitas
	Mewujudnya pelayanan jasa konstruksi yang berkualitas	Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha jasa konstruksi serta meningkatkan sistem baku mutu pelayanan jasa konstruksi
	Mewujudnya kualitas pelayanan Laboratorium yang lebih optimal	Pemeliharaan peralatan Laboratorium Pengujian
	Meningkatkan kualitas Peralatan Kebinarmargaan	Pemeliharaan Peralatan berat Kebinarmargaan
2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat yang lestari dan berkesinambungan	Mewujudkan perumahan layak huni dalam lingkungan permukiman yang sehat bagi masyarakat miskin	Bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan dalam kerangka memungkinkan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan yang layak
	Mewujudnya pelayanan air bersih yang memadai bagi masyarakat	Mengembangkan sistem produksi transmisi dan distribusi air secara merata bagi masyarakat perdesaan maupun perkotaan
	Menyediakan air Baku yang Memadai	Mendayagunakan potensi air permukaan maupun air tanah yang ada secara optimal untuk meningkatkan ketersediaan air baku
	Mewujudnya Sistem Sanitasi Lingkungan yang Berkualitas	Mengembangkan sistem pengelolaan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan oleh masyarakat miskin
Peninbgkatan kualitas lingkungan untuk mendukung daya saing wilayah	Memantapkan pengelolaan kawasan hutan	Percepatan review Kawasan, pemantapan dan percepatan pembangunan kawasan hutan
	Mewujudnya Kawasan Hutan dan DAS yang Lestari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk mencegah kerusakan hutan yang semakin meluas 2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3. Peningkatan perlindungan dan pengamanan hutan
	Mewujudnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Resiko/Dampak Perubahan Iklim Dan Emisi Gas Rumah Kaca	Mengembangkan sistem Mitigasi dan Adaptasi terhadap dampak Perubahan Iklim serta dampak Emisi Gas Rumah Kaca
		Mewujudnya Penggunaan Pemanfaatan Energi Baru dan terbarukan Dengan mengembangkan sistem Pembinaan dan pengendalian untuk mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan
		Terjaganya Kelestarian Alam Akibat Usaha Pertambangan
Misi-6. Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak		
1. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan	1. Meningkatnya kapasitas perempuan untuk mengakses sumber daya pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebijakan, pemerintah (regulasi) yang menjamin pelaksanaan PUG, pemberdayaan perempuan dan peran serta perempuan - Adanya koordinasi hingga monev, guna menjamin sinergitas dan pencapaian target kinerja sebagaimana yang direncanakan
		Peningkatan Pemahaman dan komitmen segenap aparatur pemerintah untuk Pelaksanaan PUG, pemberdayaan perempuan dan peran serta perempuan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan pola pendampingan secara berkelanjutan dalam pelaksanaan program kegiatan Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak - Melibatkan pihak ketiga dari unsur lembaga masyarakat, dalam pelaksanaan
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pemahaman dan komitmen toga, tomas, toda dan masyarakat luas lainnya dalam pelaksanaan PUG, pemberdayaan perempuan, peran serta perempuan serta perlindungan perempuan dan Anak.
	2. Tercapainya 30% keterwakilan jabatan perempuan sebagai tindakan afirmatif dalam jabatan legislatif, yudikatif dan eksekutif	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya regulasi yang menjamin peningkatan kualitas hidup perempuan - Peningkatan Pemahaman dan komitmen segenap aparatur pemerintah untuk mendukung meningkatnya perlindungan perempuan - Pendampingan secara berkelanjutan peningkatan kualitas hidup perempuan - Melibatkan pihak ketiga dari lembaga masyarakat, dalam pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan - Peningkatan Pemahaman dan komitmen toga, tomas, toda dan masyarakat dalam
2. Meningkatkan Perlindungan anak	Terbentuknya Desa Layak Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya regulasi) yang menjamin peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak - Adanya Peningkatan Pemahaman dan komitmen segenap aparatur pemerintah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak - Menerapkan pola pendampingan secara berkelanjutan dalam peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak - Melibatkan lembaga masyarakat, dalam peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak - Meningkatkan Pemahaman dan komitmen unsur toga, tomas, toda dan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
	Meningkatnya perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebijakan, pemerintah (regulasi) yang menjamin peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan anak - Menerapkan pola pendampingan secara berkelanjutan peningkatan kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak - Melibatkan pihak ketiga dari lembaga masyarakat lainnya, dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan anak
Misi-7. Mempercepat Pembangunan Kelautan dan Perikanan		
Peningkatan kesejahteraan nelayan serta pelaku usaha kelautan dan perikanan	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas berkualitas perikanan dan kelautan dan PAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan fasilitas sarana prasarana perikanan yang ramah lingkungan (Tangkap, Budidaya dan Pengolahan) 2. Meningkatkan kualitas Ekosistem pesisir dan Pulau-pulau kecil yang lestari dan berkelanjutan
	2. Meningkatnya SDM kelautan dan Perikanan	Meningkatkan jumlah sarana pendidikan kejuruan kelautan dan perikanan
	3. Menurunnya jumlah tindakan illegal fishing rehabilitasi perairan	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan
		1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan wilayah dan SD perairan laut
	4. Meningkatnya Ketahanan Pangan dan gizi masyarakat dan Promosi	Meningkatkan Jumlah kebutuhan Konsumsi ikan masyarakat
	5. Jumlah investor dan industri perikanan mendukung peningkatan PDRB	Meningkatkan Sistem Kemitraan kelautan dan perikanan
	6. Meningkatnya produksi, export dan PAD	Meningkatkan Kualitas produksi dan sistem rantai pasar
	Jumlah RT perikanan bertambah	Meningkatkan daya tarik ekonomi kelautan dan perikanan
Misi-8. Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, Bencana dan Pengembangan Kawasan Perbatasan.		
1. Percepatan Penurunan Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatkan kemampuan masyarakat miskin

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Masyarakat	penduduk dari 20,03 % menjadi 15%	melalui pola pemberdayaan Masyarakat
	Meningkatnya perlindungan social bagi masyarakat miskin	Peningkan kemitraan penanganan masyarakat penyandang masalah sosial
2. Meningkatkan Ketahanan masyarakat Terhadap Bencana	Mewujudkan Ketahanan Terhadap Bencana	Meningkatkan Mitigasi dan Adaptasi terhadap Bencana
3. Percepatan pembangunan wilayah perbatasan	Meningkatnya situasi keamanan yang kondusif di kawasan perbatasan antar Negara dan antar daerah	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Perbatasan agar Tidak Terjadi Kesenjangan Ekonomi 2. Persehatian masyarakat perbatasan melalui pendekatan adat, agama dan hukum

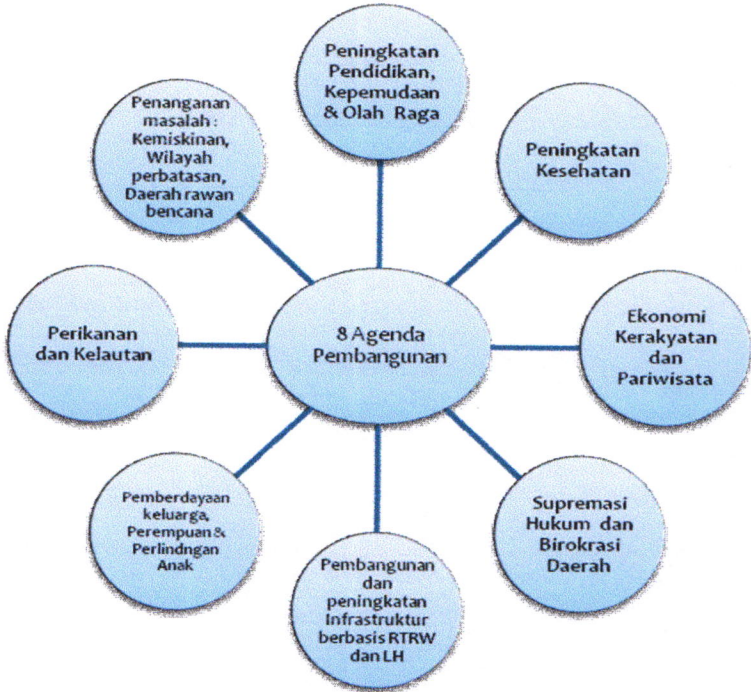
Sumber : RPJMD Provinsi NTT 2013-2018

4.3. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan atau juga dikenal dengan agenda pembangunan merupakan agenda pemerintah daerah yang dilakukan setiap tahunnya, yang menjadi benang merah capaian tahunan menuju target sasaran 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Pencapaian ini dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program prioritas setiap tahunnya. Dengan demikian, prioritas pembangunan berisikan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat PILKADA dan prioritas SKPD yang mendukung pencapaian target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana.

Dengan demikian prioritas daerah tahun 2018 tidak terlepas dari 8 Agenda Pembangunan Provinsi NTT sebagaimana terdapat dalam RPJMD 2013-2018, dan prioritas Pembangunan tahun 2018 dirumuskan dengan memperhatikan kebijakan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015 – 2019.

Gambar 4.2
8 Agenda
Pembangunan
Provinsi
NTT

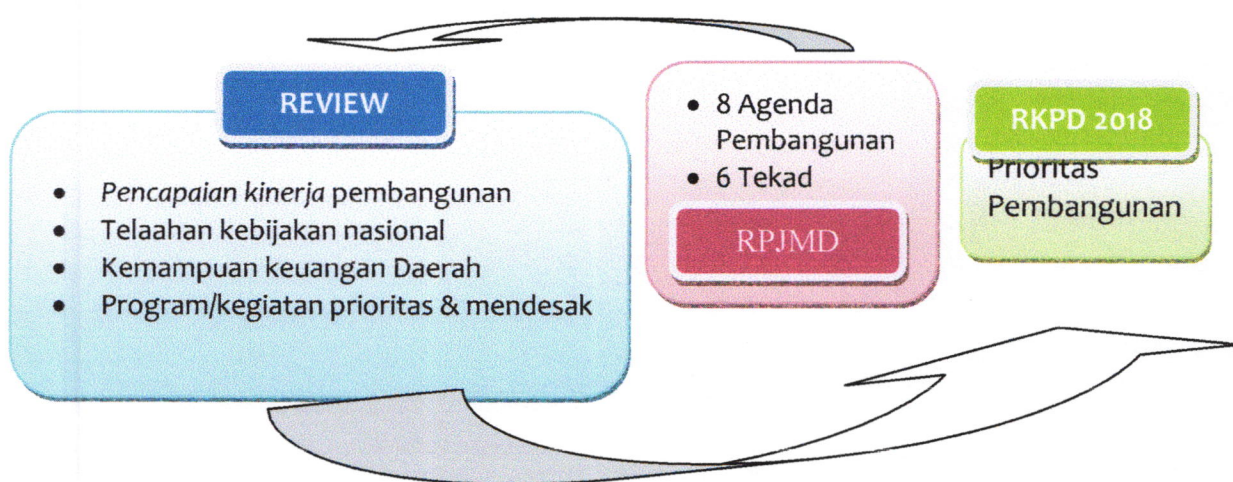


Memperhatikan Delapan Agenda Pembangunan Provinsi NTT dan kesembilan agenda prioritas nasional serta sasaran pembangunan nasional, maka Tema RKPD Provinsi NTT Tahun 2018 yaitu “Memantapkan Daya saing Perekonomian daerah yang Bertumpu pada

Sumber Daya Manusia Berkualitas serta Pemanfaatan Teknologi dan Pembangunan Infrastruktur yang Memadai”.

Sejalan dengan kebijakan *Money Follows Programme*, tidak semua program dan kegiatan menjadi prioritas pada tahun 2018. Prioritas pembangunan menekankan pada program dan kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan kinerja pencapaian sasaran RPJMD, berdaya ungkit besar, langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, dan bersifat mendesak.

Proses perumusan prioritas pembangunan tahun 2018 dilakukan dengan tahapan sebagaimana terlihat pada gambar berikut :



Prioritas Provinsi NTT pada tahun 2018 pada dasarnya tidak terlepas dari 8 (delapan) Agenda Pembangunan Provinsi NTT, namun berdasarkan gambar di atas, untuk tahun 2018 ditetapkan prioritas pembangunan tahun 2018 difokuskan pada :

1. Percepatan pelaksanaan 8 (delapan) Agenda Pembangunan;
2. Penanganan jalan provinsi dan mengusulkan pengalihan sebagian status ruas jalan menjadi jalan strategis nasional;
3. Peningkatan pelaksanaan 6 (enam) tekad pembangunan;
4. Optimalisasi hasil-hasil pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah dan program berbasis desa lainnya;
5. Mendukung suksesnya pelaksanaan program kemitraan lembaga internasional dan investasi swasta.

Kelima tugas di atas dilaksanakan secara lebih rinci melalui berbagai kegiatan sebagaimana terlihat di bawah ini :

1. Pengalihan sebagian ruas jalan provinsi, non status dan jalan kabupaten menjadi jalan strategis nasional
2. Peningkatan Pelaksanaan 6 Tekad Pembangunan Melalui:
 - Pengembangan jagung melalui penyediaan sumber air, alsintan dan saprodi
 - Peneyediaan ternak dan obat-obatan

- Penyediaan kapal dan alat tangkap
- Pelaksanaan even-even pariwisata
- Pengembangan cendana rakyat
- Peningkatan pembinaan dan pelatihan koperasi

3. Mendukung 5 program startegis nasional yaitu:

- Pengembangan pariwisata dengan pusat KSPN Labuan Bajo
- Pembangunan bendungan di wilayah Timor, Sumba dan Flores
- Pengembangan PLBN yang dintegrasikan dengan pembangunan segi tiga pertumbuhan
- Pengembangan Jembatan Pancasila Palmerah kerjasama RI-Belanda sebagai pemicu pembangunan wilayah Flores Timur, Lembata dan Alor
- Pengembangan industri garam

4. Mendukung Program Kemitaran Lembaga Internasional

- Percepatan pelaksanaan Sumba Iconic Island dan pengembangan coklat di Flores kerjasama MCAI
- Peningkatan perluasan capaian target kerjasama pembangunan dengan UNDP
- Pemingkatan sinergitas program dukungan Usaaid, Unicef, Plan Internasional, WVI serta mitra NGO lainnya

Prioritas pembangunan yang telah ditetapkan tidak mengesampingkan 8 Agenda Pembangunan Provinsi NTT, tetapi prioritas pembangunan tersebut dicapai dengan memastikan pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus terlebih dahulu dipenuhi, dengan didukung oleh keamanan dan ketertiban daerah termasuk di wilayah perbatasan, kewaspadaan dini dan penanganan bencana, serta penanggulangan kemiskinan.

Pada Perubahan RKPD 2018 juga mengakomodir kegiatan prioritas yakni Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah untuk ditampung pada KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2018 antara lain :

1. Kegiatan prioritas yang ditetapkan mendahului Perubahan APBD Tahun 2018
 - Pengadaan Rumah Type 36 (rumah atlit)
 - Rehabilitasi Stadion Oepoi
 - Pembangunan Gedung Asrama Latnakes
 - Tambahan Hibah kepada TNI untuk pengamanan PILKADA
 - Dinas Kearsipan
 - KONI-Hibah
 - SOINA-Hibah
 - LP3KD NTT -Hibah
 - LPTQ NTT

- Aplikasi Analisis Jabatan dan Beban Kerja
 - Pengembangan Aplikasi e-Jadwal dan e-Surat
 - Pesparawi
 - Pelaksanaan Diklat dengan kontribusi kabupaten
2. Kegiatan Prioritas Sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih :
- a. Sumber Daya Manusia
- Menampung kekurangan jaminan BPJS untuk masyarakat miskin akibat kenaikan standar BPJS
 - Tambahan pengadaan reagen kimia
 - Tambahan biaya makan dan minum petugas Labkes
 - Distribusi vaksin dan logistik imunisasi Campak dan Rubela
 - Uji kompetensi tenaga kesehatan
 - Penjabaran SiLPA BLUD RSUD dan BLUD SPAM
 - Penjabaran SiLPA BOS SMA, SMK dan SLB
 - Pengadaan Buku untuk sekolah dan taman bacaan
 - Distribusi aplikasi sistem informasi pengelolaan perpustakaan
 - Pelatihan Manajemen Perpustakaan
 - Pembentukan Tim Seleksi & Penyusunan Juklak dan Juknis Beasiswa LN
- b. Infrastruktur
- Peningkatan Jalan Provinsi
 - Pembangunan Embung
 - SID Ina Boi
 - Tambahan Pengadaan Sumur Bor
 - Sisa Pembayaran Fisik Pembangunan Stadion Oepoi
 - Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait Amenities Pariwisata di Pulau Komodo dan Pulau Rinca
- c. Kesejahteraan Rakyat :
- Grand Design Pengembangan Pertanian Lahan Kering
 - Pengadaan dan distribusi bibit Moringa
 - Penghargaan terhadap Pelaku Usaha Moringa pada HUT NTT
 - Survey lokasi dan penerima Mesin Air Minum 5 unit per kab/kota
 - Identifikasi Potensi Garam
 - Identifikasi potensi Rumput Laut
 - Lomba-lomba untuk HUT NTT
 - Pengadaan Tanah KI Bolok
- d. Pembangunan Pariwisata
- Lomba Vlog dan Blog Pariwisata se-NTT di Kota Kupang
 - Lomba Media Sosial (Tema pariwisata NTT) siswa se-NTT di Kota Kupang

- Literasi Destinasi Wisata NTT
- Promosi Instrumen Musik dan Lagu Daerah
- Pembenahan Desa Wisata
- Grand Design Pengembangan Pariwisata
- Sisa Pembayaran Hutang Pekerjaan di Lasiana
- e. Reformasi Birokrasi
 - Kajian/Evaluasi Organisasi Pemerintah oleh Biro Organisasi
 - Pengembangan e-Gov
 - Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja
 - Kegiatan DPRD Provinsi NTT
 - Iuran APPSI dan MPU
 - Penyelesaian Tindak Lanjut LHP
 - Tambahan untuk Penyusunan RPJMD
- 3. Kegiatan prioritas menurut Agenda Pembangunan :
 - a. Agenda Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Pendidikan, Kepemudaan Dan Keolahragaan
 - Alokasi kekurangan honor guru kontrak
 - Nusantara Expo
 - b. Agenda Pembangunan Kesehatan
 - Alokasi kekurangan honor tenaga kontrak
 - c. Agenda Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata
 - Peremajaan server ULP
 - Perencanaan kampung industri di Sikka, Flotim, Alor dan Sumba Barat Daya
 - NTT Fair
 - Pengiriman Pemuda Duta ASEAN
 - d. Agenda Pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah
 - Kegiatan PPK online
 - Seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama dan Pelantikan Eselon III dan IV
 - Ujian Dinas Periode Oktober
 - Proses Mutasi
 - Penyelesaian Alih Status
 - Monev Tubel baru
 - Uji Kompetensi Jabatan Fungsional bagi anggota Sat Pol PP Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - Penataan Perangkat Daerah tingkat Provinsi
 - Prajabatan CPNS
 - Hibah Panitia COPA NTT di Jakarta dan KONI NTT
 - Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTT

- Peningkatan Kedinasan KDH/WKDH (termasuk layanan tamu)
 - Pokja Saber Pungli
 - Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
 - Peningkatan pelayanan pada kantor bersama SAMSAT dan penguatan fasilitas Samsat online
 - Penambahan anggaran untuk belanja listrik, air dan telpon
 - Keikutsertaan pada PORNAS KORPRI
- e. Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
- Perencanaan dan pembangunan jalan & Jembatan Provinsi (tambahan DAK)
 - Perencanaan Monumen Garuda Pancasila dan Ground Breaking
 - Perencanaan IKK SPAM
 - Sosialisasi Aplikasi Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH)
 - Pengelolaan Cendana Lestari
 - Pembangunan sarana dan Prasarana Perkantoran
- f. Agenda Pembangunan perikanan dan kelautan
- Pengadaan kapal tangkap dan alat tangkap
- g. Agenda Khusus :
- Penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna di Jakarta

Keterkaitan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2018 dengan 8 (delapan) Agenda Pembangunan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Keterkaitan Prioritas Tahun 2018 dengan 8 (delapan) Agenda Pembangunan

No.	Prioritas Tahun 2018	8 Agenda Pembangunan
1.	Pengalihan sebagian ruas jalan provinsi, non status dan jalan kabupaten menjadi jalan strategis nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda 8 (Khusus) : Penanggulangan kemiskinan, bencana, dan pengembangan kawasan perbatasan • Agendan 1 : Peningkatan kualitas pendidikan, kepemudaan dan olahraga • Agenda 2: Pembangunan Kesehatan • Agenda 4 : Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi
2.	Peningkatan Pelaksanaan 6 Tekad Pembangunan Melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jagung melalui penyediaan sumber air, alsintan dan saprodi • Peneyediaan ternak dan obat-obatan • Penyediaan kapal dan alat tangkap • Pelaksanaan even-even pariwisata • Pengembangan cendana rakyat 	
	Mendukung 5 program startegis nasional yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pariwisata dengan pusat KSPN Labuan Bajo • Pembagunan bendungan di wilayah Timor, Sumba dan Flores • Pengembangan PLBN yang dintegrasikan dengan pembangunan segi tiga pertumbuhan • Pengembangan Jembatan Pancasila Palmerah kerjasama RI-Belanda sebagai pemicu pembangunan wilayah Flores Timur, Lembata dan Alor • Pengembangan industri garam 	
	Mendukung Program Kemitaran Lembaga Internasional : <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pelaksanaan Sumba Iconic Island dan pengembangan coklat di Flores kerjasama MCAI • Peningkatan perluasan capaian target kerjasama pembangunan dengan UNDP • Pemingkatan sinergitas program dukungan Usaaaid, Unicef, Plan Internasional, WVI serta mitra NGO lainnya 	
		Agenda 5 : Mempercepat Pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none"> • Agenda 3 : Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengembangan pariwisata • Agenda 7 : Pembangunan perikanan dan kelautan
		Agenda 5 : Mempercepat Pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none"> • Agenda 3 : Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengembangan pariwisata • Agenda 7 : Pembangunan perikanan dan kelautan
		Agenda 1 : Peningkatan kualitas pendidikan, kepemudaan dan olahraga <ul style="list-style-type: none"> • Agenda 2 :Pembangunan Kesehatan • Agenda 3 : Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengembangan pariwisata • Agenda 5 : Mempercepat Pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup • Agenda 6 : Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak • Agenda 7 : Pembangunan perikanan dan kelautan

Sasaran makro yang harus dicapai Provinsi NTT pada Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Sasaran Makro NTT Tahun 2018 sesuai RPJMD 2013 - 2018

INDIKATOR MAKRO	SKENARIO 2018
Pertumbuhan Ekonomi (%)	8 – 9
Inflasi (%): average	4,1 – 4,5
Tingkat Kemiskinan	15
Indeks Gini	0,34

Sumber : RPJMD Provinsi NTT 2013 – 2018

Memperhatikan sasaran makro yang harus dicapai sesuai arahan RPJMD tersebut dan kondisi riil Provinsi NTT sesuai pencapaian indikator makro pada tahun 2016, maka ditetapkan indikator makro Provinsi NTT tahun 2018 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 4.4 berikut :

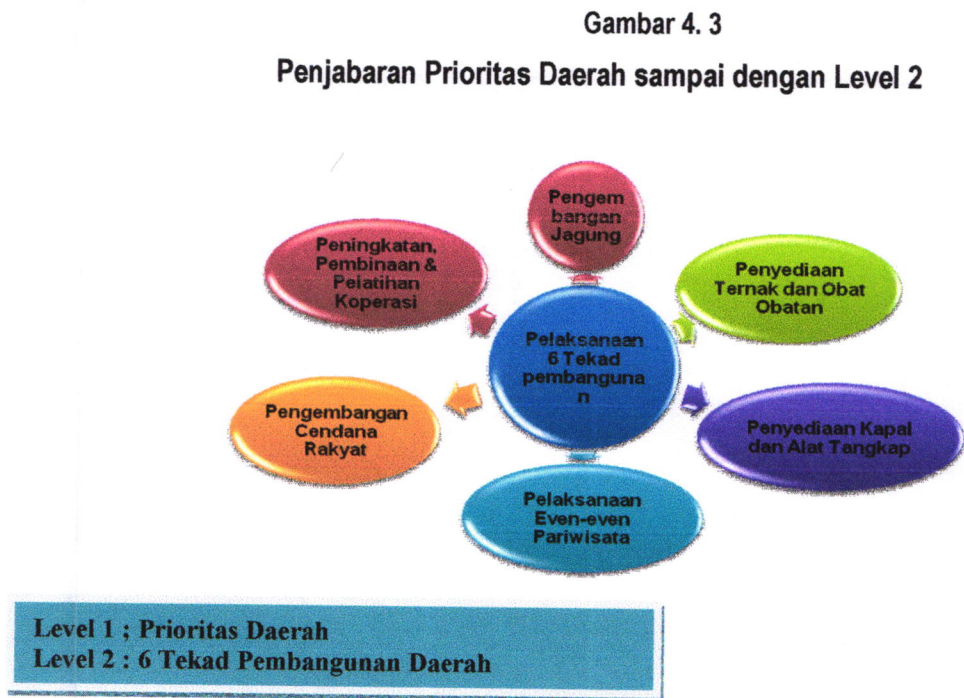
Tabel 4.4
Sasaran Makro NTT RKPD Tahun 2018

INDIKATOR MAKRO	REALISASI 2016	SKENARIO 2018
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,18	5,9
Inflasi (%): average	2,48	2,48 – 4,1
Tingkat Kemiskinan	22,01	20,36
Indeks Gini	0,34	0,34

Untuk mewujudkan sasaran makro tersebut, maka maka prioritas pembangunan dijabarkan dalam program prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2018. Program prioritas dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan **Holistik-tematik, Integratif dan Spasial**, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Holistik-tematik** : dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang direncanakan secara menyeluruh, tidak parsial, saling mendukung dan mengisi antar OPD. Program dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk mewujudkan tercapainya 8 Agenda Pembangunan dan 6 Tekad Pembangunan sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program strategis nasional dan kerja sama kemitraan dengan Lembaga Internasional.
2. Sejalan dengan implementasi pendekatan holistik-tematik, pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara terintegrasi, misalnya, pembangunan bendungan, harus didukung dengan pencetakan sawah baru, mendukung bertumbuhnya peternakan sehingga provinsi ternak bisa tercapai, jalan yang mendukung pusat produksi, begitu

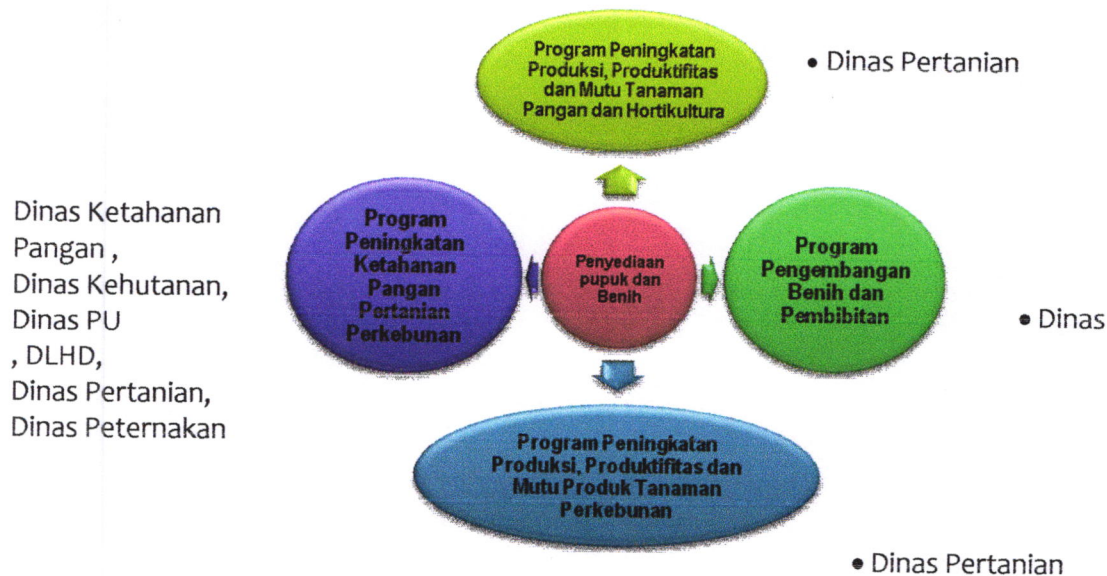
- pula pembangunan pemukiman harus didukung oleh fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai.
3. Pendekatan **Spasial** dimaksudkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan harus dapat memastikan detail lokasi, yang sudah berbasis desa/kelurahan.



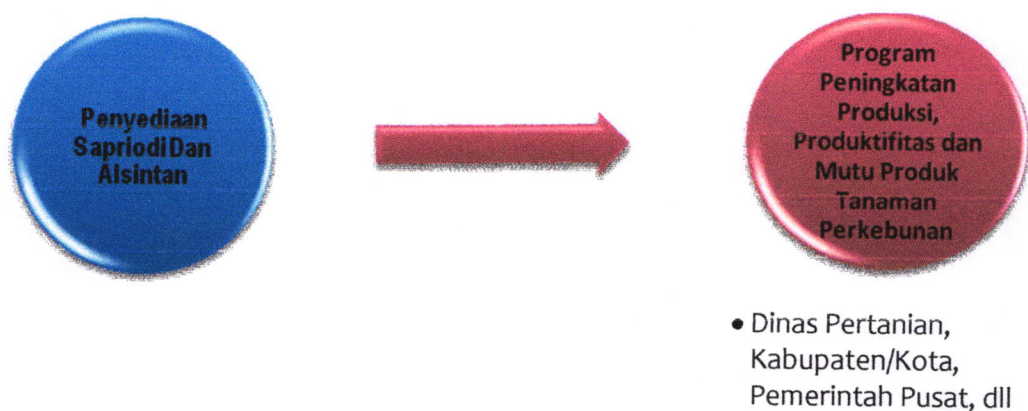
Gambar 4.3.1
Penyediaan Sumber Air



Gambar 4.3.2
Penyediaan pupuk dan Benih



Gambar 4.3.3
Penyediaan Saprodi dan Alsintan



4.4. Inovasi Pembangunan Provinsi NTT

Untuk mencapai sasaran Pembangunan Daerah tahun 2017, berbagai inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Nusa Tenggara Timur diantaranya :

1. Kerjasama Segitia Pertumbuhan

Sesuai geografis wilayah, Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat strategis karena berbatasan dengan dua negara yaitu Timor Leste dan Australia. Sehubungan dengan itu Pemerintah NTT memanfaatkan posisi strategis tersebut menjadi peluang kerjasama tiga Negara, yaitu antara Kupang, Dili dan Darwin, dalam menggerakkan kegiatan potensial yaitu : (1) Pembangunan sektor Pariwisata; (2) Pengembangan *"Ranch Penggemukan ternak Sapi"*; (3) Pengembangan sektor perikanan dan kelautan; (4) Pertukaran budaya; (5) Pengembangan pusat promosi; (6) Kerjasama teknologi produksi dan pengolahan bidang pertanian, peternakan serta perikanan dan kelautan; (7) Kerjasama sektor perdagangan; (8) Kerjasama Pendidikan, pemuda dan keolahragaan; (9) Kerjasama ketenagakerjaan terampil bidang kesehatan dan pekerja jasa; untuk meningkatkan daya saing ekonomi wilayah sehingga mampu meningkatkan investasi swasta, BUMN dan kegiatan pembangunan pemerintah. Pelaksanaan kerjasama ekonomi, membuka peluang peningkatan peran Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung kebijakan nasional dalam kerjasama regional dan internasional.

Ide kerja sama yang dirintis oleh Pemerintah NTT ini telah disambut dan ditindaklanjuti/ diambil alih oleh Kementerian Perekonomian.

2. Kerjasama Antar Daerah

Pemerintah Provinsi NTT juga mengembangkan kerja sama antar daerah, diantaranya: a) Kerjasama bidang peternakan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani di Kupang pada 20 Desember 2014 dan disaksikan Presiden RI. Kerjasama meliputi pembibitan, penggemukan, dan pengolahan daging sapi; b) Kerja sama bidang perikanan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mencakup perikanan tangkap, budidaya rumput laut dan pembuatan garam rakyat; dan c) Menggagas ide kerja sama Sunda Kecil, yang saat ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk Forum Kerjasama Wilayah Sunda Kecil (NTT-NTB dan Bali).

3. Pembangunan Terpadu Berbasis Desa/Kelurahan

Pembangunan terpadu berbasis Desa/Kelurahan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 39 Tahun 2012, tentang Pembangunan Daerah Terpadu Berbasis Desa/Kelurahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di desa/kelurahan. Hal ini juga memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembangunan, karena yakin bahwa kalau pembangunan dimulai dari desa/kelurahan, dan terjadi kemajuan di desa/kelurahan,

maka masyarakat pasti sejahtera. Hal ini telah memberikan optimisme baru dan kepastian percepatan kemajuan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

4. Program Pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah

Penjabaran strategi pemberdayaan untuk mewujudkan anggaran pembangunan yang lebih besar berpihak pada kepentingan rakyat (belanja publik) dari belanja pemerintah (belanja aparatur) dengan penerapan penganggaran program/kegiatan lebih pro-rakyat demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Program Desa Mandiri Anggur Merah sebagai program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan kewilayahan terpadu dan menyeluruh memiliki posisi sangat strategis karena perannya sebagai berikut; (1) Mendukung pelaksanaan enam tekad pembangunan yang ditetapkan sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan pendapatan perkapita, menurunkan penduduk kemiskinan yang mencapai 20,03% keadaan Maret 2013, (2) Meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian; (3) Mendukung pelaksanaan 8 agenda pembangunan; dan (4) Mendukung penyiapan lapangan kerja di pedesaan terutama tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian. Pembangunan Terpadu Desa Mandiri Anggur Merah didukung alokasi dana APBD yaitu dana segar (Fresh money) Rp. 250 juta untuk ekonomi produktif, Rp.50 juta untuk pembangunan rumah layak huni, pendamping kelompok masyarakat (PKM), operasional pengendalian pembangunan tingkat desa, kelurahan dan unsur tripika yaitu Kecamatan didukung Polsek dan Koramil diharapkan dapat menciptakan masyarakat Desa/Kelurahan maju dan produktif. Program Desa Mandiri Anggur Merah disinergikan pelaksanaannya dengan PNPM Mandiri, Program Kementrian/Lembaga, Program Hibah Lembaga Internasional, CSR BUMN dan Replikasi Program Desa Mandiri Anggur Merah melalui APBD Kabupaten/Kota serta partisipasi masyarakat pada Gerakan Pulang Kampung (GPK).

5. NTT Satu Data

Pembentukan NTT Satu Data merupakan langkah kongkrit dalam pembangunan basis data dalam keterpaduan demi pembangunan NTT yang efisien dan efektif. Dengan adanya NTT Satu Data dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel dan mudah diakses oleh semua stakeholder. Tujuannya adalah, Provinsi NTT, memiliki satu basis data pembangunan yang sama, akurat, terpusat dan terintegrasi serta menghasilkan kebijakan analisis pembangunan yang tepat, aktual, dan bermutu bagi Provinsi, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan.

6. NTT Satu Peta

Salah satu penyebab munculnya konflik pemanfaatan lahan adalah belum adanya peta yang memiliki standar, format maupun struktur yang sama di antara instansi/lembaga serta pemerintah daerah. Peta sangat penting karena menjadi landasan perizinan lokasi dari setiap kegiatan bagi lembaga/institusi baik di pusat maupun daerah. Pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur maupun kegiatan yang menggunakan lahan lainnya, seringkali terbentur dengan permasalahan antar instansi/lembaga dan pemerintah daerah akibat peta Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang berbeda standar, format, maupun struktur, meski telah menggunakan skala peta yang sama. Salah satu penyebab lainnya adalah perbedaan referensi yang digunakan sebagai penyusunan IGT tersebut. Penggunaan informasi geospasial untuk mendukung terwujudnya agenda pembangunan NTT, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. NTT satu Peta merupakan tindak lanjut dari pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000.

7. Penerapan “Money Follow Program”

Perubahan kebijakan penganggaran dari *“money follow function”* menjadi *“money follow programme”* dengan holistik-tematik, integratif dan spasial yang mulai tahun 2017, sebenarnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sejak RPJMD 2013 – 2018 telah melakukan rasionalisasi jumlah Program Pembangunan dari sebelumnya 600-an program menjadi hanya tinggal 130 program.

8. Penerapan Program/Kegiatan Berbasis Desa/Kelurahan pada Program/Kegiatan Lembaga Mitra Pembangunan.

Melalui Sekretariat Terpadu (SPADU) KP-LI Bappeda Provinsi NTT, semua Lembaga Mitra Pembangunan yang bekerja di Nusa Tenggara Timur wajib melakukan Program dan Kegiatan berbasis desa/kelurahan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) Perubahan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Untuk gambaran program prioritas yang terdiri dari Belanja Rutin dan belanja Urusan Perangkat Daerah termasuk rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel 5.1

Adapun rincian Belanja Langsung pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 sebesar Rp. **1.782.386.620.352,-** atau terjadi penambahan sebesar Rp. **120.991.078.352,-** dari jumlah Belanja Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. **1.661.395.542.000**. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.1. dibawah ini:

Tabel 5.1
Perbandingan Pagu APBD Murni TA.2018 dengan
Perubahan RKPD TA.2018 Berdasarkan Perangkat Daerah

Kode SKPD				SKPD	Penetapan APBD tahun 2018	Pagu perubahan tahun 2018	Bertambah /berkurang tahun 2018
1	01	01	01	Dinas Pendidikan	454.199.659.000	474.130.679.961	19.931.020.961
1	01	02	01	Dinas Kesehatan	50.481.168.000	57.759.895.700	7.278.727.700
1	01	02	02	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	157.560.240.000	166.397.803.313	8.837.563.313
1	01	03	01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	264.202.667.000	289.654.122.432	25.451.455.432
1	01	04	01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	116.572.080.000	120.429.960.000	3.857.880.000
1	01	05	01	Satuan Polisi Pamong Praja	3.777.793.000	4.406.766.000	628.973.000
1	01	06	01	Dinas Sosial	18.975.111.000	19.692.489.910	717.378.910
1	02	01	01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.105.405.200	7.884.405.200	779.000.000
1	02	02	01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.702.847.000	1.702.847.000	-
1	02	03	01	Dinas Ketahanan Pangan	7.122.970.000	7.122.970.000	-
1	02	05	01	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	3.318.749.000	3.478.749.000	160.000.000
1	02	07	01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.518.458.000	5.754.260.400	235.802.400
1	02	09	01	Dinas Perhubungan	12.185.507.000	12.742.220.600	556.713.600
1	02	10	01	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.317.191.000	4.349.934.600	1.032.743.600
1	02	11	01	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	19.386.494.000	19.864.383.000	477.889.000
1	02	12	01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.110.557.000	4.645.557.000	535.000.000

Kode SKPD				SKPD	Penetapan APBD tahun 2018	Pagu perubahan tahun 2018	Bertambah /berkurang tahun 2018
1	02	13	01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	16.698.844.000	26.042.575.300	9.343.731.300
1	02	16	01	Dinas Kebudayaan	7.520.636.000	7.566.546.000	45.910.000
1	02	17	01	Dinas Perpustakaan Daerah	2.219.060.000	2.775.908.520	556.848.520
1	02	18	01	Dinas Kearsipan	1.824.729.000	2.224.729.000	400.000.000
2	00	01	01	Dinas Kelautan dan Perikanan	38.271.562.000	41.431.562.000	3.160.000.000
2	00	02	01	Dinas Pariwisata	15.238.440.000	17.238.440.000	2.000.000.000
2	00	03	01	Dinas Pertanian	24.607.548.000	28.271.048.000	3.663.500.000
2	00	03	02	Dinas Peternakan	18.994.935.000	19.013.395.000	18.460.000
2	00	04	01	Dinas Kehutanan	32.239.959.500	34.430.621.135	2.190.661.635
2	00	05	01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	58.401.918.000	64.787.230.141	6.385.312.141
2	00	06	01	Dinas Perdagangan	3.392.322.200	3.507.322.200	115.000.000
2	00	07	01	Dinas Perindustrian	8.500.375.000	9.167.234.000	666.859.000
3	00	01	01	Inspektorat Daerah	8.765.699.000	9.198.663.000	432.964.000
3	00	02	01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.288.309.000	15.041.812.600	1.753.503.600
3	00	03	01	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	74.211.614.000	82.221.398.100	8.009.784.100
3	00	04	01	Badan Kepegawaian Daerah	10.811.367.000	8.920.467.000	- 1.890.900.000
3	00	05	01	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	24.540.053.000	27.284.228.440	2.744.175.440
3	00	06	01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.416.640.000	2.760.040.000	343.400.000
3	00	07	01	Badan Penghubung	3.192.777.000	3.335.667.000	142.890.000
3	00	08	01	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.049.829.000	2.247.279.000	197.450.000
3	00	09	01	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	1.723.543.000	1.723.543.000	-
4	00	01	01	Biro Umum	67.513.821.000	67.513.821.000	-
4	00	01	01	Biro Hukum	1.978.877.000	2.315.883.000	337.006.000
4	00	01	01	Biro Organisasi	2.774.898.000	3.891.534.500	1.116.636.500
4	00	01	01	Biro Perekonomian	2.452.859.100	2.709.603.700	256.744.600
4	00	01	01	Biro Kesejahteraan Rakyat	3.793.489.000	4.007.188.500	213.699.500
4	00	01	01	Biro Pemerintahan	3.289.191.000	4.460.843.000	1.171.652.000
4	00	01	01	Biro Hubungan Masyarakat	3.682.722.000	4.129.448.100	446.726.100
4	00	01	01	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3.031.904.000	3.048.904.000	17.000.000
4	00	01	01	Biro Kerjasama	1.427.283.000	2.077.783.000	650.500.000
4	00	02	01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	64.672.155.000	69.934.991.000	5.262.836.000
6	01	01	01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.393.242.000	4.093.242.000	700.000.000
6	02	01	01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.938.045.000	4.996.625.000	58.580.000
TOTAL					1.661.395.542.000	1.782.386.620.352	120.991.078.352

Sumber: Olahan PDE Bappeda Provinsi NTT, 2018

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018 PROV. NTT

Dinas Pendidikan

Kode			Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1			2	4	7	8	9	10	11	12	13	
0.00			NON URUSAN									
0.00	01		Program Setiap OPD									
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						7.717.686.760	7.999.896.928	282.210.168	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang; Kab. Belu. Kab. Rote Ndao; Kab. Sabu Raijua; Kab. Alor; Kab.Lembata; Kab. Manggarai; Kab. Sikka, Kab. Ende; Kab. Sumba Barat; Kab. Sumba Timur.	Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Surat Menyurat Dinas	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Kantor Dinas dan UPT. Tekkomdik, dan 11 UPT. Pendidikan	100%	57.700.000	53.800.000	(3.900.000)
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang; Kab. Belu. Kab. Rote Ndao; Kab. Sabu Raijua; Kab. Alor; Kab.Lembata; Kab. Manggarai; Kab. Sikka, Kab. Ende; Kab. Sumba Barat; Kab. Sumba Timur.	Jumlah Bulan Tagihan Komunikasi Telepon, Air, Internet, dan Listrik	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, kebutuhan akan air,internet, dan Listrik.	100%	949.200.000	912.600.000	(36.600.000)
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS						30.000.000	30.000.000	-
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Jumlah pajak dan perijinan kendaraan roda empat dan roda dua; Jumlah Tenaga PPPK Sopir Dinas	2 kendaraan roda 4,1 kendaraan roda 2;2 orang PPPK Sopir.	Pemenuhan kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	33.120.000	53.040.000	19.920.000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						2.136.156.000	2.136.156.000	-
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor						610.410.000	610.410.000	-
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						566.417.656	566.417.656	-
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah bulan pemenuhan bahan cetakan, penggandaan, dan jilid kantor	12 Bulan	Peningkatan Kelancaran pelaksanaan tugas untuk memenuhi kebutuhan bahan cetakan, penggandaan dan Jilid	100%	396.900.000	454.500.000	57.600.000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	dinas Pendidikan	Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Adanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	167.000.000	167.000.000	-
					sekolah keberbakatan olahraga	Terlaksananya perbaikan /instalasi listrik di sekolah keberbakatan olahraga	100%	Adanyanya perbaikan /instalasi listrik di sekolah keberbakatan olahraga	100%	-	182.735.000	182.735.000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						24.800.000	24.800.000	-
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						213.600.000	213.600.000	-
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Jumlah bulan pemenuhan pembiayaan Konsultasi Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Terwujudnya kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pembangunan Bidang Pendidikan	100%	50.000.000	100.000.000	50.000.000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas						27.666.000	27.666.000	-
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah Bulan pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	12 Bulan	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya	100%	600.000.000	611.750.000	11.750.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang	
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13	
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor							124.940.000	124.940.000	-
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	1. Jumlah PPPK dan Guru Kontrak Penerima Jaminan Sosial Kesehatan; 2. Jumlah PPPK dan Guru Kontrak Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;	128 Orang PPPK Kantor Dinas, 2310 Guru Kontrak Provinsi, dan 16 Orang PPPK SKO.	Pemenuhan Kebutuhan Jaminan Sosial Seluruh Pegawai PPPK Kantor Dinas, 11 UPT Pendidikan, dan SKO	100%	1.729.777.104	1.730.482.272	705.168	
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						989.800.000	1.236.950.000	247.150.000	
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10 Gedung Kantor (Sewa); 4 AC (1 PK); 1 paket CCTV.	Tersedianya Perlengkapan Kantor yang memadai.	100%	416.450.000	425.450.000	9.000.000	
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	PC 11 Unit, Laptop 1 Unit, Printer 6 Unit, Harddisk Internal 1 Buah, infocus 1 unit.	Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai.	100%	45.000.000	132.400.000	87.400.000	
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Jumlah Pengadaan Meubeler Kantor	Meja Kerja 58 buah; Kursi Kerja 58 buah. Rak Arsip 21 buah; Lemari Besi 11 buah; Sofa Tamu 2 Set	Tersedianya Meubeler Kantor Yang Memadai	100%	85.050.000	194.500.000	109.450.000	
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	dinas pendidikan	terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	100%	adanya pemeliharaan rutin gedung kantor	100%	100.000.000	100.000.000	-	
				Sekolah keberbakatan olahraga	Terlaksananya perbaikan Asrama sekolah keberbakatan olahraga	1 Gedung	Adanya sekolah keberbakatan olahraga yang baik	1 Gedung	-	30.500.000	30.500.000		
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						170.000.000	170.000.000	-	
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	6.000.000	16.800.000	10.800.000	
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor						167.300.000	167.300.000	-	
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						59.180.000	59.180.000	-	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						59.180.000	59.180.000	-	
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1.01	01			Pendidikan									
1.01	01	19		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN LUAR BIASA						3.970.623.808	3.970.623.808	-	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang	
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13	
1.01	01	19	01	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik							769.506.708	769.506.708	-
1.01	01	19	02	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SLB							3.201.117.100	3.201.117.100	-
1.01	01	20		PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN							387.584.234.150	406.222.554.943	18.638.320.793
1.01	01	20	07	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1). Kota Kupang; 2). Kupang dan Nasional; 3). Kupang dan Nasional; 4). Kupang dan Nasional; 5).Kupang dan Nasional; 6). Kupang; 7). NTT dan luar NTT; 8). Kota Kupang.	1). Jumlah siswa/i peserta lomba O2SN, FLS2N, OSN untuk SD dan SMP. 2). Jumlah siswa/i peserta lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA; 3).Jumlah siswa/i peserta lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA dan SMK; 4). Jumlah siswa/i peserta lomba Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA dan SMK; 5). Jumlah siswa/i peserta lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris SMA dan SMK; 6). Jumlah Peserta yang mengikuti GEBYAR SMK; 7). Jumlah peserta yang mengikuti magang industri siswa SMK; 8). Jumlah peserta lomba Ki Hajar Tingkat Provinsi NTT.	1). 660 Psrta Tk.Provinsi,46 Psrta Tk.Nas.; 2). 198 Psrta; 3). 264 Psrta; 4). 264 Psrta; 5). 72 Psrta 6).150 Psrta; 7).77 siswa; 8). 50 Siswa	1). Peningkatan Prestasi, kompetensi, dan daya saing siswa/i SD dan SMP peserta O2SN, FLS2N, OSN; 2). Peningkatan Prestasi,kompetensi, dan daya saing siswa/i SMA peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN); 3). Peningkatan Prestasi, keterampilan, dan daya saing siswa/i SMA peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN); 4).Peningkatan Prestasi, kompetensi, dan daya saing siswa/i SMA dan SMK peserta Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N); 5). Peningkatan Prestasi, kompetensi, dan daya saing siswa/i SMA peserta Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; 6). Peningkatan Daya saing dan kompetensi SMK peserta Gebyar SMK; 7). Peningkatan Prestasi, kompetensi, dan daya saing siswa/i; 8). Peningkatan Kratifitas dan Inovasi Siswa.	100%	3.907.558.400	3.933.958.400	26.400.000	
1.01	01	20	11	Pengadaan Peralatan Pendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)							5.990.120.000	5.990.120.000	-
1.01	01	20	15	Pengembangan Materi Belajar Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi							473.046.000	473.046.000	-
1.01	01	20	19	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Menengah dan SLB Sederajat	22 kabupaten/kota	Jumlah Sekolah SMA,SMK dan SLB penerima dana Bantuan Operasional Sekolah.	SMA;SMK; SLB	Terlaksananya Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Menengah dan Sekolah Luar Biasa	SMA;SMK; SLB	236.869.000.000	254.188.535.961	17.319.535.961	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
1.01	01	20	21	Rehabilitasi Gedung Sekolah	'22 Kab./Kota	1). Jumlah Pembangunan Laboratorium IPA SMA; 2). Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA; 3). Jumlah Pembangunan Jamban Siswa SMA; 4). Jumlah Pembangunan Mess Guru SMA; 5). Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan SMA; 6). Jumlah Pengadaan Peralatan Media Pendidikan SMA; 7). Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK; 8). Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK; 9). Jumlah Pembangunan Laboratorium IPA dan Pengadaan Meubeler SMK; 10). Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (APS); 11). Jumlah pembangunan Rumah Dinas SMK beserta Meubeller; 12). Progres Manajemen Proyek DAK SMA; 13). Progres Manajemen Proyek DAK SMK.	1). 1 Paket, 4 Ruang, dan 14 Unit pada 19 SMA; 2). 35 RKB pada 24 SMA;; 3). 8 paket Jamban pada 8 SMA; 4). 1 paket Mess Guru pada 1 SMA; 5). 31 paket Peralatan Pendidikan pada 31 SMA ; 6). 20 Paket Peralatan Media Pendidik	1). 'Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMA; 2). 'Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMA; 3). 'Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMA; 4). Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMA; 5). Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMA; 6). Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan; 7). Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan; 8). Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan; 9). Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan; 10). Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan; 11). Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan; 12). Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan DAK SMA; 13). Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan DAK SMA.	100%	132.681.000.000	132.681.000.000	-
1.01	01	20	22	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	1). Kupang; 2). Kupang; 3).TTS, Ende, Waikabubak, Nagekeo; 4).Sumba Barat; 5).Kota Kupang	1).Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Olimpiade Guru Nasional (OGN) Tingkat UPT dan Tingkat Provinsi; 2). Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan bimtek kurikulum 13; 3). Jumlah operator guru (Proktor) SMA/SMK untuk pelaksanaan UNBK; 4). Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Hari Aksara Internasional ke - 53 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. 5). Jumlah peserta Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah.	1).12 Orang ; 2).176 guru SMA dan SMK ; 3).30 Orang / Lokasi Kegiatan ; 4).660 orang ; 5).40 Orang.	1). Peningkatan Prestasi dan Kompetensi Guru-guru SMA dan SMK peserta Olimpiade Guru Nasional (OGN) Tingkat Provinsi ; 2). Peningkatan Kompetensi Guru-guru SMA dan SMK peserta Bimtek Kurikulum 13; 3).Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Proktor, Pembantu Proktor, dan Teknisi Pendamping Ujian Nasioanl Berbasis Komputer (UNBK) ; 4).Peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Nonformal peserta Hari Aksara Internasional (HAI) ; 5).Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah.	100%	3.205.631.750	2.192.016.582	(1.013.615.168)

6

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang	
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13	
1.01	01	20	23	Pembinaan Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)							1.723.100.000	1.723.100.000	-
1.01	01	20	24	Fasilitasi Ujian SDLB dan Sederajat/Setara	1). Kupang dan 22 Kabupate/Kota; 2).Kota Kupang	1). Jumlah Kab/Kota terdistribusi Paket Soal Ujian Nasional (UN) SMA dan SMK; 2). Jumlah Kab/Kota terdistribusi terdistribusi Paket Soal Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US) Sekolah Luar Biasa (SLB).	22 Kab./Kota	1). SMA dan SMK pelaksana Ujian Nasional berbasis UNKP dapat melaksanakan Ujian Nasional; 2). SDLB pelaksana Ujian Nasional berbasis UNKP dapat melaksanakan Ujian Nasional.	100%		1.477.747.500	1.443.747.500	(34.000.000)
1.01	01	20	25	Pengadaan Buku Untuk SMU/SMK	Sumba Timur; Lembata; kabupaten Kupang	Jumlah buku pengetahuan umum dan Teknologi Ketrampilan Pertanian	200 Exp per SMU dan 200 Exp per SMK Sekolah	Jumlah kunjungan dan pinjaman buku bagi siswa di perpustakaan meningkat	meningkat 50 %		-	2.220.000.000	2.220.000.000
1.01	01	20	26	Pengadaan Buku Untuk Taman Bacaan	Sabu Raijua; Rote Ndao;TTU	Jumlah buku pengetahuan umum dan Teknologi Ketrampilan Pertanian	200 buku pelajaran dan Teknologi ketrampilan Pertanian	Jumlah kunjungan dan pinjaman buku bagi siswa di perpustakaan meningkat	meningkat 50 %		-	120.000.000	120.000.000
1.01	01	21		PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN							1.291.873.182	1.740.213.182	448.340.000
1.01	01	21	01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	1).22 Kab/Kota ; 2).22 Kab/Kota ; 3).22 Kab/Kota ; 4).Kota Kupang; 5). Kota Kupang; 6).Kantor Dinas Pendidikan Prov. NTT ; 7). Kantor Dinas Pendidikan Prov. NTT ;8).Kantor Dinas Pendidikan Prov. NTT .	1).Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi BOS SMA/SMK; 2).Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional ; 3).Jumlah dokumen hasil monitoring dan supervisi sekolah oleh 11 UPT. Pendidikan ; 4).Jumlah anggota pengurus badan akreditasi sekolah dan madrasah terpilih ; 5).Jumlah Dokumen hasil koordinasi Perencanaan Pendidikan Tingkat Provinsi NTT ; 6).Jumlah website Dinas yang dikembangkan ; 7).Jumlah Aplikasi e_monev yang dikembangkan; 8).Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Dinas Pendidikan.	1). 1 Dokumen ; 2). 1 Dokumen; 3).1 Dokumen ; 4).11 Orang; 5).1 Dokumen ; 6).1 Website; 7).1 Aplikasi; 8). 1 Aplikasi.	1).Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi penggunaan dana BOS SMA dan SMK; 2). Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional SMA dan SMK; 3).Terlaksananya Supervisi Sekolah oleh 11 UPT. Pendidikan; 4).Terpilihnya anggota pengurus badan akreditasi sekolah dan madrasah; 5).Koordinasi perencanaan program Pendidikan; 6).Tersedianya Portal Informasi website Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur; 7).Tersedianya Aplikasi penunjang monev Program Kegiatan Dinas Pendidikan; 8).Tersedianya sumber informasi Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	100%		1.291.873.182	1.740.213.182	448.340.000
1.01	01	22		PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							47.564.203.600	47.864.203.600	300.000.000
1.01	01	22	02	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	1).Kupang, Jakarta ; 2).22 kabupaten/kota ; 3).22 Kab/Kota ; 4).22 Kab/Kota.	1).Jumlah GTK Berprestasi ; 2). Jumlah Guru Honorer Provinsi SMA dan SMK se- Provinsi NTT; 3).Jumlah Angka Kredit Jabatan Fungsional ; 4). Jumlah Kepala Sekolah SMA/SMK terlantik.	1). 154 orang; 2).2310 ; 3).50 orang/Kab. ; 4).100 Orang.	1).Terlaksananya penilaian terhadap Guru dan Tenaga Pendidik Berprestasi; 2).Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Pendidik SMA/SMK se-Provinsi NTT; 3). Terlaksananya penilaian angka kredit bagi Jabatan Fungsional; 4).Terlantiknya Kepala Sekolah SMA/SMK.	100		47.564.203.600	47.864.203.600	300.000.000
1.01	01	23		PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS							5.022.057.500	5.037.057.500	15.000.000

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
							Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					2	4	7	8	9	10	11	12	13
1.01	01	23	17		Peningkatan Mutu Sekolah Keberbakatan Olahraga	Kota Kupang	Jumlah siswa Keberbakatan Olahraga (SKO) yang mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar	216 Siswa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga dan Akademik siswa Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO)	100%	5.022.057.500	5.037.057.500	15.000.000
TOTAL											454.199.659.000	474.130.679.961	19.931.020.961

Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
0.00				NON URUSAN								
0.00	01			Program Setiap OPD								
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						2.862.187.725	2.759.787.725	(102.400.000)
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas kesehatan Provinsi NTT dan juga 2 UPT Labkes dan UPT Latnakes	Tersedianya Perangko serta meterai selama 12 bulan	12 Bulan	Terlayannya Perangko dan Meterai pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	12 Bulan	14.350.000	14.350.000	-
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan Provinsi NTT, UPT Latnakes dan UPT Labkes	Sumber daya air, listrik dan telepon serta internet pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT.	100%	Terlayannya ketersediaan air, listrik, telepon, internet untuk pelayanan administrasi perkantoran	100%	808.865.000	680.365.000	(128.500.000)
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Dinas Kesehatan Provinsi NTT ,UPT Latnakesdan UPT labkes	meningkatnya kinerja pegawai melalui pemeriksaan urine lengkap	257 Orang	Terlaksananya pemeriksaan urine lingkup dinkes Prov NTT	257 Orang	41.293.520	41.293.520	-
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Dinas Kesehatan Provinsi NTT, UPT Labkes, UPT Latnakes	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor melalui Penyediaan Jasa Jaminan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	Terlayannya ketersediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas pada Dinkes Provinsi dan 2 UPT	100%	264.084.957	264.084.957	-
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Kesehatan Provinsi NTT , UPT Latnakes dan UPT Labkes	Tersedianya dana untuk jasa administrasi keuangan selama 12 bulan	100%	Terlayannya Ketersedian Jasa Administrasi Keuangan pada Dinkes Prov NTT Selama 12 Bulan	100%	258.920.000	190.520.000	(68.400.000)
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Dinas Kesehatan,UPT Labkes, dan UPT Latnakes	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor mellalui Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	100%	Terlaksananya kebersihan kantor dinas provinsi selama 12 bulan	100%	420.157.500	430.157.500	10.000.000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Kesehatan Provinsi NTT, UPT Labkes,UPT Latnakes	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor melalui Penyediaan Jasa alat tulis kantor pada Dinas dan UPT	100%	Terlayannya ketersediaan ATK selama 12 bulan	100%	94.751.836	99.751.836	5.000.000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kesehatan Provinsi NTT, UPT Labkes, Dan UPT Latnakes	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor melalui Penyediaan Jasa bahan cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Terlayannya ketersediaan cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	12 Bulan	67.900.000	104.900.000	37.000.000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan Provinsi NTT, UPT Labkes dan UPT Latnakes	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor melalui Penyediaan Jasa instalasi listrik penerangan	12 Bulan	Terlayannya ketersediaan lampu pijar dan battery kering pada dinkes NTT	12 Bulan	53.420.000	60.920.000	7.500.000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan Provinsi NTT,UPT Labkes dan UPT Latnakes	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor melalui Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Terlayannya ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan	100%	21.600.000	21.600.000	-

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Kesehatan Provinsi NTT,UPT Latnakesdan UPT Labkes	Meningkatnya Pelayanan Administrasi kantor melalui Penyediaan makanan dan minuman	100%	terlayannya ketersediaan makanan dan minuman rapat dan tamu pada Dinkes Prov NTT selama 12 bulan	100%	112.000.000	112.000.000	-
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Kesehatan Provinsi NTT,UPT Labkes,dan UPT Latnakes	Meningkatnya Pelayanan Administrsi Kantor melalui rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	100%	terkoordinasinya dan terinformasinya kebijakan untuk peningkatan kualitas Dinas Kesehatan Prov NTT selama 12 bulan	100%	50.000.000	55.000.000	5.000.000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	tersedianya jasa angkutan beras pada Dinkes Prov NTT, Selama 12 Bulan	12 Bulan	terlayannya ketersediaan beras 900 Kg pada Dinkes Prov NTT Selama 12 bulan	12 Bulan	15.000.000	15.000.000	-
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Dinas kesehatan Provinsi NTT	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor melalui Kooedinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	100%	Adanya Dokumen TL,LHP	100%	50.000.000	50.000.000	-
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Dinas Kesehatan Provinsi NTT, UPT Labkes,dan UPT Latnakes	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor melalui penyediaan jasa pengamanan	12 Bulan	Terjaminnya Keamanan Kantor	12 Bulan	538.240.000	538.240.000	-
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Dinas Kesehatan Provinsi NTT, UPT Labkes, dan UPT Latnakes	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	100%	Terjaminnya Penyediaan Jasa Jaminan Sosial bagi 18 Orang Pegawai Honorer Tidak Tetap	100%	41.604.912	41.604.912	-
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Peningkatan SDM Aparatur	2 Orang	Meningkatnya SDM Aparatur	2 Orang	-	30.000.000	30.000.000
0.00	01	01	58	Pameran Pembangunan	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan melalui pameran pembangunan	100%	Terlaksananya pameran pembangunan dan karnaval pada dinas kesehatan provinsi ntt	100%	10.000.000	10.000.000	-
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						3.210.588.649	9.135.095.149	5.924.506.500
0.00	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Kota Kupang	terlaksananya pembangunan gedung asrama Latnakes	1 Gedung	tersedianya edung asrama Latnakes	1 Gedung	-	5.946.581.000	5.946.581.000
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Dinas Dan UPT Latnakes	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui penyediaan perlengkapan gedung kantor	100%	peningkatan mutu pelayanan kantor	100%	2.300.000.000	1.906.313.500	(393.686.500)
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas kesehatan provinsi NTT	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui penyediaan peralatan gedung kantor	1 Paket	Terlayannya ketersediaan alat untuk kegiatan kantor	1 Paket	179.000.000	368.326.000	189.326.000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Kesehatan Prov NTT, UPT Labkes dan UPT Latnakes	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Dinkes Prov NTT	100%	61.000.000	61.000.000	-
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan Provinsi NTT, UPT Labkes dan UPT Latnakes	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan kendaraan dinas/oprasional	100%	terlayannya ketersediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas pada Dinkes prov NTT	100%	333.088.649	392.374.649	59.286.000
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan Prov NTT, UPT Labkes dan UPT Latnakes	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100%	Terpeliharannya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	108.750.000	231.750.000	123.000.000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan Provinsi NTT ,UPT Latnakes dan UPT Labkes	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100%	Terlayannya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor selama 12 bulan	100%	131.750.000	131.750.000	-

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
0.00	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan rutin berkala jaringan kantor dan tim website	100%	terlayannya pemeliharaan rutin / berkala jaringan kantor selama 12 bulan	100%	97.000.000	97.000.000	-
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						14.000.000	24.400.000	10.400.000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan Prov NTT	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Tersedianya lakip , laporan bulanan , laporan triwulan , lap akhir keuangan	100%	14.000.000	24.400.000	10.400.000
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1.01	02			Kesehatan								
1.01	02	15		PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN						23.329.441.359	24.105.791.359	776.350.000
1.01	02	15	01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Tersedianya bufferstock obat essensial dan perbekkes lainnya	100%	Tersediannya obat dan perbekkes yang memenuhi kebutuhan masyarakat apabila terjadi Kekosongan obat dan bahan habis pakai di Kabupaten/Kota	100%	600.000.000	1.100.000.000	500.000.000
1.01	02	15	02	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Wilayah Sumba, Alor, Sabu Raijua dan Flores	7 kabupaten	Meningkatnya persentase penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Penduduk Miskin Tidak Mampu di Rumah sakit	100%	Terlaksananya Kunjungan Pelayanan Kesehatan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Kabupaten	100%	1.009.815.000	1.009.815.000	-
1.01	02	15	03	Pengawasan, Pengelolaan Obat dan Vaksin	5 kabupaten	Meningkatkan Pengawasan pangan dan bahan berbahaya	100%	Terawasinya secara efektif mutu dan keamanan produk pangan yang beredar seluruh kabupaten/kota se Prov. NTT	100%	165.342.900	165.342.900	-
1.01	02	15	04	Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat	22 kab/ kota	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas UKBM (Posyandu Poskesdes, Polindes, Desa Siaga dll) Mengembangkan kualitas peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan. Meningkatkan jumlah keluarga yang ber PHBS, Meningkatkan Rumah Tangga sehat, dan meningkatnya Perilaku Hidup bersih dan Sehat.	100%	1) Tersedia 6 orang pemenang lomba yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat , 2) Tersebarluasnya informasi kesehatan kepada masyarakat umum 3) Terbinanya 22 Pengelola Promkes di 22 Kab/Kota.	100%	642.540.000	642.540.000	-
1.01	02	15	05	Peningkatan Kualitas Pelayanan Laboratorium Kesehatan	6 puskesmas di kota kupang;UPT Laboratorium Kesehatan Prov NTT;UPT Laboratorium Kesehatan;UPT Labkes	adanya pemeriksaan bagi peserta program prolanis di sebagian puskesmas di kota kupang;pengadaan regensia kimia lingkungan;Adanya Prasana Dalam Menunjang Akreditasi Labkes;	100%;1 paket;100%;100 %	terlayannya peserta program PROLANIS di puskesmas; terpenuhinya pengadaan regensia untuk kimia lingkungan; Tercapainya jumlah Prasarana dalam Menunjang Akreditasi; Terpenuhinya Insentif UPT Labkes	100%;1 paket;100%;100 %	2.498.396.100	2.774.746.100	276.350.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
1.01	02	15	06	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	22 kab/ kota	Mendukung persiapan pembangunan Rumah Sakit Umum Vertikal Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat di RS di NTT	100%	1. Terlaksananya Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib (GRSBT) 2. Terlaksananya Penilaian RSSIB 3. Terlaksananya supervisi ke RS dalam rangka akreditasi RS 4. Terlaksananya Pengawasan, Mediasi dan Lokakarya Tim BPRS Ke 18 RSUD 5. Tersedianya dukungan Operasional terhadap BPRS Provinsi 6. Terlaksananya pendataan dan sosialisasi obat tradisional 7. Tersedianya operasional sentra pengembangan pengobatan penyakit tradisional 8. Terlaksananya bimbingan Teknis akreditasi puskesmas 9. Terlaksananya penilaian puskesmas berprestasi 10. Terlaksananya pengadaan Ambulance untuk kab. Nagekeo, Sumba Tengah Belu, Flores Timur dan Manggarai 11. - Adanya Feasibility Studi (Study Kelayakan) dan AMDAL pembangunan RSUP (Rumah Sakit Umum Pusat) - Terlaksananya rapat koordinasi terkait pembangunan RSUP - Terkonsultasinya rencana dan pelaksanaan pembangunan RSUP ke pusat	100%	11.588.650.728	11.588.650.728	-
1.01	02	15	07	Fasilitasi Operasional Rumah Sakit Jiwa	Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang	Fasilitasi Operasional Rumah Sakit Jiwa	100%	1. Tersedianya Dana Operasional Rumah Sakit Jiwa 2. Terlaksananya Pembangunan Lanjutan Gedung Rumah Sakit Jiwa 3. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Manajemen dan Pelayanan RS Jiwa 4. Terlaksananya Study Banding Pelayanan Rumah Sakit Jiwa	100%	6.710.387.631	6.710.387.631	-
1.01	02	15	08	Pengawasan Makanan dan Pangan Jajanan Anak Sekolah	22 kab/ kota	Meningkatkan Pengawasan pangan dan bahan berbahaya	22 Kab/kota	Terawasinya secara kontinue penjualan jajanan anak sekolah di 22 Kabupaten/Kota dalam menjajakan makanannya kepada anak-anak sekolah	22 Kab/kota	114.309.000	114.309.000	-
1.01	02	16		PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK						674.913.100	674.913.100	-

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
1.01	02	16	01	Pelaksanaan Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Rencana Aksi Daerah Millenium Development Goals (RAD MDGs) serta RAD Pangan dan Gizi	5 kabupaten	Pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) - Petunjuk Teknis (Juknis) Penyelenggaraan Kehatan Ibu dan Anak di Provinsi NTT	100%	1. Tersusunnya Peraturan Gubernur NTT tentang Penyelenggaraan KIA 2. Tersusunnya Juklak Juknis Penyelenggaraan KIA sebagai petunjuk operasional teknis untuk mempercepat penurunan kematian ibu, neonatal, bayi dan balita di Provinsi NTT 3. Kab/Kota (LP/LS) tersosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) - Petunjuk Teknis (Juknis) Penyelenggaraan Kehatan Ibu dan Anak di Provinsi NTT 4. Puskesmas yang melaksanakan ANC, INC, PNC di 5 Kabupaten Fokus 5. Tenaga Kesehatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan ANC terintegrasi	100%	246.146.500	246.146.500	-
1.01	02	16	03	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	22 kab/ kota	Menurunnya Kasus Kematian Ibu dan Bayi	22 Kab/kota	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Tenaga Kesehatan dalam Perencanaan Terpadu KIA (DTPS-KIBBLA) Dalam Penurunan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kupang, TTS, Rote Ndao, Malaka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Lembata, Sikka, Sabu Raijua) Kabupaten/Kota Mampu Menerapkan Sistem 2H2 Center	22 Kab/kota	230.679.000	230.679.000	-
1.01	02	16	04	Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	22 kab/ kota	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas UKBM (Posyandu Poskesdes, Polindes, Desa Siaga dll) Mengembangkan kualitas peran serta masyarakat, Kabupaten kota sehat dan Jejaring STBM dan AMPL	22 Kab/kota	1). Meningkatnya jumlah UKBM dan Pemberdayaan Masyarakat di 22 Kabupaten/Kota 2). Adanya usulan Kabupaten/kota sehta dari22 Kab/Kota 3). Adanya kesepakatan dengan Mitra terkait STBM	22 Kab/kota	198.087.600	198.087.600	-
1.01	02	19		PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (P2PL)						940.218.400	940.218.400	-

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
1.01	02	19	01	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular	22 kab/ kota	Menurunnya kejadian penyakit menular dan peyakit tidak menular	22 Kab/kota	1. Terpenuhinya bahan dan alat laboratorium pemeriksaan sediaan darah malaria dan bahan etimologi vektor malaria 2. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam program pencegahan dan pengendalian malaria melalui metode PLA 3. Tertanganinya kebutuhan bahan pendukung logistik penunjang penderita TB 4. Terpenuhinya kebutuhan vaksin rabies di kabupaten 5. Presentasi kabupaten/kota yang mencapai immunisasi dasar lengkap pada bayi 6. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	22 Kab/kota	799.818.000	799.818.000	-
1.01	02	19	02	Peningkatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / Bencana	7 kab/ kota dan 4 kab/ kota	. Menurunnya angka kesakitan dan kematian pada KLB Penyakit Menular Potensi Wabah	100%	ertanggulangnya KLB < 24 jam Meningkatkan pengetahuan petugas kab/kota dalam melaksanakan implementasi EWARS Terlaksananya Jejaring STP KLB Penyakit Menular Potensi Wabah di 4 Kabupaten	100%	140.400.400	140.400.400	-
1.01	02	20		PROGRAM PENINGKATAN GIZI						1.658.548.000	1.658.548.000	-
1.01	02	20	01	Perbaikan Status Gizi Ibu, Bayi dan Balita	22 kab/ kota	Meningkatnya strategi dalam menanggulangi masalah gizi serta peningkatan kinerja	22 Kab/kota	1. Menigkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam menerapkan Pola Makan Keluarga Berbasis Menu Gizi Seimbang untuk menurunkan angka kurang gizi 2. keluarga didampingi oleh kader di 612 desa dalam rangka menerapkan Pola Makan Keluarga Berbasis Menu Gizi 3. Adanya dukungan dari pihak eksekutif dan 5 legislatif dalam penurunan stunting di 5 kabupaten fokus 4. Adanya pelayanan dokter spesialis anak dan tim pada panti rawat gizi /TFC dalam peningkatan tatalaksana balita gizi buruk di 4 kabupaten (TTS,TTU, Belu dan Malaka) 5. Ibu hamil dan remaja putri mendapat tablet Fe 6. Semua Panti Rawat Gizi/TFC terpenuhi kebutuhan operasional terutama dalam hal PHBS	22 Kab/kota	1.658.548.000	1.658.548.000	-
1.01	02	33		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN KEPENDUDUKAN DAN OTONOMI DAERAH						79.468.320	79.468.320	-

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
1.01	02	33	01	Penguatan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	Provinsi dan Kab/Kota	1). Terwujudnya rapat koordinasi kebijakan kependudukan dan Pencatatan sipil, (2). Meningkatnya SDM aparatur di bidang pengelolaan SIAK	1 Dokumen	(1). Terwujudnya Sistem Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil di 22 Kab/Kota sesuai dengan UU 24 Tahun 2013, (2). Terwujudnya pemahaman Aparatur pengelola SIAK tingkat Prov. NTT	1 Dokumen	79.468.320	79.468.320	-
1.01	02	34		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN						9.538.530.300	9.801.327.500	262.797.200
1.01	02	34	01	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	2.100 wisudawan/8 institusi 450 mahasiswa UAP/8 Institusi 18 Institusi FK	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM baik jumlah, jenis, kualitas maupun pemerataan penyebaran	100%	1. Terlaksananya Wisuda/Angkat Sumpah/Pelantikan Institusi Pendidikan Pemkab/Swasta 2. Terlaksananya Pendampingan Persiapan dan Pelaksanaan Ujian Akhir Program 3. Terlaksananya Monev Peserta Tubel Mahasiswa Kedokteran dan Dokter Muda, mahasiswa PPDS/PPDGS-BK yang sedang mengikuti pendidikan di 18 Institusi pendidikan 4. Terlaksananya Pertemuan Tim Penilai Akreditasi Pelatihan dan Sosialisasi PPDS=PPDGS-BK dan Tugas Belajar Online PPDS/PPDGS-BK (Program Pendidikan Dokter Spesialis/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis- Berbasis Kompetensi) 5. Terlaksananya pelatihan Promosi Kesehatan Bagi Petugas Kesehatan 6. Terlaksananya Pelatihan Pembuatan SOP Klinis Maternal Neonatal untuk Bidan	100%	577.858.500	577.858.500	-
1.01	02	34	02	Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kesehatan Strategis	350 orang 22 kab/kota	-Pengangkatan dan honor PTT Daerah -Kerja praktek mahasiswa polteks di desa mandiri anggur merah; -Kajian perencanaan kebutuhan pendayagunaan, nakes strategis tingkat provinsi & kab/Kota; -Penarikan dr/drg PTT di 22 Kabupaten/Kota; -Penyelesaian Kenaikan Pangkat, Pemindahan dan Pemberhentian Tenaga PNS Pusat K di KEMENKES RI.	22 Kab/kota	-Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Pusk/Pustu di 22 kab/kota; - Meningkatkan presentase penyediaan tenaga kesehatan strategis pemerintah dan program anggur merah provinsi NTT; - Meningkatnya presentase penyediaan tenaga kesehatan strategis pemerintah -Terseselesaikannya proses penarikan dokter spesialis/dokter/dokter gig PTT nsi NTT; - Terseselesaikannya kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian tenaga PNS pusat, jabatan fungsional serta PNS daerah	22 Kab/kota	8.676.846.500	8.676.846.500	-

3

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
1.01	02	34	03	Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas SDM Kesehatan	22 kab/ kota.;6 kab Regional di ProV NTT	Terlaksananya Profesionalisme Tenaga Kesehatan Tahun 2018;Adanya kegiatan pelaksanaan uji kompetensi kenaikan Jabatan fungsional tenaga kesehatan di 6 Kab regional	22;100 %	1. Terpilihnya tenaga kesehatan teladan puskesmas 2. Tersedianya angka kredit tenaga kesehatan 3. Tersedianya tenaga kesehatan yang teregistrasi dan peningkatan pengetahuan jabatan fungsional 4. Meningkatnya ketrampilan dokter internship 5. Tersedianya Gambaran Kesehatan dan keberadaan Dokter Internsi di Prov. NTT 6. Meningkatnya kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan 7. Tersedianya Tenaga Kesehatan Jafung yang Kompeten 8. Meningkatnya Kompetensi Dokter Pendamping Internsip;Terlaksananya uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan di 6 kabupaten Regional	22;100 %	283.825.300	546.622.500	262.797.200
1.01	02	35		PROGRAM MANAJEMEN INFORMASI DAN REGULASI KESEHATAN						2.838.994.447	2.958.068.447	119.074.000
1.01	02	35	01	Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Kesehatan di Kabupaten/Kota	22 kab/ kota	Meningkatnya persentasi sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan monev terpadu di tingkat provinsi	100%	Tersedianya data informasi keadaan dan permasalahan kesehatan di NTT	100%	606.141.258	606.141.258	-
1.01	02	35	02	Penelitian/Kajian di Bidang Kesehatan	22 kab/ kota	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik	22 Kab/kota	1. Adanya soft copy aplikasi Sikda Elektronik telah di Up Grade 2. Adanya Kesepakatan pembangunan Kesehatan prov. NTT bersama Lintas Sektor dan Lintas Program 3. Adanya Kesepakatan dan tindak lanjut dalam pengembangan program kerjasama bidang kesehatan 4. Tersedianya dokumen RUK di Puskesmas renja Dinas Kesehatan kab/kota dan tersosialisasinya integrasi perencanaan desa 5. Adanya renstra Dinkes NTT tahun 2009-2023	22 Kab/kota	2.232.853.189	2.351.927.189	119.074.000
1.01	02	37		PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN						3.000.058.700	3.288.058.700	288.000.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang	
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13	
1.01	02	37	10	Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	22 kab/ kota	Adanya bantuan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin melalui BPJS Kesehatan	100%	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Jaminan Kesehatan Nasional melalui event khusus Meningkatkan pemahaman LS/LP, koordinasi dan konsultasi, sinkronisasi, harmonisasi pembiayaan kesehatan bagi masyarakat Meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi penduduk miskin di kelas III RS penyelenggara JKN Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin melalui BPJS Kesehatan	100%	3.000.058.700	3.288.058.700	288.000.000	
4.00				PENDUKUNG URUSAN									
4.00	01			Sekretariat Daerah									
4.00	01	33		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN, KEPENDUDUKAN DAN OTONOMI DAERAH						2.334.219.000	2.334.219.000	-	
4.00	01	33	15	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)	22 kab/ kota	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan administrasi kependudukan berbasis NIK Nasional melalui Database kependudukan yang terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.	100%	1. Adanya rumusan rapat, dokumen sosialisasi (media masa, DVD, Brosur, Leaflet dan booklet) 2. Adanya dokumen Pelatihan Bimtek 3. Terlaksananya penerbitan KTP-el ke 22 Kabupaten/Kota) 4. Adanya dokumen Data Kependudukan per-semester dan Buku Profile Kependudukan 5. Adanya dokumen Laporan koordinasi	100%	2.334.219.000	2.334.219.000	-	
TOTAL											50.481.168.000	57.759.895.700	7.278.727.700

RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
0.00				NON URUSAN								
0.00	01			Program Setiap OPD								
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						2.106.206.316	4.460.615.956	2.354.409.640
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG	Terlaksananya administrasi surat menyurat	12 Bulan	Terkirimnya surat rumah sakit selama 12 bulan	100%	13.680.000	13.680.000	-
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG	Terlaksananya pembayaran telepon dan langganan internet ; Terlaksananya pembayaran air ; Terlaksananya pembayaran listrik	12 Bulan	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	1.447.230.080	3.801.639.720	2.354.409.640

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Jumlah karyawan rumah sakit yang mendapat jasa pemeriksaan urine	1270 Orang	Meningkatnya status kesehatan tenaga rumah sakit	100%	127.000.000	127.000.000	-
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan operasional rumah sakit : Kendaraan Roda 6 ; Kendaraan Roda 4 ; Kendaraan Roda 2	4 Unit ; 54 Unit ; 14 Unit	Operasional Kendaraan RS Berjalan Lancar	100%	71.159.100	71.159.100	-
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Jumlah orang yang mendapat honor pengelolaan APBD	28 Orang	Pengelolaan Keuangan dan Barang Jasa RS Berjalan Lancar	100%	83.804.400	83.804.400	-
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Jumlah Bahan Cetak Kesekretariatan ; Jumlah Bahan Cetak Keuangan ; Jumlah Bahan yang difotokopi ; Jumlah Jilid	340 Blok/ Dos; 2.000 Blok/Lembar ; 50.032 Lembar; 300 Buku	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	47.508.000	47.508.000	-
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	Jumlah komponen Instalasi Listrik yang diadakan	137 Buah/Unit/Roll	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	13.000.000	13.000.000	-
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Jumlah bacaan kesehatan diadakan ; Jumlah Koran	20 Buku ; 1 Paket	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	19.000.000	19.000.000	-
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Meningkatnya Koordinasi RS di luar daerah	12 Bulan	Terlaksananya rakor/ tugas lain keluar daerah	100%	51.000.000	51.000.000	-
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Tersedianya beras Pegawai/ Barang dinas RS	12 Bulan	Kepuasan pelanggan internal rumah sakit terhadap beras pegawai/barang dinas RS	100%	57.010.000	57.010.000	-
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Meningkatnya Koordinasi RS	12 Bulan	Terlaksananya rakor/tugas lain dalam daerah	100%	51.000.000	51.000.000	-
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Meningkatnya Jaminan Kesehatan ; Meningkatnya Jaminan Ketenagakerjaan	12 Bulan	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	177 Orang	124.814.736	124.814.736	-
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						14.865.384	14.865.384	-
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Tersedianya pengelolaan informasi publik	12 Bulan	Meningkatnya informasi publik	100%	2.816.584	2.816.584	-
0.00	01	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja dan keuangan RS	100%	Tersedianya : Laporan Keuangan Akhir Tahun ; Penyusunan LAKIP,LPPD,LKPJ RS ; Laporan Bulanan Monev ; Laporan Triwulan Monev ; Laporan Semester Monev ; Laporan Tahunan Monev ; Laporan Rencana Tahunan Rumah Sakit	1 Dokumen ; 3 Dokumen ; 1 Dokumen ; 1 Dokumen ; 1 Dokumen ; 1 Dokumen ; 1 Dokumen	12.048.800	12.048.800	-
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1.01	02			Kesehatan								
1.01	02	15		PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN						13.821.235.300	18.074.332.442	4.253.097.142

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
1.01	02	15	06	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	RSUD Prof. DR.W.Z.Johannes Kupang	Jumlah masalah pasien safety/pelayanan rujukan yang diselesaikan ; Jumlah Tenaga honorer ; Jumlah Insentif Dokter Spesialis ; Jumlah Insentif Dokter Sub Spesialis ; Jumlah Rohaniwan ; Jumlah obat-obatan yang diadakan ; Jumlah Bahan Pakai Habis Ruangan ; Jumlah Bahan Pakai Habis Ruang Reagensia ; Jumlah Pakai Habis Radiologi ; Jumlah Pakai Habis Haemodialisa ; Jumlah Alat Kesehatan Pakai Habis ; Jumlah Kantong Darah ; Tersedianya makan minum pasien ; Tersedianya jumlah mobil operasional ; Tersedianya Sewa Rumah Dinas Dokter Ahli ; Tersedianya penelitian ; Tersedianya dana kegiatan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan ; Tersedianya dana pengadaan SIM untuk mengurangi kebocoran pembayaran klaim pasien	100% ; 177 Orang ; 55 Orang ; 6 Orang ; 7 Orang ; 1 Paket ; 1 Paket ; 1 Paket ; 1 Paket ; 1 Paket ; 2250 Bag ; 19.209 Hari Rawat ; 4 Unit ; 1 Tahun ; 2 Penelitian ; 1 Paket ; 1 Paket	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	13.821.235.300	18.074.332.442	4.253.097.142
1.01	02	37		PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN						49.117.933.000	49.683.082.200	565.149.200
1.01	02	37	08	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan	RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang	Perpanjangan Perijinan Radiologi ; Perpanjangan Perijinan Peralatan Pendukung ; Test Rutin Hidran Kebakaran ; Perpanjangan SIUP, SITU & HO (BPPT Kota Kupang)	1 Doumen ; 1 Dokumen ; 1 Dokumen ; 1 Dokumen	Terpenuhinya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan	100%	47.750.000	47.750.000	-
1.01	02	37	09	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	RSUD Prof. DR.W.Z.Johannes Kupang	Belanja Modal (Alat-Alat Kedokteran, Pembangunan Gedung IGD, Rehab gedung paviliun)	1 Paket	Meningkatnya kualitas pelayanan pasien	100%	48.675.183.000	49.240.332.200	565.149.200
1.01	02	37	10	Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang	Pemeriksaan dan Perawatan Jenasah/Pemakaman /Pemulangan Jenasah/Pengiriman Jenasah tidak mampu atau yang tidak terkaver dalam JAMKESDA/JKN/Pasien tidak dikenal ; Pengumuman jenazah tanpa keluarga/tidak dikenal	12 Bulan ; 12 Bulan	Terlayannya pelayanan kesehatan bagi pendudk miskin berupa : Pemeriksaan dan Perawatan Jenasah/Pemakaman /Pemulangan Jenasah/Pengiriman Jenasah tidak mampu atau yang tidak terkaver dalam JAMKESDA/JKN/Pasien tidak dikenal ; Pengumuman jenazah tanpa keluar	1 Tahun ; 1 Tahun	395.000.000	395.000.000	-
1.01	02	38		PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA						92.500.000.000	94.164.907.331	1.664.907.331
1.01	02	38	01	Peningkatan Mutu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	RSUD Prof. DR.W.Z.Johannes Kupang	Terlaksananya Pelayanan Yang Berkualitas	2018 Tahun	Meningkatnya mutu pelayanan RS	100%	92.500.000.000	94.164.907.331	1.664.907.331
TOTAL										157.560.240.000	166.397.803.313	8.837.563.313

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	4	7	8	9	10	11	12	13

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang	
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13	
0.00					NON URUSAN								
0.00 01					Program Setiap OPD								
0.00 01 01					PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					3.047.422.000	3.047.422.000	-	
0.00 01 01 01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					17.812.000	17.812.000	-	
0.00 01 01 02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					871.600.000	871.600.000	-	
0.00 01 01 04					Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS					45.200.000	45.200.000	-	
0.00 01 01 06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional					56.840.000	56.840.000	-	
0.00 01 01 07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					649.680.000	649.680.000	-	
0.00 01 01 08					Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor					280.900.000	280.900.000	-	
0.00 01 01 10					Penyediaan Alat Tulis Kantor					65.000.000	65.000.000	-	
0.00 01 01 11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					42.000.000	42.000.000	-	
0.00 01 01 12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor					15.000.000	15.000.000	-	
0.00 01 01 15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					30.000.000	30.000.000	-	
0.00 01 01 17					Penyediaan Makanan dan Minuman					50.000.000	50.000.000	-	
0.00 01 01 18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					182.500.000	182.500.000	-	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang	
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13	
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas							60.000.000	60.000.000	-
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah							212.000.000	212.000.000	
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor							204.200.000	204.200.000	-
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial							143.940.000	143.940.000	-
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal							120.750.000	120.750.000	-
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR							2.272.250.000	2.272.250.000	-
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor							150.000.000	150.000.000	-
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor							1.618.250.000	1.618.250.000	-
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional							200.000.000	200.000.000	-
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor							304.000.000	304.000.000	-
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							81.720.000	81.720.000	-
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							81.720.000	81.720.000	-
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1.01	01			Pendidikan									
1.01	01	21		PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN							440.812.000	440.812.000	-
1.01	01	21	01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu							440.812.000	440.812.000	-
1.01	03			Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang									
1.01	03	15		PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN							186.297.418.000	204.652.873.855	18.355.455.855

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
							Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					2	4	7	8	9	10	11	12	13
1.01	03	15	01		Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jalan Waelebe-baniona-waiwerang & lokasi dpal	Tersedianya Jalan dalam kondisi mantap	4,5 KM	Terbangunnya Jalan dalam Kondisi Mantap	4,5 KM	166.672.648.000	184.028.103.855	17.355.455.855
1.01	03	15	03		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi jalan Simpang Mola- Moru - Mataraben	Meningkatnya kualitas jalan	1 km	Tebangunnya jalan dalam kondisi mantap	1 km	19.624.770.000	20.624.770.000	1.000.000.000
1.01	03	16			PROGRAM PENGEMBANGAN DATA PERENCANAAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG						3.042.481.000	3.142.481.000	100.000.000
1.01	03	16	04		Pembinaan Tata Ruang Wilayah Provinsi	'	'Rapat Koordinasi Tim TKPRD Tingkat Provinsi NTT	'1 Dokumen	'Rekomendasi Tim TKPRD	'1 Dokumen	3.042.481.000	3.142.481.000	100.000.000
1.01	03	25			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR						7.852.696.800	8.663.840.522	811.143.722
1.01	03	25	01		Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah, Bantaran Sungai dan Pengendalian Banjir						4.102.696.800	4.102.696.800	-
1.01	03	25	02		Peningkatan Pelayanan BLUD Sistem Penyediaan Air Minum	kota kupang	-	-	-	-	3.750.000.000	4.561.143.722	811.143.722
1.01	03	34			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI						36.518.737.200	36.518.737.200	-
1.01	03	34	01		Peningkatan Jaringan Irigasi						21.533.591.200	21.533.591.200	-
1.01	03	34	05		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi (Ha)						9.405.096.000	9.405.096.000	-
1.01	03	34	06		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung						5.580.050.000	5.580.050.000	-
1.01	03	36			PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SMBER DAYA AIR LAINNYA SERTA PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI						22.571.400.000	28.756.255.855	6.184.855.855
1.01	03	36	04		Pembangunan Embung Kecil	Tersedianya 2 embung Kab, Belu dan 2 bh Embung di Kabupaten TTS & lokasi dpal	Tersedianya dua buah Embung di Kab.Belu dan TTS	4 Buah	Terbangunnya 2 Buah embung	2 Buah	22.571.400.000	28.756.255.855	6.184.855.855
1.01	03	38			PROGRAM MANAJEMEN DAN LAYANAN TATA LAKSANA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM						2.077.730.000	2.077.730.000	-
1.01	03	38	03		Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi dan Laboratorium Pengujian						2.077.730.000	2.077.730.000	-
TOTAL											264.202.667.000	289.654.122.432	25.451.455.432

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	4	7	8	9	10	11	12	13

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
0.00				NON URUSAN								
0.00	01			Program Setiap OPD								
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						1.115.374.000	1.139.954.000	24.580.000
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Presentase Terlayaninya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	100%	5.000.000	6.500.000	1.500.000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Terlaksananya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik	100%	201.000.000	220.000.000	19.000.000
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Terlaksananya Pelayanan Jasa Jaminan Pemeriksaan Kesehatan PNS	1 Tahun	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Jaminan Pemeriksaan Kesehatan PNS	100%	15.000.000	15.000.000	-
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya Perawatan Kendaraan Bermotor Operasional Dinas	1 Tahun	Aparatur dan Sarana Prasana Kantor	80%	21.420.000	21.420.000	-
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Terlaksananya Pemenuhan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	Persentase Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi	95%	254.994.000	254.994.000	-
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	1 Tahun	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kebersihan Kantor	100%	129.520.000	129.520.000	-
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Persentase Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	31.500.000	35.000.000	3.500.000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Kupang	Tersedianya Barang Cetak, Penggandaan dan Jilid Kantor	1 Tahun	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Cetak, Penggandaan dan Jilid Administrasi Perkantoran	100%	36.500.000	36.500.000	-
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Tersdianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penerangan Bangunan Kantor	100%	10.000.000	10.000.000	-
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedianya Bahan Bacaan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi SKPD	1 Paket	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bacaan	100%	9.000.000	9.000.000	-

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Tersedianya Makanan dan Minuman Bagi Tamu dan Rapat-rapat Rutin SKPD	2 Paket	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Terlaksana Sesuai Ketentuan	100%	20.800.000	20.800.000	-
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Kupang	Terlaksanannya Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1 Paket	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100%	120.000.000	120.000.000	
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Tersedianya Beras Jatah/ Hak Pegawai dan Keluarganya	12 Bulan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pengangkutan Beras PNS	100%	15.000.000	15.000.000	-
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kota Kupang	Terlaksananya Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	1 Paket	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi Pendampingan dan tugas lainnya di dalam daerah	95%	90.000.000	90.000.000	-
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Tenaga Pengaman Kantor dan Administrasi	8 Orang	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengamanan Kantor	100%	123.900.000	123.900.000	-
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kupang	Terpenuhinya Kebutuhan luran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	46 Orang	Persentase Pemenuhan Kebutuhan luran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	100%	31.740.000	32.320.000	580
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						407.580.000	422.580.000	15.000.000
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kanto	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Serta Kinerja dan Produktivitas Pegawai	60%	40.000.000	45.000.000	5.000.000
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasrana Kantor Serta Kinerja dan Produktivitas Pegawai	70%	67.600.000	67.600.000	-
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	Kota Kupang	Tersedianya PPeralatan Meubulair	1 Paket	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Serta Kinerja dan Produktivitas Pegawai	90%	60.000.000	60.000.000	-
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedinya Gedung Kantor Yang Memadai	1 Paket	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor	80%	120.600.000	120.600.000	-
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	1 Paket	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Bahan Bakar, Pelumas Kendaraan Secara Berkala Bagi Kendaraan Dinas Operasional	100%	119.380.000	119.380.000	-
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	Terpeliharanya Perlatan Gedung Kantor	1 Paket	-	10.000.000	10.000.000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						25.000.000	25.000.000	-

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan, Laporan Keuangan Semesteran dan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Paket	Persentase Ketersediaan Laporan Pelaksanaan, Laporan Keuangan Semesteran dan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	90%	25.000.000	25.000.000	
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1.01	04			Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman								
1.01	04	23		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN								
1.01	04	23	01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kota Kupang; Kabupaten Kupang	Terbangunnya Jalan Lingkungan Kawasan Perkantoran;Terbangunnya Pagar Pengaman Gedung Kantor; Terbangunnya Landscape dan Taman Yang Tertata; Terbangunnya Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair; Terbangunnya Gelanggang Pemuda Oepoi Kupang; Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan Perkantoran, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; Tersedianya Dokumen Andalalin Kawasan NTT Fair; Tersedianya Dokumen Ijin Lingkungan (UKL-UPL) Pengembangan Kawasan NTT Fair; Tersedianya Dokumen ANDALALIN Kawasan Gelanggang Pemuda Oepoi; Tersedianya Dokumen Ijin Lingkungan (UKL-UPL) Pengembangan Kawasan Gelanggang Pemuda Oepoi; Tersedianya Dokumen Hasil Analisa, Evaluasi Struktur dan Review Desain Gelanggang Pemuda Oepoi; Dokumen Pengurusan IMB NTT FAIR, Gelanggang Pemuda dan Kantor Inspektorat ;Kajian Umur Bangunan/Kantor Milik Pemprov; Terlaksananya Sayembara Desain Hotel Ina Boi	1 Paket	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Perkantoran; Terbangunnya Pagar Pengaman Gedung Kantor; Terbangunnya Landscape dan Taman Yang Tertata Baik; Terbangunnya Fasilitas Kawasan NTT Fair; Terbangunnya Gelanggang Pemuda Gor Oepoi Kupang; Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan Perkantoran, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; Tersedianya Dokumen ANDALALIN kawasan NTT Fair; Tersedianya Dokumen Ijin Lingkungan (UKL-UPL) Kawasan NTT Fair; Tersedianya Dokumen ANDALALIN Kawasan Gelanggang Pemuda Oepoi; Tersedianya Dokumen Ijin Lingkungan (UKL-UPL) Pengembangan Kawasan Gelanggan Pemuda Oepoi; Tersedianya Dokumen Hasil Analisa Evaluasi Struktur dan Review Desain Gelanggang Pemuda Oepoi; Tersedianya Dokumen IMB NTT FAIR, Gelanggang Pemuda dan Kantor Inspektorat ; Kajian Umur Bangunan/Kantor Milik Pemprov; Terlaksananya Sayembara Desain Hotel Ina Boi	1 Paket	66.923.260.000	41.891.560.000	(25.031.700.000)

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang	
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13	
1.01	04	23	02	Pembangunan Perumahan dan Pemukiman	22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Data Teknis Perencanaan Perumahan, Permukiman dan Keciptakaryaan; Terlaksananya Rumah Yang Layak Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Terlaksananya Peralatan/Alat Ukur; Terlaksananya Jalan Lingkungan Di Kawasan Kumuh Perkotaan dan Perbatasan; Terlaksananya Penyediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum; Terlaksananya Pembangunan Gedung/Monumen; Survey, Pemetaan Lokasi Dan Kelembagaan Untuk Pengadaan Dan Distribusi Mesin Air Minum; RTBL Flobamora Rumah Pancasila; Terlaksananya Koordinasi Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni;Terlaksananya pembangunan trotoar di jalan Provinsi;	1 Paket	Tersedianya Data Teknis Perencanaan Perumahan, Permukiman dan Keciptakaryaan; Tersedianya Rumah Yang Layak Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Tersedianya Peralatan/Alat Ukur; Tersedianya Jalan Lingkungan Di Kawasan Kumuh Perkotaan dan Perbatasan; Terlaksananya Penyediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum; Terlaksananya Pembangunan Gedung/Monumen; Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; Tersedianya Data Survey dan Pemetaan Lokasi Dan Kelembagaan Untuk Pengadaan Dan Distribusi Mesin Air Minum; Tersedianya RTBL Kawasan Monumen Flobamor Rumah Pancasila; Terlaksananya Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni; Terlaksananya Pembangunan Trotoar di Jalan Provinsi;	1 Paket	48.100.866.000	76.950.866.000	28.850.000.000	
TOTAL											116.572.080.000	120.429.960.000	3.857.880.000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	4	7	8	9	10	11	12	13

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
0.00				NON URUSAN								
0.00	01			Program Setiap OPD								
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						803.547.456	743.547.456	(60.000.000)
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Tersedianya MAtelai dan Paket Pengiriman Surat ke Direktorat POL PP. Ditjen Administrasi Wilayah Kemendagri dan Satpol PP Kab/kota selama 1 tahun	1 Tahun	Prosentase Kelancaran Administrasi Surat menyurat	100%	5.000.000	5.000.000	-
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Terlaksananya pembayaran Air, Listrik, Telpn/aksimi dan Internet	1 Tahun	Presentase kelancaran pembayaran Airr, Listrik, Telepon/Faksimil dan Internet	100%	63.000.000	63.000.000	-
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS berupa tes Urine bagi ASN	132 ASN Satpol PP Provinsi NTT	Presentase Pemenuhan Jasa Jaminan Pemelihaaan Kesehatan ASN	100%	13.200.000	13.200.000	-
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan Dinas Operasional Satpol PP	Roda 6 (1 unit), Roda 4 (4 Unit) Roda 2 (5 unit)	Prosentase kelancaran pembayaran pajak kendaraan Dinas/Operasional Satpol PP sesuai waktu yang ditentukan	100%	10.000.000	10.000.000	-
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Tersedianya Jasa tenaga pengelola APBD, Panitia Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa, Petugas pengentry Aplikasi SIPKD, Uang Lembur	21 orang, 3 Sub Bagian, 1 Tahun	Presentase pengelolaan dan pelayanan Administasi Keuangan dan Perencanaan	100%	75.500.000	75.500.000	-
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Cleaning Service, alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	3 orang, 1 paket	Presentase Peningkatan Pelayanan Kebersihan Kantor yang nyaman, api dan indah	100%	64.656.850	64.656.850	-
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Prresentasi Peningkatan Pelayanan dan Kebutuhan akan ATK	100%	54.038.000	54.038.000	-
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Kupang	Tersedianya kebutuhan cetak,, penggandaan serta jilid bahan-bahan administrasi perkantoan	1 Tahun	Presentasi peningkatan kuallitas pelapooan dan peayanan Administrasi perkantoran	100%	14.633.166	14.633.166	-
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bola lampu listrik 60 buah dan 10 kabel roll, fiting lampu, skar/stop kontak, ack, baterai dll 1 paket	Presentasi kebutuhan komponen llistrik/penerangan bangunan kantor	100%	10.000.000	10.000.000	-
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedianya surat kabar/majalah buku dan Peraturan Perundang-Undangan	Media cetak (Pos Kupang, Timor Express, Vivtori News dan buku perundang-undangan tentang Polisi Pamong Praja	Presentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan serta informasi peraturan perundang-undangan	100%	10.000.000	10.000.000	-

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Tersedianya kebutuhan makan dan minum untuk rapat dan tamu	2 Paket	Presentasi pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman sesuai kebutuhan	100%	77.500.000	77.500.000	-
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Tersedianya kebutuhan perjalanan Dinas untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	Presentase sinkronisasi program dan kegiatan antara Pusat dan Daerah	100%	50.000.000	50.000.000	-
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Tersedianya penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	1 Tahun	Presentasi pemenuhan kebutuhan pengangkutan beras dan barang dinas	100%	10.000.000	10.000.000	-
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pendampingan dan tugas lainnya dalam daeah	22 Kab/kota	Presentase pemenuhan kebutuhan koordinasi, evaluasi, pendampingan serta tugas lainnya dalam daerah di Kab/Kota se - NTT	100%	50.000.000	50.000.000	-
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya tenaga pengaman aset sarana dan prasarana bangunan pemerintah Provinsi	1 Tahun	Persentase peningkatan pengamanan terhadap aset pemerintah Provinsi NTT	100%	289.520.000	229.520.000	(60.000.000)
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kera	9 orang, 12 Bulan	Presentase pemenuhan kebutuan iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemmerintah dengan Perjanjian Kerja	100%	6.499.440	6.499.440	-
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						375.551.000	631.351.000	255.800.000
0.00	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Tersedianya sarana kerja yang memmdai berupa Motor 250 CC untuk Pengawalan Gubernur dan Wakil Gubernur 250 CC	2 Unit Sepeda Motor beserta kelengkapan Patwal dan Logo Pol PP	Presentase Peningkatan kinerja pelaksanaan tugas pengawalan Gubernur dan Wakil Gubernur	100%	180.000.000	360.000.000	180.000.000
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kupang	Tersedianya peralatan pengamanan gedung kantor dan kegiatan kepala daerah	7 Unit	Tercapainya kualitas pengamanan gedung kantor dan kegiatan kepala daerah	100%	-	20.800.000	20.800.000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Terpeliharanya pintu, jendela, gedung kantor	12 Bulan	Presentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	100%	12.500.000	12.500.000	-
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai dan mendukung serta membantu kelancaran operasional kantor roda 6 (enam) 1 unit, roda 4 (empat) 4 unit dan roda 2 (dua) 5 unit	1 buah kendaraan roda 6 (enam), 4 buah kendaraan roda 4 (empat), 5 buah kendarraan roda 2 ((dua)	Presentase pemenuhan jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar serta pelumas kendaraan secara berkala bagi kendaraan dinas/operasional	100%	163.051.000	213.051.000	50.000.000
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terpeliharanya perlengkapan kantor	AC dan mesin potong rumput	Presentase pemenuhan perawatan perlengkapan kantor	100%	10.000.000	15.000.000	5.000.000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terpelihara peralatan gedung kantor	Komputer, Printer	Presentasi pemenuhan kebutuhan pemelihaaan peralatan kantor	100%	10.000.000	10.000.000	-
0.00	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						-	14.000.000	14.000.000
0.00	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kupang	Tersedianya pakaian yang memadai bagi petugas Patwal	8 Set	Terpenuhinya penyediaan pakaian petugas Patwal	100%	-	14.000.000	14.000.000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						22.040.000	22.040.000	-

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Tersedianya informasi pelaksanaan dan evaluasi kinerja Satpol PP Provinsi NTT	Dokumen (Laporan)	Presentase kebutuhan laporan pelaksanaan dan evaluasi	100%	22.040.000	22.040.000	-
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1.01	01			Pendidikan								
1.01	01	21		PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN						75.450.400	75.450.400	-
1.01	01	21	01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	18 Kab/Kota (Kab. TTU, Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Alor, Kab. Flores Timur, Kab. Sikka, Kab. Ende, Kab. Ngada, Kab. Nagekeo, Kab. Manggarai Timur, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, Kab. Lembata, Kab. Sumba Timur, Kab. Kupang)	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat	1 Tahun	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Terpadu Program/ Kegiatan di Kab/ Kota se- NTT	100%	75.450.400	75.450.400	-
1.01	05			Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1.01	05	19		PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN						1.903.527.944	2.254.700.944	351.173.000
1.01	05	19	02	Pelatihan/Bimbingan Teknis bagi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	Kota Kupang, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Barat dan Jakarta	- Meningkatnya pemahaman Aparatur Bidang Linmas tentang tugas pokoknya	1 kali/44 orang	Presentasi ketesediaan Aparatus Bidang Linmas	100%	95.593.280	95.593.280	-
1.01	05	19	05	Pembinaan dan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) bagi Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat)	Kab. Manggarai Bote Ndao dan Jakarta	Terlaksananya Pembinaan dan Penertiban Penyakit Masyarakat di 2 Kab/Kota se Provinsi NTT	2 Kab. Kab. Manggarai Barat & Kab. Rote Ndao	Terwujudnya situasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kondusif	100%	61.333.304	61.333.304	-
1.01	05	19	07	Peningkatan Fungsi Pemeliharaan Trantibum	Kota Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Ende, Kab. Ngada, Kab. Sikka, Kab. Manggarai Timur, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua, Kab. Lembata, Kab. Alor, Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Barat	Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kesemampuan dan Peraturan Baris-Berbaris Bagi Anggota Satpol PP Provinsi, Kabupaten Kupang dan Kota Kupang	1 Kali Bimtek 40 Orang	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Satpol PP Provinsi dan Kab/Kota dalam memahami tupoks	100%	428.727.000	550.000.000	121.273.000
1.01	05	19	08	Pembekalan, Konsolidasi dan Penyuluhan Anggota Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. TTS, Kab. Sumba Tengah, Kab. Ngada, Kab. Manggarai, Kab. Nagekeo	Terlaksananya Pembekalan, Konsolidasi dan Penyuluhan bagi Kasatlinmas Kab/Kota se - Provinsi NTT	150 Satlinmas	Prosentase pemahaman Kesatlinmas terhadap Tupoksi	100%	93.185.160	93.185.160	-
1.01	05	19	09	Peningkatan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Kenyamanan lingkungan	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. Rote Ndao, Kab. Alor, Kab. Sikka, Kab. Ende, Kab. Nagekeo, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Tengah, Kab. Manggarai Timur, Kab. TTU, Kab. Belu, Kab. Sabu Raijua, Kab. Malaka, Kab. :	Tersedianya tenaga Pengaman aset dan piket Pemerintah Provinsi : Tersedianya tenaga pengaman di dalam gedung sasando Gubernur NTT	1 Tahun : 30 Orang	Prosentase Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat : meningkatnya keamanan di dalam gedung sasando kantor Gubernur NTT	100 % : 100 %	996.100.000	1.200.000.000	203.900.000
1.01	05	19	13	Perayaan HUT Polisi Pamong Praja dan Linmas Tingkat Nasional dan dan Rakornas Polisi Pamong Praja Tingkat Nasional serta Tingkat Provinsi Tahun 2018	Kab. Nagekeo dan Provinsi Kalimantan Selatan	Terselenggaranya HUT ke 68 Satpol PP dan HUT ke 56 Linmas Tingkat Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan	6 orang 22 orang	Prosentasi Pelaksanaan HUT ke 68 Satpol PP dan HUT 56 Linmas Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi	100%	176.700.000	176.700.000	-

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang	
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13	
1.01	05	19	14	Penyusunan Profil Wilayah Berpotensi Terhadap Ancaman Kebakaran	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Alor, Kab. Lembata, Kab. Flores Timur, Kab. Sikka, Kab. Ende, Kab. Ngada, Kab. Rote Ndao	Terlaksananya Pengambilan data dan Penyusunan Provil Wilayah Berpotensi terhadap ancaman Kebakaran	13 Kab/kota	Prosentase Terlaksananya Pengambilan Data dan Penyusunan Profil Wilayah Berpotensi terhadap ancaman kebakaran di Kab/Kota se-NTT	100%	51.889.200	77.889.200	26.000.000	
1.01	05	20		PROGRAM PENINGKATAN PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH						597.676.200	665.676.200	68.000.000	
1.01	05	20	01	Pelatihan Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tingkat Pusat dan Bimbingan Teknis PPNS	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya Bimtek PPNS di daerah	1 Kali Bimtek 30 Orang	Meningkatnya SDM PPNS, meningkatnya ketaatan terhadap Perda dan Perkada dan meningkatnya PAD Provinsi	100%	108.318.000	108.318.000	-	
1.01	05	20	02	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daera dan Produk Hukum	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Alor	Terlaksananya Pembinaan,Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Produk Hukum	1 Tahun	Persentase pelaksanaan Pembinaan,Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Produk Hukum pada 10 Kabupaten Pelanggaran Perda dan Produk Hukum pada 10 Kabupaten se Provinsi NTT	100%	40.859.040	40.859.040	-	
1.01	05	20	03	Peningkatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. TTS, TTU, KAb. Belu, Kab. Malaka, Kab. Nagekeo dan Jakarta	Terlaksananya Operasi Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	1 Tahun	1. Meningkatnya Operasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah di 7 Kab/Kota	7 Kab/kota	344.813.000	412.813.000	68.000.000	
1.01	05	20	04	Peningkatan Fungsi Sekretariat PPNS	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Barat, Kab. Ende dan Jakarta	Terlaksananya Pembinaan / Penyuluhan Pelaksanaan Peraturan Daerah	1 Tahun	Terlaksananya Pembinaan / Penyuluhan Pelaksanaan Peraturan Daerah	9 Kabupaten	103.686.160	103.686.160	-	
TOTAL											3.777.793.000	4.406.766.000	628.973.000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	4	7	8	9	10	11	12	13

Dinas Sosial

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang			
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13			
0.00					NON URUSAN										
0.00				01	Program Setiap OPD										
0.00				01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					1.974.516.837	2.020.816.837	46.300.000		
0.00				01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Terselenggaranya Pelayanan Kepada Pemerintah dan Masyarakat Penyandang Masalah Sosial	12 Bulan	Tersedianya Pelayanan Kantor Terhadap Pemerintah dan Masyarakat	1 Tahun	15.230.000	15.230.000	-
0.00				01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sumba Barat, Kab. Sikka	Terselenggaranya Pelayanan Komunikasi Listrik dan Air	1 Tahun	Terpenuhinya Pelayanan Kantor terhadap Pemerintah dan Masyarakat	1 Tahun	538.500.600	571.800.600	33.300.000
0.00				01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sumba Barat, Kab. Sikka	Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 Tahun	Terpenuhinya Pelayanan Kantor terhadap Pemerintah dan Masyarakat	1 Tahun	153.999.125	153.999.125	-
0.00				01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat	Terselenggaranya Jaminan atas Barang Daerah	1 Tahun	Terpenuhinya pelayanan kantor terhadap pemerintah dan masyarakat	1 Tahun	412.030.000	412.030.000	-
0.00				01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang, Kab. Kupang, Lembata, Sumba Timur dan Sikka	Terselenggaranya pemenuhan kenuhutan penyedia jasa dan bahan kebersihan kantor	1 Tahun	Terpenuhinya pekayanan kantor terhadap pemerintah dan masyarakat	1 Tahun	160.215.950	160.215.950	-
0.00				01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya pelayanan kantor terhadap pemerintah dan masyarakat	1 Tahun	50.015.632	50.015.632	-
0.00				01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Kupang, Kab. Kupang, Lembata, Sumba Barat dan Sikka	Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat penyandang masalah sosial	12 Bulan	Terpenuhinya pelayanan kantor terhadap pemerintah dan masyarakat	12 Bulan	135.000.000	135.000.000	-
0.00				01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang, Kab. Kupang, Lembata, Sumba Barat dan Sikka	Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dan penyandang masalah sosial	12 Bulan	Terpenuhinya pelayanan kantor terhadap pemerintah dan masyarakat	12 Bulan	36.046.000	44.046.000	8.000.000
0.00				01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang, Kab. Kupang, Lembata, Sumba Timur dan Sikka	Terselenggaranya pelaksanaan program dan kegaitan melalui media massa	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan berita	12 Bulan	19.750.000	19.750.000	-
0.00				01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang, kab. Kupang, Lembata, Sumba Barat dan Sikka	Terselenggaranya Pelayanan Kepada Pemerintah dan Masyarakat Penyandang Masalah Sosial	12 Bulan	Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman tamu dan rapat	12 Bulan	104.000.000	104.000.000	-
0.00				01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar daerah	Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat penyandang masalah sosial	1 Tahun	Terpenuhinya pelayanan kantor kepada masyarakat	1 Tahun	50.000.000	50.000.000	-
0.00				01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa panganngkutan beras dan barang dinas	12 Bulan	Terpenuhinya pelayanan kantor kepada masyarakat	12 Bulan	39.690.250	44.690.250	5.000.000
0.00				01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Dalam daerah	Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat penyandang masalah sosial	1 Tahun	Terpenuhinya pelayanan kantor kepada masyarakat	1 Tahun	100.000.000	100.000.000	-
0.00				01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Terselenggaranya penyediaan kebutuhan jasa penagaman kantor	1 Tahun	Terpenuhinya pelayanan kantor terhadap pemerintah dan masarakat	1 Tahun	100.100.000	100.100.000	/

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Terpenuhinya jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi tenaga honorer (pegawai tidak tetap)	1 Tahun	Persentasi pemenuhan kebutuhan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi tenaga honorer / pegawai tidak tetap	1 Tahun	59.939.280	59.939.280	-
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						1.295.800.000	1.320.800.000	25.000.000
0.00	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Kota Kupang dan Kab. Sikka	Tersedianya sarana gedung kaantor yang memadai bagi penghuni panti	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan penghuni panti	1 Paket	470.000.000	470.000.000	-
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terselenggaranya pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	115.000.000	115.000.000	-
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang, Kab. Kupang, Lembata, Sumba Barat dan Sikka	Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	20.000.000	20.000.000	-
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang, Kab. Kupang, Lembata, Sumba Barat dan Sikka	Terselenggaranya pemenuhan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	Terselenggaranya pelayanan kantor terhadap pemerintah dan masyarakat	12 Bulan	90.000.000	90.000.000	-
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota kupang	Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan terhadap pemerintah dan masyarakat	12 Bulan	800	25.800.000	25.000.000
0.00	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kota Kupang, Kab. Kupang, Lembata, Sumba Barat dan Sikka	Terselenggaranya kegiatan rehab sedang berat gedung kantor, konstruksi jalan dan pemagaran	100%	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan terhadap pemerintah dan masyarakat	100%	600.000.000	600.000.000	-
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						20.000.000	20.000.000	-
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja perangkat daerah	100%	Tersedianya capaian laporan kinerja perangkat daerah	100%	20.000.000	20.000.000	-
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1.01	01			Pendidikan								
1.01	01	21		PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN						98.181.000	98.181.000	-
1.01	01	21	01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	22 kab/kota	terlaksananya kegiatan monev terpadu dinas sosial	22 Kab/kota	tersedianya data profil dinas (data PKH, KUBE/UEP, subsidi LKS, Alumni diklat dan PMKS PSKS	22 Kab/kota	98.181.000	98.181.000	-

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
1.01	06			Sosial								
1.01	06	15		PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA						996.553.678	1.542.632.678	546.079.000
1.01	06	15	02	Peningkatan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	22 kab/kota dan Jakarta	1. Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pemberian sembako kepada keluarga miskin; 2. terlaksananya verifikasi calon penerima bantuan ; 3. Terlaksananya koordinasi distribusi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai	3200; 22; KK	1. terselurnya bantuan sembako bagi 200 keluarga miskin; 2. terverifikasinya 3.500 KUBE fakir miskin ; 3. Terkoordinasinya distribusi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai	1 Tahun	340.980.178	887.059.178	546.079.000
1.01	06	15	03	Peningkatan Sinergitas Program Keluarga Harapan (PKH)	22 kabupaten/kota	meningkatnya sinergitas program keluarga harapan untuk semua instnsi terkait dan pendamping	22 Kab/kota	Tersedianya data, monografi dan profil program keluarga harapan yang faktual	22 Kab/kota	655.573.500	655.573.500	-
1.01	06	16		PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL						12.717.854.890	12.717.854.800	(90)
1.01	06	16	09	Peningkatan Keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Penghuni Panti Asuhan/Panti Jompo dan Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	22 kabupaten/kota dan luar daerah	1). Terselenggaranya pelayanan bagi 569 klien di 7 panti lingkup dinas sosial 2). Terlaksananya bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan bagi 60 ODHA/OHIDA 3). Terlaksananya pelayanan untuk 60 anak terlantar 4). terfasilitasinya penyelenggaraan hari lanjut usia nasional tingkat provinsi	1 Tahun	1). Terselenggaranya pelayanan bagi 569 klien di 7 panti lingkup dinas sosial 2). Terlaksananya bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan bagi 60 ODHA/OHIDA 3). Terlaksananya pelayanan untuk 60 anak terlantar 4). terfasilitasinya 100 orang lanjut usia pada penyelenggaraan hari lanjut usia nasional tingkat provinsi	1 Tahun	12.317.854.890	12.317.854.800	(90)
1.01	06	16	11	Perlindungan dan Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan	Kota Kupang dan luar daerah	Terfasilitasinya operasional RPTC, pemulangan pekerja migran yang bermasalah	1 Tahun	Terfasilitasinya proses pemulihan dan pemulangan dan pemulangan KTK dan PM bermasalah	1 Tahun	250.000.000	250.000.000	-
1.01	06	16	12	Peningkatan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyakit Kronis dan Kusta	Kab. Ngada dan Manggarai	Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi eks penyakit kronis dna kusta	30 Orang	meningkatnya keterampilan eks penyakit kronis dna kusta	30 Orang	150.000.000	150.000.000	-
1.01	06	18		PROGRAM PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL LAINNYA						336.417.095	336.417.095	-
1.01	06	18	01	Penanganan Deportasi dan Orang Terlantar	Kota Kupang	Tertanganinya masalah deportasi dan orang terlantar	100%	Tertanganinya masalah deportasi dan orang terlantar	100%	136.417.095	136.417.095	-
1.01	06	18	02	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Kab. Rote Ndao, Sumba Tengah	Adanya 40 eks Narapidana yang mendapat latihan keterampilan berusaha	100%	Meningkatnya kesejahteraan sosial eks NAPI	40 Orang	200.000.000	200.000.000	-
1.01	06	20		PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL						1.535.787.500	1.635.787.500	100.000.000
1.01	06	20	01	Peningkatan Kualitas SDM Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial	Kab. Alor, Lembata, Rote Ndao, Ngada, Sabu Raijua dan Jakarta	Terlaksananya penyuluhan sosial keliling terselenggaranya diklat peningkatan kualitas SDM TAGANA	100%	Terwujudnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi 70 TAGANA	100%	465.787.500	465.787.500	-

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang	
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				Target
1				2	4	7	8	9		10	11	12	13
1.01	06	20	02	Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Kota kupang	1. Terlaksananya kegiatan peringatan hari pahlawan dengan instransi terkait; 2. terselenggaranya kegiatan HKS	2 Keg	1. meningkatnya pemahaman oleh orang, instansi terkait dan pelajar terhadap nilai nilai kepahlawanan; 2. terselenggaranya peringatan HKS	2 Keg	150.000.000	150.000.000	-	
1.01	06	20	03	Peningkatan Kapasitas dan Peran serta Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Kota Kupang	Terlaksananya kegiatan jambore taruna siaga bencana regional wilayah	500 Orang	Meningkatnya peran aktif TAGANA	500 Orang	920.000.000	1.020.000.000	100.000.000	
TOTAL											18.975.111.000	19.692.489.910	717.378.910

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
0.00				NON URUSAN								
0.00	01			Program Setiap OPD								
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						1.080.135.200	1.109.135.200	29.000.000
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Tersedianya jasa surat menyurat Dinas Nakertrans Prov. NTT	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	12 Bulan	90.080.000	90.080.000	-
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Tersedianya jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik di Dinas Nakertrans, UPT PTK dan UPT PPT	3 Unit	Meningkatnya pelayanan	3 Unit	285.200.000	322.200.000	37.000.000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 14 roda 4 dan 35 Roda 2	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	12 Bulan	19.953.910	11.953.910	(8.000.000)
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Dinas Nakertrans, UPT PTK dan UPT PPT	45 Orang	Meningkatnya pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	12 Bulan	287.869.340	287.869.340	-
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor di Dinas, UPT PTK dan UPT PPT	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	100%	41.854.250	41.854.250	-
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas Nakertrans Prov. NTT, UPT PTK dan UPT PPT	3 Unit	Meningkatnya pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	12 Bulan	56.998.500	56.998.500	-
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Kupang	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	12 Bulan	25.000.000	25.000.000	-
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik di Dinas Nakertrans Prov. NTT, UPT PTK dan UPT PPT	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	3 Unit	15.000.000	15.000.000	-
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang Undangan di Dinas Nakertrans Prov. NTT	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	12 Bulan	14.400.000	14.400.000	-
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk Rapat Pegawai dan tamu	179 Orang	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Nakertrans Prov. NTT	12 Bulan	26.000.000	26.000.000	-

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	12 Bulan	Meningkatnya Koordinasi dan Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketyransmigrasian	100%	50.000.000	50.000.000	-
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Terangkutnya beras pegawai	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan pangan Pegawai Dinas Nakertrans Prov. NTT	198 Orang	26.000.000	26.000.000	-
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 Kabupaten / Kota se NTT	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas dengan Pemerintah Kabupaten / Kota	1 Tahun	Meningkatnya Koordinasi dan Pelaksanaa Tugas	12 Bulan	14.000.000	14.000.000	-
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pengamanan kantor Dinas Nakertrans Prov. NTT	5 Orang	Meningkatnya pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	1 Tahun	100.150.000	100.150.000	-
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Melalui Premi Asuransi Iuran Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan	25 Orang	Terjaminnya Penyediaan Jasa Jaminan Sosial bagi 25 orang Pegawai Honorer Tidak Tetap	12 Bulan	17.629.200	17.629.200	-
0.00	01	01	58	Pameran Pembangunan	Kota Kupang	Terselenggaranya Pameran Pembangunan	1 Keg	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	1 Tahun	10.000.000	10.000.000	-
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						310.800.000	310.800.000	-
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkla gedung kantor	4 Unit	Meningkatnya pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	1 Tahun	45.000.000	45.000.000	-
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional roda 4 / 10 unit, roda 2/25 unit	35 Unit	Meningkatnya pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	12 Bulan	140.200.000	140.200.000	-
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	12 Bulan	25.000.000	25.000.000	-
0.00	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Dinas Nakertrans Prov. NTT	1 Paket	Meningkatnya kenyamanan dan Pelayanan Kepada Masyarakat	1 Tahun	-	100.600.000	100.600.000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						111.520.000	111.520.000	-
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 240 buku, Laporan Bulanan 240 buku, Laporan Tahunan 20 buku, Laporan LKPJ 10 buku, Lakip 20 buku, Program Kerja 30 buku	6 Laporan	Meningkatnya pemantauan, evaluasi, pengendalian kegiatan SKPD	12 Bulan	111.520.000	111.520.000	-
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
1.02	01			Tenaga Kerja								
1.02	01	16		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KETENAGAKERJAAN						3.123.220.000	3.523.220.000	400.000.000
1.02	01	16	03	Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan Produktivitas	Kota Kupang, Kabupaten Manggarai dan Sumba Barat daya	Terlaksananya Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) 20 orang; Terlaksananya Pelatihan Kewirasaahaan Baru 40 orang	60 Orang	Meningkatnya produktivitas Usaha sektor Informal ; Terbentuknya Wirausahawan Baru atau pemula	60 Orang	208.000.000	208.000.000	-

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
1.02	01	16	04	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Kota Kupang, Kab. Kupang, Belu, Alor, Sikka, Flores Timur, Ngada dan Sumba Barat	Terlaksananya bimtek penerapan standar LPK 25 orang; Terlaksananya Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja di UPT PTK Kupang 144 orang; Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja kerjasama pihak ketiga 50 orang	219 Orang	Meningkatnya mutu LPK 25 orang; Meningkatnya ketrampilan pencari kerja 144 orang; Meningkatnya ketrampilan tenaga kerja 50 orang	219 Orang	818.030.000	818.030.000	-
					Luar Negeri	Pembentukan tim seleksi, penyusunan juklak dan juknis beasiswa luar negeri	2 Keg	Meningkatnya pemahaman pencari kerja tentang prosedur beasiswa ke luar negeri	75%	-	150.000.000	150.000.000
1.02	01	16	05	Peningkatan Sarana dan Prasarana BLK (Balai Latihan Kerja)	Kota Kupang	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana di UPT PPT Kupang (rehab gedung asrama/aula, Rehab Rumah Pompa Air, Rehab Tower dan pompa Submesible, Rehab Pagar Kantor; Tersusunnya Perencanaan Pembangunan BLK Luar Negeri 1 dokumen	5 Keg	Meningkatnya pelayanan di UPT PPT Kupang; Tersedianya dokumen dan perencanaan	5 Keg	1.413.790.000	1.413.790.000	-
1.02	01	16	06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	22 Kabupaten / Kota se NTT	Terkendalnya program dan Kegiatan Pelatihan Kerja; Terlaksananya Monitoring Tingkat Perkembangan Transmigran pada Kimtrans Bina dan Pasca Bina	2 Keg	Meningkatnya Pengendalian Program dan Kegiatan Platihan Kerja di Kab/Kota; Tersusunnya laporan hasil Monev untuk kebutuhan perencanaan Latihan kerja ; Tersedianya data perkembangan Transmigrasi pada Kimtrans Bina dan Paska Bina	2 Keg	140.000.000	140.000.000	-
1.02	01	16	07	Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja	Kota Kupang	Terlaksananya Penyusunan Informasi Pasar Kerja 12 bulan / 360 buku; Tersedianya Booklet Informasi ketenagakerjaan 12 bulan / 540 buku; Tersedianya Glosarium Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dokumen/50 buku; Terlaksananya Rakor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 1 kegiatan; Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja periode 2018 - 2023 1 dokumen / 100 buku; Terpublikasinya Masalah Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 1 paket; Terlaksananya Rakor Penanganan Permasalahan TKI Asal NTT 1 kegiatan 22 Kab/Kota	7 Keg	Terselenggaranya Penyusunan Informasi Pasar Kerja yang lengkap dan up to date; Tersajinya Booklet Informasi Ketenagakerjaan ; Tersajinya Glosarium Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; Terjalinnya keterpaduan gerak langkah pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ; Tersusunnya Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja periode 2018 - 2023; Terpublikasinya Masalah Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; Tercapainya Sinergitas Penanganan Permasalahan TKI Asal NTT	7 Keg	543.400.000	543.400.000	-
					Kota Kupang	Penyusunan kajian peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vocasi di Luar Negeri	1 Keg	Tersedianya dokumen kajian peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vocasi di Luar Negeri	1 Dokumen	-	250.000.000	250.000.000
1.02	01	17		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						1.618.730.000	1.968.730.000	350.000.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
1.02	01	17	01	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	22 Kabupaten / Kota Se NTT dan Luar NTT serta Negara Malaysia	Terlaksananya Penanganan TKI/TKI/AKAD/AKAN Non Prosedural dan bermasalah 1 paket; Terlaksananya Rapat Teknis Penempatan TK keluar NTT 1 kabupaten, Terlaksananya Sosialisasi Mekanisme Penempatan dan Perlindungan TK 2 kabupaten; Terlaksananya Publikasi Mekanisme Penempatan dan Perlindungan TKI 22 kab/kota; Terlaksananya Operasional layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan TKI 1 unit dan Bimtek Operator LTSA di Kab/Kota 9 kab; Terlaksananya Pemeriksaan PPTKIS oleh Peg. Pengawas 8 kab; Terlaksananya Operasional Posko Satgas TPPO di Bandara El Tari dan Pelabuhan Tenau 2 lokasi; Terlaksananya rehabilitasi Ruang Imigrasi, Ruang Kesehatan, Ruang Tunggu dan Selasar 3 unit; Terlaksananya Pemberian Santunan bagi TKI meninggal dan dipulangkan ke NTT 1 paket; Terlaksananya Pendataan TKI Asal NTT di Negara Malaysia 1 paket	10 Keg	Tertanganinya TKI/TKI/AKAD/AKAN Non Prosedural dan bermasalah; Terpadunya Penanganan Penempatan TK keluar NTT, Tersosialisasi Mekanisme Penempatan dan Perlindungan TK; Terpublikasinya Mekanisme Penempatan dan Perlindungan TKI; Beroperasinya Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan secara optimal; Meningkatnya pengawasan PPTKIS ; Beroperasinya Posko Satgas TPPO di Bandara El Tari dan Pelabuhan Tenau secara optimal; Terehabilitasi Ruang Imigrasi, Ruang Kesehatan, Ruang Tunggu dan Selasar; Terbantunya keluarga TKI meninggal dan dipulangkan ke NTT; Berhasilnya Pendataan TKI Asal NTT di Negara Malaysia	10 Keg	1.073.800.000	1.073.800.000	-
1.02	01	17	04	Peningkatan Kemitraan Tripartit dalam Penyelesaian Kasus Tenaga Kerja	22 Kabupaten / Kota se Nusa Tenggara Timur	Terselesaikannya Kasus Tenaga Kerja di NTT 1 paket; Terlaksananya Sidang Dewan Pengupahan 5 kalidan Lembaga Kerjasama Tri Partit 3 kali; Terbangunnya Posko May Day Tahun 2018 250 orang	3 Keg	Berkurangnya kasus tenaga kerja di NTT; Terlaksananya sidang dewan pengupahan dan LKS Tripartit; Terbangunnya Posko may Day tahun 2018	3 Keg	200.000.000	200.000.000	-
1.02	01	17	05	Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja	22 Kab/Kota se NTT	Tersebar nya informasi tentang Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja 50 orang; Terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan 2 kasus; Terlaksananya pemeriksaan terhadap Norma Kerja dan Jamsostek di Perusahaan 22 kab/kota; Terlaksananya pemeriksaan terhadap Norma Kerja dan Norma K3 perempuan dan Anak 20 perusahaan; Terlaksananya Penyusunan Perda Pengawasan Tenaga Kerja Asing 1 perda	5 Keg	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ketenagakerjaan; Tercapainya penegakan hukum ketenagakerjaan; Meningkatnya Jumlah pemeriksaan terhadap Norma ketenagakerjaan; Meningkatnya Kerja yang baik diperusahaan ; Tersusunnya Perda Pengawasan Tenaga Kerja Asing	5 Keg	344.930.000	344.930.000	-
					Provinsi Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Riau dan Kalimantan Utara	Kerjasama Provinsi NTT dengan provinsi pintu keluar masuk TKI	1 Keg	Terjalinnnya kerjasama Provinsi NTT dengan provinsi pintu keluar masuk TKI	1 Dokumen	-	150.000.000	150.000.000
					Kabupaten TTS, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Belu	Pengembangan desa buruh migran	6 Desa	Terlaksananya advokasi dan pelatihan wirausaha	100%	-	200.000.000	200.000.000

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang	
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13	
2.00				URUSAN PILIHAN									
2.00	08			Transmigrasi									
2.00	08	18		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN WILAYAH TRANSMIGRASI						861.000.000	861.000.000	-	
2.00	08	18	03	Penataan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	UPT Iaimbaru Kab. Sumba Timur, UPT Elopore Kab. Sumba Barat, UPT Longge Kab. Manggarai Barat, UPT Uluwae Kab. Ngada, UPT Maronggla Kab. Ngada, UPT Kolikapa kab. Ende, UPT Lewomada Kab. Sikka, UPT Klus Kualin Kab. TTS, UPT Hob	Terlaksananya Bantuan Perlengkapan Sekolah SD/SMP/SMA 2 lokasi; Terlaksananya bantuan sarana dan prasarana peribadatan gereja/Kapela dan Alat tenun 4 lokasi; Terbentuknya Koperasi 2 lokasi; Tersusunnya Data Potensi peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan 4 lokasi; Terpenuhi sarana penerangan bagi warga transmigrasi di permukiman transmigrasi 25 KK	5 Keg	Terlayannya kebutuhan dasar pendidikan di lokasi trana 2 lokasi; Terlayannya / terpenuhinya kebutuhan mental kerohanian di lokasi trans 4 lokasi; Terbentuknya Koperasi 2 lokasi; Tersedianya data perencanaan pengembangan peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan di lkoasi trans 4 lokasi; Terpasangnya PLTS bagi warga transmigrasi di permukiman transmigrasi 25 KK	5 Keg	411.000.000	411.000.000	-	
2.00	08	18	04	Pembangunan Transmigrasi Baru	Kota Kupang, Kab. TTU, Sikka, Manggarai Barat, Sumba Timur, Ende	Terlaksananya Rapat Pendampingan Penyusunan Program Dukungan Ketransmigrasian pada kabupaten Berpotensi dan diluar NTT 4 Lokasi; Terlaksananya sosialisasi Animo Ketransmigrasian 3 kabupaten	2 Keg	Tersusunnya Program Dukungan Ketransmigrasian pada kabupaten Berpotensi dan diluar NTT 4 Lokasi; Terdatanya animo masyrakat untuk mengikuti program transmigrasi 3 kabupaten	2 Keg	250.000.000	250.000.000	-	
2.00	08	18	05	Pelatihan Inposma dan Pelatihan IntegrasiSosial	UPT Laimbaru Kab. Sumba Timur, UPT Longge Kab. Manggarai Barat; UPT Lidor Kab. Rote Ndao dan UPT Sanabibi Kab. Belu	Terlaksananya Pelatihan Imposma di Lokasi Transmigrasi 2 akt 40 orang; Terlaksananya Pelatihan Integrasi Sosial 2 AKT 40 orang	80 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pertanian warga transmigrasi 2 akt 40 orang; Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan warga tranmigrasi dalam integrasi sosial 2 akt 40 orang	80 Orang	200.000.000	200.000.000	-	
TOTAL											7.004.805.200	7.884.405.200	879.600.000

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	4	7	8	9	10	11	12	13

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
0.00				NON URUSAN								
0.00	01			Program Setiap OPD								
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Terlaksananya pengiriman dan penerimaan surat menyurat	Materai Rp 6.000 : 150 lembar; materai Rp 3.000 : 150 lembar dan 1 paket pengiriman	Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100%	2.000.000	2.000.000	-
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan telepon	12 Bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa telepon	100%	3.000.000	3.000.000	-
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	1) Tersedianya tenaga sopir; 2) Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	1) 1 (satu) orang sopir; 2) 2 (dua) unit kendaraan roda 4 dan 1 (satu) kendaraan roda 2 SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	20.520.000	20.520.000	-
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Terlaksananya dana operasional pembayaran honor pengelola keuangan	9 (sembilan) Orang	Persentase pemenuhan jasa administrasi keuangan	100%	40.000.000	40.000.000	-
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya bahan dan alat kebersihan ruangan kantor	12 (dua belas) Bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan dan alat kebersihan kantor	100%	5.000.000	5.000.000	-
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan	1 (satu) Tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	12.000.000	12.000.000	-
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Kupang	Terlaksananya kebutuhan cetak, penggandaan dan jilid sesuai kebutuhan kantor	1 (satu) Tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan, penggandaan dan jilid	100%	12.500.000	12.500.000	-
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor	12 (dua belas) Bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan penerangan bangunan kantor	100%	500	500	-
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai DP3A Provinsi NTT	12 (dua belas) Bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan	100%	2.000.000	2.000.000	-
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Tersedianya konsumsi dan snack bagi tamu kedinasan dan kegiatan rapat rutin	12 (dua belas) Bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	100%	15.000.000	15.000.000	-

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Kupang	Terlaksananya sinergitas program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi	1 (satu) Paket	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi	100%	35.000.000	35.000.000	-
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Tersedianya beras bagi pegawai	12 (dua belas) Bulan	Meningkatnya pelayanan SDM aparatur	100%	4.500.000	4.500.000	-
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 Kabupaten/Kota se-NTT	Tercapainya sinergitas program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota	12 (dua belas) Bulan	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi lintas kabupaten/kota se-NTT	100%	16.820.320	16.820.320	-
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan jasa jaminan sosial bagi tenaga honor/pegawai tidak tetap	12 (dua belas) Bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa jaminan sosial	100%	705.168	705.168	-
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						56.000.000	56.000.000	-
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Terpeliharanya pemeliharaan secara baik kendaraan operasional	2 (dua) unit kendaraan roda 4 dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 SKPD	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100%	30.000.000	30.000.000	-
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terpeliharanya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	3 (tiga) Paket	Meningkatnya pelayanan umum	100%	26.000.000	26.000.000	-
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						10.400.000	10.400.000	-
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Tersedianya data dan laporan	4 (empat) Paket	Meningkatnya kinerja OPD	100%	10.400.000	10.400.000	-
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
1.02		02		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1.02		02	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN						821.825.512	821.825.512	-
1.02		02	15	01 Peningkatan Upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Maumere dan Pangkalpinang	Terlaksananya Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tingkat Provinsi NTT serta keikutsertaan pada Rakornas	1 (satu) kali Rakor 88 org (4 org per kab/kota) dan 1 (satu) kali Rakornas	Terwujudnya harmonisasi dan sinergitas penanganan masalah perempuan dan anak serta keikutsertaan pada Rakornas	1 (satu) Dokumen	135.640.000	135.640.000	-

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13
1.02	02	15	02	Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1) Kota Kupang; 2) Kota Kupang; 3) Kota Kupang; 4) Kota Kupang dan Kab Kupang; 5) Kota Kupang	1) Terlaksananya penyusunan RAD perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak; 2) Terlaksananya rapat evaluasi tahunan, awal, pertengahan dan akhir pelaksanaan gugus tugas trafficking (sub pencegahan); 3) Terbentuknya POKJA perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban konflik sosial (P3AKS); 4) Terlaksananya kampanye anti trafficking dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; 5 Tersedianya operasional P2TP2A.	1) 1 (satu) RAD; 2) 3 kali rencana kerja; 3) 1 SK Pokja; 4) 2 sekolah; 5) Kantor pelayanan P2TP2A 12 (dua belas) Bulan	1) Terwujudnya peran serta stakeholder terhadap penanganan korban kekerasan dalam rangka perlindungan perempuan; 2) Terwujudnya koordinasi dan komitmen pencegahan terjadinya trafficking; 3) Terwujudnya koordinasi penanganan korban konflik sosial bagi perempuan dan anak; 4) Tersosialisasinya UU perlindungan perempuan serta meningkatnya pemahaman dan komitmen dalam masyarakat terhadap trafficking dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; 5) Tersedianya pelayanan P2TP2A	1) dokumen; 2) 3 dokumen; 3) 1 SK Pokja; 4) 2 sekolah; 5) 1 Dokumen	349.974.512	349.974.512	-
1.02	02	15	03	Monitoring dan Evaluasi (Terpadu)	1) 22 kabupaten/kota se-NTT; 2) Kota Kupang dan Yogyakarta	1) Terlaksananya Penyusunan Instrumen Pengolahan data dan Pembuatan Laporan Monev; 2) Terlaksananya Penyusunan Updating data profil gender dan Anak	1) Laporan Monev; 2) Profil Gender dan Anak sebanyak 200 Buku	1) Tersusunnya laporan Monev; 2) Tersedianya Buku Profil Gender dan Anak	1) 22 kabupaten/kota se-NTT; 2) 200 Buku	336.211.000	336.211.000	-
1.02	02	16		PROGRAM PENINGKATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK						645.076.000	645.076.000	-
1.02	02	16	01	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	1) Kota Kupang, Sabu, Rote, Kab Kupang, Flotim, TTU dan Nagekeo; 2) Kab Rote Ndao; 3) Kab Belu dan Malaka; 4) Kota Kupang; 5) Kota Kupang	1) Evaluasi kelembagaan kelompok kerja pengarusutamaan gender (POKJA PUG) dan focal point gender (FPG) OPD di provinsi; 2) Terlaksananya pelatihan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) bagi ASN dan Tim TAPD di provinsi dan kabupaten; 3) Fasilitasi pembentukan P2TP2A; 4) Peningkatan KIE gender; 5) Pembentukan forum peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (PPEP)	1) 1 dokumen laporan evaluasi; 2) 1 dokumen laporan (GAB, GBS dan TOR/KAK); 3) 2 rekomendasi; 4) 3 kali dialog interaktif dan 1 paket radio spot serta cetak kalender; 5) 1 dokumen rencana kerja forum PPEP	1) Terwujudnya pemahaman POKJA dan FPG tentang PUG, PPRG, ARG, GAB dan GBS; 2) Melembaganya perencanaan program/kegiatan menggunakan kajian PPRG, ARG, GAB, GBS yang dijabarkan dalam TOR/KAK; 3) Adanya komitmen pembentukan P2TP2A di 2 kabupaten; 4) Terbangunnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender; 5) Konsolidasi program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan dan penanganan kemiskinan	12 (dua belas) Bulan	140.000.000	140.000.000	-
1.02	02	16	02	Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak	Kota Kupang	1) Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan TPA kepada masyarakat; 2) Terlaksananya perlindungan anak oleh pemangku kepentingan (Dinas Sosial, Dinkes, Kepolisian, Satpol PP, LKSA, Peksos, TKSA, Dinas PPPA, Kota Kupang)	1) Tersedianya 1 dokumen SOP Pelayanan ; 2 Adanya SK Tim	1) Kelancaran pelayanan TPA, tersedianya operasional pelayanan penitipan anak; 2) Menurunkan situasi Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum/ABH, Anak Jalanan, Anak dengan Disabilitas, Anak Korban Tindak Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus) dalam rangka mendapatkan hak Tumbuh Kembang Anak	1) 29 Anak Usia Dini; 2) Pengasuh/Pendidik, Dokter	200.000.000	200.000.000	-

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	4	7	8	9	10	11	12	13			
1.02	02	16	04	Penguatan Kapasitas dan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	Kab. Rote Ndao, Sumba Timur dan Ende; Alor; Nagakeo	1) Bimtek Manajemen usaha dan peningkatan hasil produksi kelompok usaha perempuan; 2) Lokakarya pengakuan posisi dan peran perempuan dalam urusan pengambilan keputusan; 3) Sosialisasi Hak - hak Politik Perempuan potensial	1) Sumba Timur; 2) Alor; 3) Nagekeo	1) Meningkatnya Peran Perempuan Pedesaan dalam usaha ekonomi Produktif; 2) Meningkatnya Partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam forum pengambilan keputusan (Musrenbangdes, BPD, RTL, RW, dll); 3) Meningkatnya keterlibatan perempuan Potensial dalam politik	1) 1 Kelompok ekonomi perempuan; 2) 10% Keputusan yang dihasilkan responsif gender; 3) Keterlibatan perempuan potensial dalam bidang politik 30 Orang	114.150.000	114.150.000	-
1.02	02	16	15	Pengembangan Kabupaten/Kota layak anak	1) Kab Malaka, 2) Kab. Sumba Barat, 3) Kab. Sumba Tengah, 1) Kab Malaka, 2) Surabaya	1) Fasilitasi pembentukan desa menuju layak anak; 2) Konferda dan Forum Anak Nasional	1) 3 (tiga) kabupaten; 2) 10 duta anak	1) Terbentuknya desa layak anak; 2) Terpilihnya 10 duta anak	1) Kab Malaka, Kab Sumba Barat, Kab Sumba Tengah; 2) Kab Malaka dan Surabaya	190.926.000	190.926.000	-
TOTAL										1.702.847.000	1.702.847.000	-

Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	4	7	8	9	10	11	12	13
0.00		NON URUSAN							
0.00	01	Program Setiap OPD							
0.00	01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					611.089.000	611.089.000	-
0.00	01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.500.000	1.500.000	-
0.00	01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					167.052.000	167.052.000	-
0.00	01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional					28.520.000	28.520.000	-
0.00	01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					60.898.000	60.898.000	-
0.00	01 01 08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor					47.534.000	47.534.000	-

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang	
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				Target
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13	
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor							37.917.000	37.917.000	-
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							26.435.000	26.435.000	-
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor							5.000.000	5.000.000	
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							9.996.000	9.996.000	-
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman							12.300.000	12.300.000	-
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah							57.500.000	57.500.000	-
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas							12.000.000	12.000.000	-
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah							68.750.000	68.750.000	-
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor							63.410.000	63.410.000	-
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial							12.277.000	12.277.000	-
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR							193.320.000	193.320.000	-
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor							52.120.000	52.120.000	-
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional							109.150.000	109.150.000	-
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor							12.000.000	12.000.000	-
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor							20.050.000	20.050.000	-
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							26.288.000	26.288.000	-
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							26.288.000	26.288.000	-
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
1.02	03			Pangan									
1.02	03	16		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN / PERKEBUNAN							6.292.273.000	6.292.273.000	-
1.02	03	16	01	Peningkatan Manajemen Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan Desa Mandiri Pangan							479.412.000	479.412.000	-

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang	
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1				2	4	7	8	9	10	11	12	13	
1.02	03	16	02	Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan							476.110.000	476.110.000	-
1.02	03	16	05	Peningkatan Mutu Ketahanan Pangan							4.147.410.000	4.147.410.000	-
1.02	03	16	12	Sosialisasi dan Pengawasan Pangan Segar							538.054.000	538.054.000	-
1.02	03	16	13	Monitoring Evaluasi, dan Sinkronisasi Perencanaan Program / Kegiatan Ketahanan Pangan							518.151.000	518.151.000	-
1.02	03	16	14	Pengembangan Database dan Website Ketahanan Pangan							133.136.000	133.136.000	-
TOTAL											7.122.970.000	7.122.970.000	-

Dinas Lingkungan Hidup Daerah

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Penetapan Th. 2018	Pagu Perubahan Th. 2018	Tambah Kurang			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	4	7	8	9	10	11	12	13			
0.00			NON URUSAN									
0.00	01		Program Setiap OPD									
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				808.253.500	868.253.500	60.000.000			
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	tersedianya materai, perangko dan pengiriman surat menyurat	400 buah perangko 1.500, 536 buah penrangko 5.000, 1057 buah materai 6.000, 2 paket pengiriman, 12 bulan	kelancaran administrasi surat menyurat	100	10.050.000	10.050.000	-
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Terwujudnya perlengkapan gedung kantor	100%	194.750.000	254.750.000	60.000.000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dan driver	4 unit kendaraan roda 4	tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	100	23.000.000	23.000.000	-
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	jumlah pengelola keuangandan terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	19 orang pengelola, 6 komputer operator, 3 sopir, 2 tenaga tata usaha Orang	tersedianya administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	230.400.400	230.400.400	-
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	kota kupang	tersedianya petugas kebersihan, peralatan dan bahan kebersihan kantor	- 1 orang tenaga kontrak; - 2 paket alat dan bahan kebersihan; - 12 bulan	Terciptanya suasana kerja yang lebih nyaman dan bersih	100%	31.327.000	31.327.000	-
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	2 paket alat tulis kantor, 12 bulan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	37.034.900	37.034.900	-